



BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2020



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau periode 2020 dengan lancar. Terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh tim yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya demi tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana BPJN Kepulauan Riau bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada dalam memberikan laporan kinerja sebagai tolak ukur capaian keberhasilan pada tahun 2020. Laporan Kinerja disusun berdasarkan sasaran program penyelenggaraan jalan dengan pengukuran berdasarkan indikator kinerja Aksesibilitas Jalan Nasional, Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Rating Keselamatan Jalan Nasional. Pengukuran dengan indikator kinerja menghasilkan output kegiatan yang ada seluruh satuan kerja di lingkungan BPJN Kepulauan Riau. Berdasarkan pengukuran tersebut didapatkan realisasi terhadap target kinerja, tujuan dan sasaran program sebagai pencapaian kinerja BPJN Kepulauan Riau pada tahun 2020 yang disusun kedalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang transparan kepada seluruh pihak yang terkait sebagai sarana untuk mengetahui tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta pencapaian tahun 2020. Melalui disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPJN Kepulauan Riau tahun 2020 ini, diharapkan dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang maksimal dan Laporan Kinerja ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan kepada peraturan yang berlaku. Ucapan maaf juga kami sampaikan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau tahun 2020.

Batam, Januari 2021

Kepala Balai

**Ir. Faizal, M.Si**

NIP. 196409121996031002





## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Tugas dan Fungsi.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Pencapaian Kinerja .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 Tugas dan Fungsi.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Struktur Organisasi .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Isu Strategis.....</b>	<b>14</b>
1.4.1    Kondisi umum wilayah Kerja BPJN Kepulauan Riau .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>26</b>
<b>2.1 Uraian Singkat Renstra .....</b>	<b>26</b>
2.1.1    Tujuan Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau.....	28
2.1.2    Sasaran Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau .....	28
2.1.3    Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau .....	29
<b>2.2 Perjanjian Kinerja.....</b>	<b>30</b>
<b>2.3 Metode Pengukuran .....</b>	<b>32</b>
<b>2.4 Target Tahun ini Menurut Rencana Strategis.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI .....</b>	<b>43</b>
<b>3.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....</b>	<b>43</b>
3.1.1    Informasi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
3.1.2    Informasi Kepegawaian berdasarkan Golongan .....	44
3.1.3    Informasi Kepegawaian berdasarkan Usia.....	45
3.1.4    Informasi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan .....	46
3.1.5    Informasi Kepegawaian berdasarkan Jabatan .....	46
<b>3.2 Sarana Prasarana .....</b>	<b>47</b>
<b>3.3 DIPA .....</b>	<b>47</b>
3.3.1    Alokasi DIPA dan penjelasan perubahan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kepulauan Riau .....	47
3.3.2    Komposisi pendanaan (RPM, PHLN, SBSN, dll) pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau .....	51
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>52</b>
4.1.1    Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan .....	55



4.1.2	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan .....	56
4.1.3	Preservasi Rutin Jembatan .....	57
4.1.4	Preservasi Jembatan .....	58
4.1.5	Pembangunan Jalan.....	59
4.1.6	Pelebaran Jalan Menambah Lajur.....	61
4.1.7	Pembangunan Jembatan .....	62
4.1.8	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan .....	63
<b>4.2</b>	<b>Perbandingan Kinerja Organisasi .....</b>	<b>64</b>
<b>4.3</b>	<b>Realisasi Anggaran .....</b>	<b>64</b>
4.3.1	Analisis atas efisiensi sumber daya terhadap capaian kinerja dan anggaran.....	65
<b>4.4</b>	<b>Paket Strategis .....</b>	<b>66</b>
<b>4.5</b>	<b>Paket Diresmikan dan Penghargaan.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
<b>5.1</b>	<b>Permasalahan .....</b>	<b>71</b>
<b>5.2</b>	<b>Rekomendasi .....</b>	<b>71</b>
<b>L A M P I R A N .....</b>		<b>72</b>





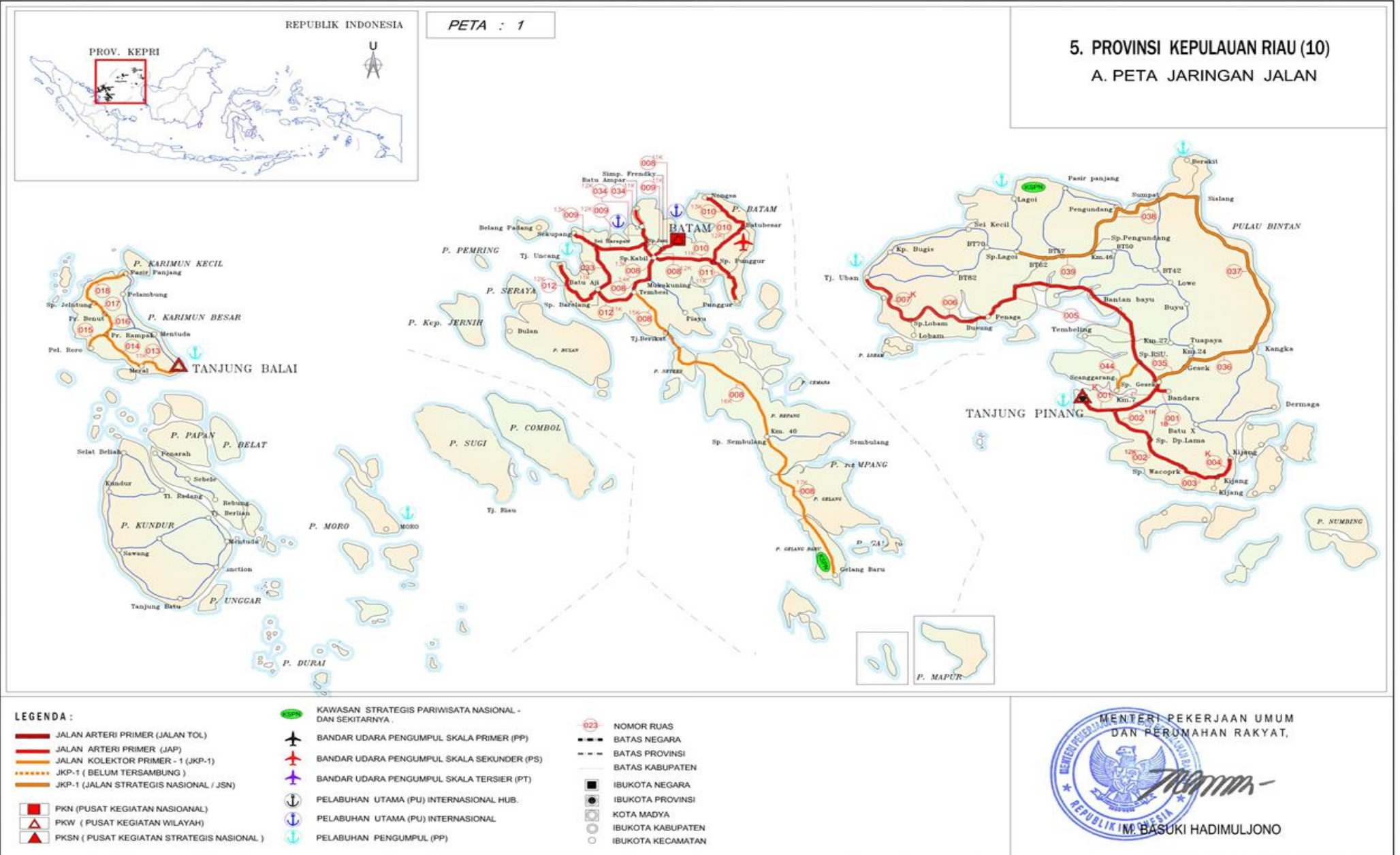
## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Tugas dari BPJN Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam pasal 104 Permen PUPR 16/PRT/M/2020 adalah melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sebagai pemahaman atas pasal 12 dan pasal 13 bahwa setiap K/L melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-KL periode berikutnya yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) yaitu Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020. Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang dengan tingkatan satuan kerja, unit organisasi dan K/L dalam bentuk: a) Rencana Strategis; b) Perjanjian Kinerja; c) Pengukuran Kinerja; d) Pengelolaan Data Kinerja; e) Pelaporan Kinerja; dan f) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAB V Pasal 6 Ayat 3, bahwa seluruh Unit Eselon II, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Bina Marga diharuskan membuat dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan 2020-2024.

Lingkup Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dengan total panjang ruas 586,83 Km terdiri dari Jalan Arteri (JAP) sepanjang 196,93 Km dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sepanjang 389,90 Km. Lokasi ruas Jalan Nasional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada pada Kota/Kabupaten :

1. Kota Batam
2. Kota Tanjungpinang
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Kepulauan Anambas
5. Kabupaten Natuna
6. Kabupaten Lingga
7. Kabupaten Karimun







## B. DAFTAR RUAS JALAN

NO.	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	JAP (KM)	JKP-1 (KM)
1	001	11	K JL. HANG TUAH (TANJUNG PINANG)	0,82	0,82	
2	001	12	K JL. AGUS SALIM (TANJUNG PINANG)	0,72	0,72	
3	001	13	K JL. USMAN HARUN (TANJUNG PINANG)	0,93	0,93	
4	001	14	K JL. YOS SOEDARSO (TANJUNG PINANG)	0,95	0,95	
5	001	15	K JL. WIRATNO (TANJUNG PINANG)	1,20	1,20	
6	001	16	K JL. BASUKI RAHMAT (TANJUNG PINANG)	1,26	1,26	
7	001	17	K JL. A. YANI (TANJUNG PINANG)	1,80	1,80	
8	001	18	K JL. RH. FISABILILLAH (TANJUNG PINANG)	4,54	4,54	
9	001	19	K JL. D.I. PANJAITAN (TANJUNG PINANG)	2,05	2,05	
10	001	1A	K JL. SP. ADI SUCIPTO - GESEK (TANJUNG PINANG)	6,33	6,33	
11	001	1B	K JLN. BANDARA (SP. RSUP - BANDARA RHF)	2,56	2,56	
12	002	11	K JL. RH. FISABILILLAH (KP. HAJI) - SP. DOMPAK LAMA (TG. PINANG)	2,37	2,37	
13	002	12	K JL. SP. DOMPAK LAMA - SP. WACOPEK (TG. PINANG)	7,63	7,63	
14	003		SP. WACOPEK - KIJANG (SEI ENAM) (KAB. BINTAN)	7,87	7,87	
15	004	11	K JL. BERDIKARI (KAB. BINTAN)	0,13	0,13	
16	004	12	K JL. KEBUN NENAS (KAB. BINTAN)	0,48	0,48	
17	004	13	K JL. TANAH KUNING (KAB. BINTAN)	0,71	0,71	
18	004	14	K JL. BAREK BETAWI (KAB. BINTAN)	0,37	0,37	
19	004	15	K JL. HANG JEBAT (KAB. BINTAN)	0,47	0,47	
20	004	16	K JL. HANG TUAH (KAB. BINTAN)	0,14	0,14	
21	004	17	K JL. SRIBAYINTAN - PELABUHAN (KAB. BINTAN)	0,60	0,60	
22	005		SP. GESEK (KM 16) - SP. BUSUNG	32,00	32,00	
23	006		SP. BUSUNG - SP. LOBAM	12,86	12,86	
24	007	11	K SP. LOBAM - TANJUNG UBAN	3,84	3,84	
25	008	11	K BATAM CENTRE - SP. FRANKY (JL. A. YANI) (BATAM)	1,72	1,72	
26	008	12	K SP. FRANGKY - SP. KABIL (JL. A. YANI) (BATAM)	1,93	1,93	
27	008	13	K SP. KABIL - MUKA KUNING (JL. A. YANI) (BATAM)	3,82	3,82	
28	008	14	K MUKA KUNING - TEMBESI (JL. LETJEN SUPRAPTO)	4,91	4,91	
29	008	15	K TEMBESI - TANJUNG BERIKAT	7,76	7,76	
30	008	16	K TANJUNG BERIKAT - SP. SEMBULANG	25,83		25,83
31	008	17	K SP. SEMBULANG - PEL. GALANG	30,03		30,03
32	009	11	K SP. KABIL - SP. JAM (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM)	3,39	3,39	
33	009	12	K SP. JAM - SEI HARAPAN (JL. GAJAH MADA) (BATAM)	8,67	8,67	
34	009	13	K SEI HARAPAN - SEKUPANG (JL. RE MARTADINATA) (BATAM)	3,92	3,92	
35	010	11	K SP. KABIL - SP. PUNGGUR (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM)	6,27	6,27	
36	010	12	K SP. PUNGGUR - BATU BESAR (JL. HANG TUAH) (BATAM)	7,04	7,04	
37	010	13	K BATU BESAR - NONGSA (JL. HANG JEBAT, JL. HANG LEKIU) (BATAM)	15,03	15,03	
38	011	11	K SP. PUNGGUR - TELAGA PUNGGUR (JL. HASANUDDIN) (BATAM)	11,64	11,64	
39	012	11	K TEMBESI - BATU AJI (JLN. LETJEN SUPRAPTO)	5,65	5,65	
40	012	12	K BATU AJI - TANJUNG UNCANG (JLN. BRIGJEN KATAMSO)	9,09	9,09	
41	013	11	K TG. BALAI - MERAL	3,19		3,19
42	014		MERAL - PARIT RAMPAK	6,59		6,59
43	015		PARIT RAMPAK - PELABUHAN RORO	3,15		3,15
44	016		PARIT RAMPAK - PARIT BENUT	2,44		2,44
45	017		PARIT BENUT - SP. JELETUNG	1,37		1,37
<b>SUB TOTAL 1</b>				<b>256,02</b>	<b>183,43</b>	<b>72,59</b>

NO.	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	JAP (KM)	JKP-1 (KM)
46	018		SP. JELETUNG - PASIR PANJANG	9,51		9,51
47	019	11	K DAIK - TANJUNG BUTON	5,97		5,97
48	020	11	K DAIK - SP. LIMBUNG	7,88		7,88
49	021		SP. LIMBUNG - SP. RESUN	3,23		3,23
50	022	11	K SP. RESUN - PEL. SUNGAI TENAM	12,18		12,18
51	023	11	K DABO - KOTE	17,13		17,13
52	024		KOTE - JAGOH	9,60		9,60
53	025		JAGOH - PELABUHAN RORO (SEI BULUH)	0,46		0,46
54	026		SELAT LAMPA - SP. SEKUNYAM	14,18		14,18
55	027		SP. SEKUNYAM - DESA CEMAGA	23,65		23,65
56	028		DESA CEMAGA - SEI ULU	21,80		21,80
57	029	11	K SEI ULU - RANAI (SP. LANTAMAL)	9,39		9,39
58	030	11	K RANAI - SP. TANJUNG	12,43		12,43
59	031		SP. TANJUNG - TANJUNG DATUK	34,67		34,67
60	032		TANJUNG DATUK - TELUK BUTON	1,76		1,76
61	033	11	K JLN. DIPONEGORO (SP. SEI HARAPAN - SP. BASECAMP BATU AJI)	8,00	8,00	
62	034	11	K JLN. DUYUNG (PEL. BATU AMPAR - SP. BALOI CENTRE)	3,90	3,90	
63	034	12	K BALOI CENTRE - SP. SEI LADI (UIB)	1,60	1,60	
64	035		KM. 16 / SP. GESEK - GESEK	5,54		5,54
65	036		GESEK - KANGKA	5,85		5,85
66	037		KANGKA - SIALANG	30,54		30,54
67	038		SIALANG - SP. PENGUNDANG (KM. 46)	14,55		14,55
68	039		SP. PENGUNDANG - SP. LAGOI	21,15		21,15
69	040		SP. SUNGAI BESAR - PEL. PANCUR	14,00		14,00
70	041		TAREMPA - SP. RINTIS	9,50		9,50
71	042		PENINTING - PAYALAMAN	18,00		18,00
72	043		PAYALAMAN - PEL. RORO	3,43		3,43
73	044		SP. RUMAH SAKIT - SEANGGARANG	10,90		10,90
<b>SUB TOTAL 2</b>				<b>330,80</b>	<b>13,50</b>	<b>317,30</b>
<b>TOTAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>				<b>586,83</b>	<b>196,93</b>	<b>389,90</b>







## 1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga dimana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program tahunan pembangunan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan jalan;
2. Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
3. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
4. Pengendalian penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
5. Pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
6. Pengendalian pencegahan/mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
7. Pengendalian perencanaan dan pengawasan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak perencanaan dan pengawasan;
8. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
9. Penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
10. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
11. Pelaksanaan audit keselamatan jalan;
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
13. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
14. Pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
15. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara selaku Unit Akuntansi Wilayah serta laporan kinerja;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga serta koordinasi dengan instansi terkait;
17. Penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan; dan
18. Dukungan verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah.



## 2. Tujuan dan Sasaran

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga diharapkan dapat memenuhi tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam rencana strategis Ditjen Bina Marga yaitu:

1. Terwujudnya konektivitas Jalan Nasional (Agenda Pembangunan Nasional PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang diturunkan dalam PP.2 (Infrastruktur Ekonomi) dengan sasaran utama yaitu meningkatnya konektivitas wilayah);
2. Pengguna Jalan Nasional dapat memperoleh kinerja pelayanan Jalan Nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan Jalan Nasional;
3. Mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga (sesuai Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2004 maupun Peraturan Menteri PUPR Nomor : 03/PRT/M/2019) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan, yang implementasinya dilaksanakan oleh setiap Unit Eselon II Pusat maupun UPT/Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga;
4. Sebagai upaya dari Ditjen Bina Marga untuk memenuhi modal dasar organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Sasaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau yang diharapkan dicapai dalam memenuhi :

1. Meningkatkan kualitas layanan Jalan Nasional;
2. Menambah kapasitas jaringan Jalan Nasional;
3. Turut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian guna mendukung daya saing industri strategis Nasional;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan;
5. Mendukung pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.

## 3. Pencapaian Kinerja

Lingkup tugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada ruas Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 586,83 Km. Pengukuran kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 1 Capaian Kinerja BPIN Kepulauan Riau Tahun 2020

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK					CAPAIAN KINERJA KEUANGAN					KETERANGAN
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET		REALISASI (Rp. Ribu)	CAPAIAN (%)		
			VOLUME AWAL	VOLUME REVISI AKHIR		THD VOLUME TARGET AWAL	THD TARGET VOLUME REVISI AKHIR	ANGGARAN AWAL (Rp. Ribu)	ANGGARAN REVISI AKHIR (Rp. Ribu)		THD ANGGARAN TARGET AWAL	THD TARGET ANGGARAN REVISI AKHIR	
<b>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>													
1.	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	km	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	10.670.000	9.598.760	9.598.760	89,96	100,00	
	- Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	km	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	10.670.000	9.598.760	9.598.760	89,96	100,00	
2.	Panjang Pembangunan Jalan	km	10,73	3,75	3,75	34,95	100,00	86.410.000	32.902.853	32.902.853	38,08	100,00	
	- Pembangunan Jalan	km	10,73	3,75	3,75	34,95	100,00	86.410.000	32.902.853	32.902.853	38,08	100,00	
3.	Panjang Pembangunan Jembatan	m	82,00	19,11	19,11	23,30	100,00	40.347.000	8.064.500	8.064.500	19,99	100,00	
	- Pembangunan Jembatan	m	82,00	19,11	19,11	23,30	100,00	40.347.000	8.064.500	8.064.500	19,99	100,00	
<b>Tingkat Rating Kondisi</b>													
4.	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	542,85	554,53	554,53	102,15	100,00	39.991.700	37.017.711	36.710.722	91,80	99,17	
	- Pemeliharaan Rutin	km	117,56	233,04	233,04	198,23	100,00	3.698.315	10.246.993	10.237.493	276,82	99,91	
	- Pemeliharaan Rutin Kondisi	km	246,98	171,19	171,19	69,31	100,00	14.189.813	10.312.595	10.027.332	70,67	97,23	
	- Penunjangan/Holding	km	178,31	150,30	150,30	84,29	100,00	22.103.572	16.362.850	16.359.290	74,01	99,98	
5.	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	m	5.654,50	5.642,90	5.642,90	99,79	100,00	4.561.540	4.151.193	4.151.193	91,00	100,00	
	- Pemeliharaan Rutin Jembatan	km	5.654,50	5.642,90	5.642,90	99,79	100,00	4.561.540	10.016.286	4.151.193	91,00	41,44	
6.	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	21.390.179	19.811.132	19.538.774	91,34	98,63	
<b>Tingkat Rating Keselamatan</b>													
7.	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	33,16	22,57	22,57	68,06	100,00	117.825.861	51.552.981	45.177.389	38,34	87,63	
	- Pemeliharaan Preventif Jalan	km	3,90	3,45	3,45	88,46	100,00	448.634	231.525	231.525	51,61	100,00	
	- Rehabilitasi Minor Jalan	km	16,56	12,99	12,99	78,44	100,00	37.020.728	20.517.033	20.517.033	55,42	100,00	
	- Rehabilitasi Mayor Jalan	km	3,90	1,55	1,55	39,74	100,00	16.280.627	4.636.467	4.636.467	28,48	100,00	
	- Rekonstruksi Jalan	km	8,00	4,13	4,13	51,63	100,00	39.584.549	19.560.839	19.560.839	49,42	100,00	
	- Penanganan Longsor	km	0,80	0,45	0,45	56,25	100,00	24.491.323	6.607.117	231.525	0,95	3,50	
8.	Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	km	-	22,45	22,45	100,00	100,00	-	26.007.437	25.995.747	-	99,96	
	- Penanganan Drainase	km	-	22,45	22,45	-	100,00	448.634	231.525	231.525	51,61	100,00	
9.	Panjang Preservasi Jembatan	m	1.464,60	475,20	475,20	32,45	100,00	33.233.162	8.868.677	8.868.570	26,69	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan	m	1.464,60	475,20	475,20	32,45	100,00	33.233.162	8.868.677	8.868.570	26,69	100,00	
<b>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>													
10.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	-	2,00	2,00	-	100,00	-	1.300.785	1.286.048	-	98,87	
11.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	5.657.831	7.952.427	7.783.339	137,57	97,87	
12.	Layanan Perkantoran	Layanan	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	1.486.084	1.752.370	1.638.771	110,27	93,52	





**BAB I**

BPJN KEPULAUAN RIAU



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang dengan tingkatan satuan kerja, unit organisasi dan K/L. Serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyajian Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2020 ini memuat gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, rencana strategic dan program serta tingkat capaian kinerja program selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan LaKIP ini merupakan upaya dan langkah-langkah yang tepat dalam mengukur tingkat pencapaian keberhasilan kinerja suatu program dan kegiatan yang dilakukan.

Laporan Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau merupakan perwujudan atas kewajiban Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Sistem Akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang kontinyu dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi organisasi.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk menyusun pelaporan kinerja harus menyajikan informasi tentang :

- a. Uraian Singkat Organisasi;
- b. Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.





## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;
- c. Pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;
- d. Penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan Jalan Nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- e. Penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;
- f. Penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalandan jembatan termasuk penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
- g. Pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*);
- i. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;
- j. Penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- k. Pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan dan jembatan;
- l. Pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- m. Pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;
- n. Penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
- o. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;





- p. Koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayahkerjanya;
- q. Pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;
- r. Pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;
- s. Evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;
- t. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- u. Pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan;
- v. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- w. Penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- x. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;
- y. Penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan
- z. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.



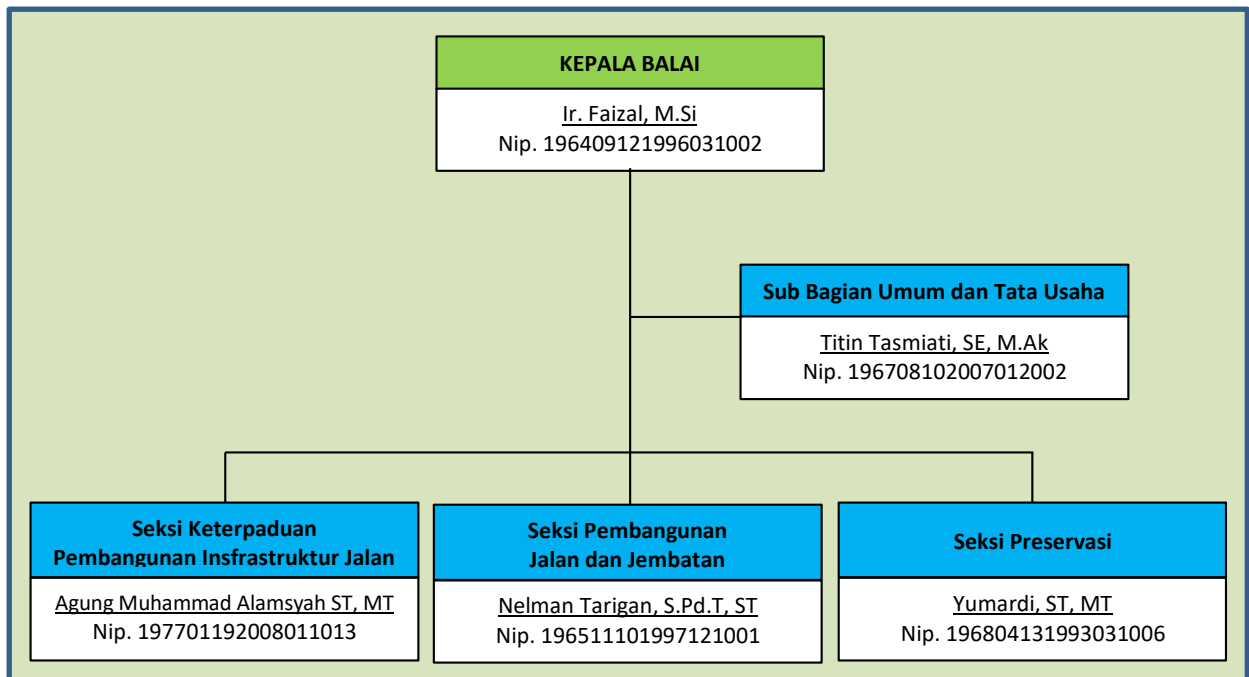
### 1.3 Struktur Organisasi

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau memiliki struktur organisasi kerja sebagai berikut :

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau memiliki susunan organisasi terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Preservasi.

Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau

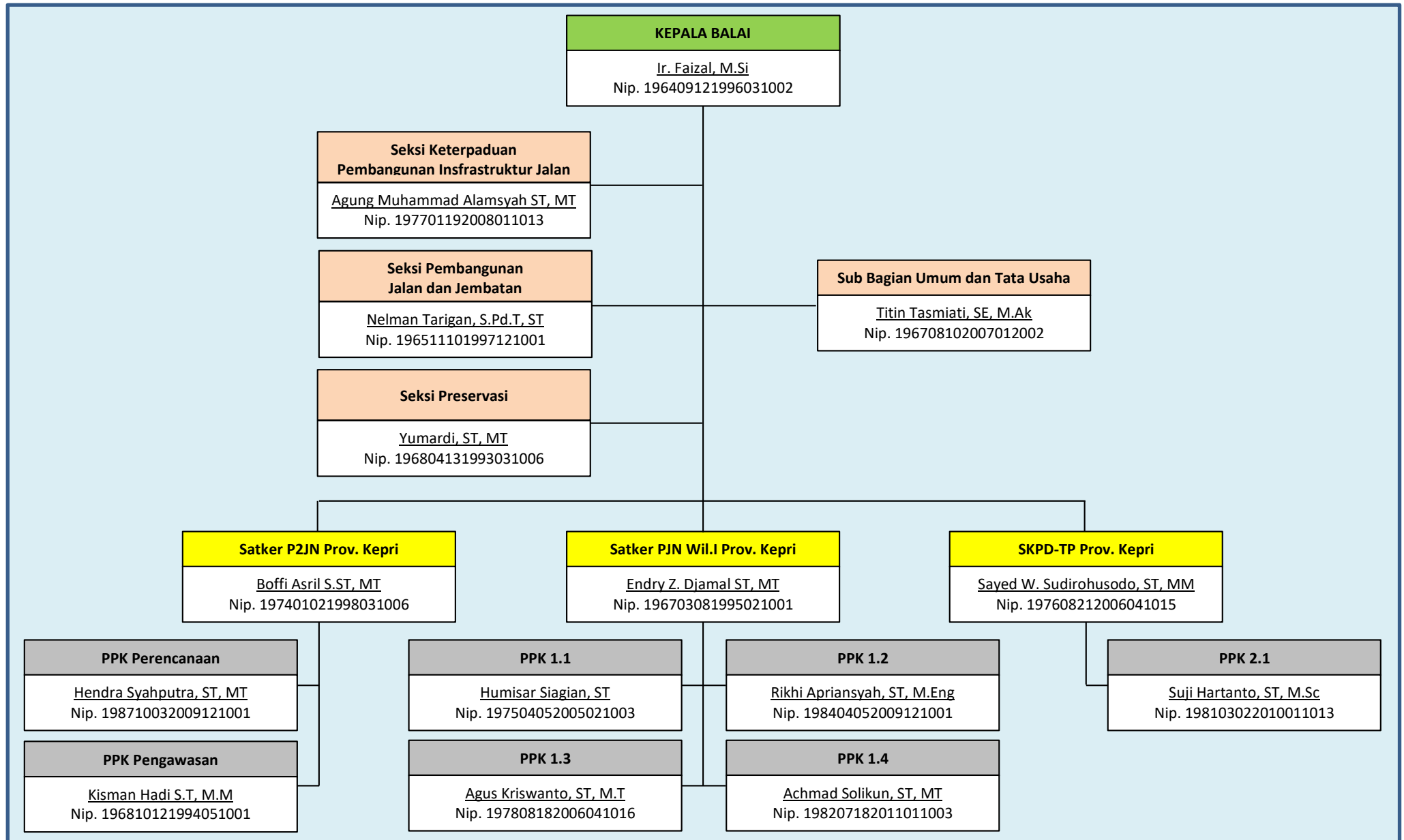


Susunan unit organisasi yang berada di wilayah kerja Balai Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
  - PPK Perencanaan
  - PPK Pengawasan
2. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
  - PPK 1.1
  - PPK 1.2
  - PPK 1.3
  - PPK 1.4
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah - Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
  - PPK 2.1



Gambar 1.3.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau







1. Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
  - c. Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan dan penetapan leger Jalan Nasional, penyusunan laporan berkala Balai, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Balai, dan penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Balai.
  
2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan program pengadaan lahan jalan nasional, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaandan pengawasan jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi data jaringan dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah, penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan, evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, penyusunan rencana, program dan anggaran perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, dan penyusunan usulan perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.



3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi, melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol, melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian, melaksanakan penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya, melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahandan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait pembangunan jalan dan jembatan, evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.
4. Seksi Preservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan audit keselamatan jalandan jembatan, koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa



preservasi jalan dan jembatan, penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan, dan sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*).

## 1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan dengan mendasarkan pada hasil identifikasi isu strategis berdasarkan tantangan dan kebijakan RPJMN tahun 2020-2024.

### 1.4.1 Kondisi umum wilayah Kerja BPJN Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2002 dengan luas wilayah 252.601 Km<sup>2</sup> (95 persennya adalah perairan dengan 2.408 pulau besar dan kecil) dan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.973.043 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Lingkup Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dengan total panjang ruas 586,83 Km terdiri dari Jalan Arteri (JAP) sepanjang 196,93 Km dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sepanjang 389,90 Km.

Lokasi ruas Jalan Nasional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada pada Kota/Kabupaten:





## 1. Pulau Bintan

Pulau Bintan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada pulau Bintan penanganan dilakukan oleh PPK 1.1 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau panjang ruas 90,63 Km dan PPK 2.1 SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau panjang ruas 90,50 Km dengan total panjang ruas 181,13 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.1 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dan PPK 2.1 SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau BPJN Kepulauan Riau.

Peta Ruas Jalan Pulau Bintan



Ruas Jalan Penaganan PPK 1.1 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	005			SP. GESEK (KM 16) - SP. BUSUNG	32,00
2	006			SP. BUSUNG - SP. LOBAM	12,86
3	007	11	K	SP. LOBAM - TANJUNG UBAN	3,84
4	035			KM. 16 / SP. GESEK - GESEK	5,54
5	036			GESEK - KANGKA	5,85
6	037	11	K	KANGKA - SIALANG	30,54
TOTAL JALAN NASIONAL					90,63



Ruas Jalan Penanganan PPK 2.1 SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	003		SP. WACOPEK - KIJANG (SEI ENAM) (KAB. BINTAN)	7,87
2	004	11	JL. BERDIKARI (KAB. BINTAN)	0,13
3	004	12	K JL. KEBUN NENAS (KAB. BINTAN)	0,48
4	004	13	K JL. TANAH KUNING (KAB. BINTAN)	0,71
5	004	14	K JL. BAREK BETAWI (KAB. BINTAN)	0,37
6	004	15	K JL. HANG JEBAT (KAB. BINTAN)	0,47
7	004	16	K JL. HANG TUAH (KAB. BINTAN)	0,14
8	004	17	K JL. SRIBAYINTAN - PELABUHAN (KAB. BINTAN)	0,60
9	038		SIALANG - SP. PENGUNDANG (KM. 46)	14,55
10	039		SP. PENGUNDANG - SP. LAGOI	21,15
11	001	11	K JL. HANG TUAH (TANJUNG PINANG)	0,82
12	001	12	K JL. AGUS SALIM (TANJUNG PINANG)	0,72
13	001	13	K JL. USMAN HARUN (TANJUNG PINANG)	0,93
14	001	14	K JL. YOS SOEDARSO (TANJUNG PINANG)	0,95
15	001	15	K JL. WIRATNO (TANJUNG PINANG)	1,20
16	001	16	K JL. BASUKI RAHMAT (TANJUNG PINANG)	1,26
17	001	17	K JL. A. YANI (TANJUNG PINANG)	1,80
18	001	18	K JL. RH. FISABILILLAH (TANJUNG PINANG)	4,54
19	001	19	K JL. D. I. PANJAITAN (TANJUNG PINANG)	2,05
20	001	1A	K JL. SP. ADI SUCIPTO - GESEK (TANJUNG PINANG)	6,33
21	001	1B	K JLN. BANDARA (SP. RSUP - BANDARA RHF)	2,56
22	044		SP. RUMAH SAKIT - SEANGGARANG	10,90
23	002	11	K JL. RH. FISABILILLAH (KP. HAJI) - SP. DOMPAK LAMA (TG. PINANG)	2,37
24	002	12	K JL. SP. DOMPAK LAMA - SP. WACOPEK (TG. PINANG)	7,63
TOTAL JALAN NASIONAL				90,50

#### Informasi Umum Pulau Bintan:

Pemerintah Kota Tanjungpinang didirikan pada tahun 2001, berdasarkan Undang - Undang Nomor: 5 tahun 2001 dengan luas wilayah 239,5 Km<sup>2</sup> (luas daratan 131,54 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 202.215 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari 57 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2014. Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Pemerintah Kabupaten Bintan didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang - Undang Nomor : 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2000 dengan luas wilayah 88.038,54 Km<sup>2</sup> (luas daratan 1.946,13 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 153.020 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari 38 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2012, yang terdiri dari 2 Sekretariat, 14 Dinas, 8 Badan, 1 Kantor, 1 Inspektorat, 1 Satpol PP, 1 RSUD dan 10 Kecamatan dengan 36 desa dan 16 diantaranya berstatus kelurahan.



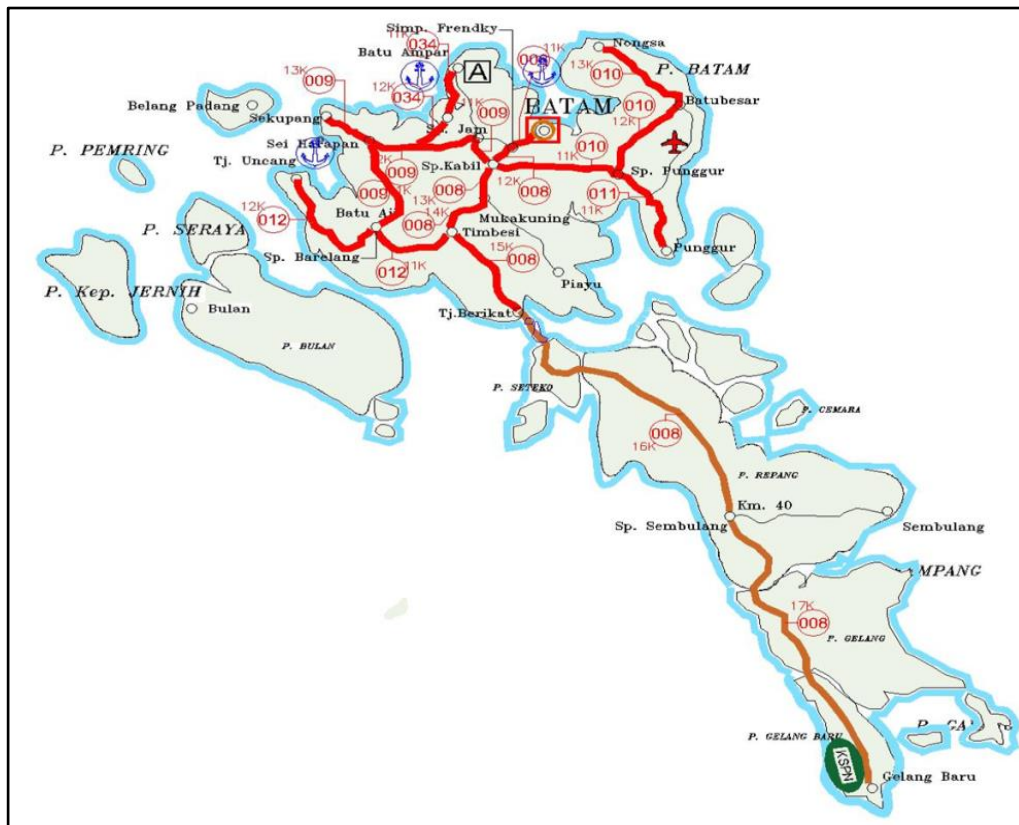
Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Bintan:

- a. Paket Pekerjaan PPK 1.1 terdiri dari:
  - Preservasi Jalan Sp. Gesek (KM 16) - Tanjung Uban - Sialang
  - Rehabilitasi Jembatan Kawal 3 Cs
- b. Paket Pekerjaan PPK 2.1 terdiri dari:
  - Preservasi Jalan KM 16 (Sp. Gesek) - Kijang Cs - Sialang Sp. Lagoi

## 2. Pulau Batam dan Galang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada pulau Batam penanganan dilakukan oleh PPK 1.2 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dengan total panjang ruas 160,18 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.2 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau BPJN Kepulauan Riau.

Peta Ruas Jalan Pulau Batam







Ruas Jalan Penanganan PPK 1.2 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	008	11	K	BATAM CENTRE - SP. FRANKY (JL. A. YANI) (BATAM)	1,72
2	008	12	K	SP. FRANGKY - SP. KABIL (JL. A. YANI) (BATAM)	1,93
3	008	13	K	SP. KABIL - MUKA KUNING (JL. A. YANI) (BATAM)	3,82
4	008	14	K	MUKA KUNING - TEMBESI (JL. LETJE SUPRAPTO)	4,91
5	008	15	K	TEMBESI - TANJUNG BERIKAT	7,76
6	008	16	K	TANJUNG BERIKAT - SP. SEMBULANG	25,83
7	008	17	K	SP. SEMBULANG - PEL. GALANG	30,03
8	009	11	K	SP. KABIL - SP. JAM (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM)	3,39
9	009	12	K	SP. JAM - SEI HARAPAN (JL. GAJAH MADA) (BATAM)	8,67
10	009	13	K	SEI HARAPAN - SEKUPANG (JL. RE MARTADINATA) (BATAM)	3,92
11	010	11	K	SP. KABIL - SP. PUNGGUR (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM)	6,27
12	010	12	K	SP. PUNGGUR - BATU BESAR (JL. HANG TUAH) (BATAM)	7,04
13	010	13	K	BATU BESAR - NONGSA (JL. HANG JEBAT, JL. HANG LEKIU) (BATAM)	15,03
14	011	11	K	SP. PUNGGUR - TELAGA PUNGGUR (JL. HASANUDDIN) (BATAM)	11,64
15	012	11	K	TEMBESI - BATU AJI (JLN. LETJEN SUPRAPTO)	5,65
16	012	12	K	BATU AJI - TANJUNG UNCANG (JLN. BRIGJEN KATAMSO)	9,09
17	033	11	K	JLN. DIPONEGORO (SP. SEI HARAPAN - SP. BASECAMP BATU AJI)	8,00
18	034	11	K	JLN. DUYUNG (PEL. BATU AMPAR - SP. BALOI CENTRE)	3,90
19	034	12	K	BALOI CENTRE - SP. SEI LADI (UIB)	1,60
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>160,18</b>

Informasi Umum Pulau Batam dan Galang:

Pemerintah Kota Batam didirikan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Luas wilayah 426.563,28 ha (luas daratan 108.265 ha dan luas perairan/laut 318.298,28 ha) dan jumlah penduduk sebanyak 1.188.985 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kota Batam terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2007, Nomor : 9 Tahun 2007, Nomor : 10 Tahun 2007, Nomor : 11 Tahun 2007, Nomor : 12 Tahun 2007, Nomor : 13 Tahun 2007, Nomor : 6 Tahun 2013 dan Nomor : 7 Tahun 2013. Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan dengan 64 Kelurahan.

Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Batam dan Galang:

a. Paket Pekerjaan PPK 1.2 terdiri dari:

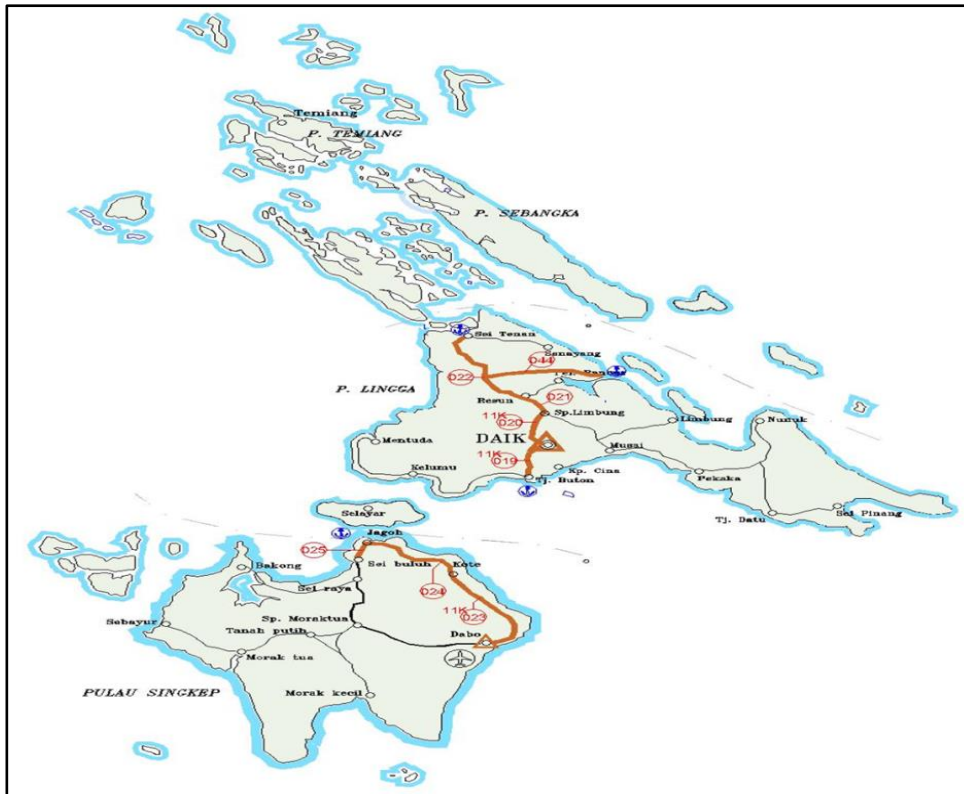
- Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang
- Pelebaran Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tanjung Berikat 1 Km
- Rehabilitasi Jembatan Raja Haji Fisabilillah Cs



### 3. Pulau Lingga dan Pulau Karimun

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada Pulau Lingga dan Pulau Karimun penanganan dilakukan oleh PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dengan total panjang ruas 96,70 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan BPJN Kepulauan Riau.

Peta Ruas Jalan Pulau Lingga



Ruas Jalan Penaganan PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	019	11	K	DAIK - TANJUNG BUTON	5,97
2	020	11	K	DAIK - SP. LIMBUNG	7,88
3	021			SP. LIMBUNG - SP. RESUN	3,23
4	022	11	K	SP. RESUN - PEL. SUNGAI TENAM	12,18
5	040			SP. SUNGAI BESAR - PEL. PANCUR	14,00
6	023	11	K	DABO - KOTE	17,13
7	024			KOTE - JAGO	9,60
8	025	11	K	JAGO - PELABUHAN RORO (SEI BULUH)	0,46
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>70,45</b>



Peta Ruas Jalan Pulau Karimun



Ruas Jalan Penanganan PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	013	11	K	TG. BALAI - MERAL	3,19
2	014			MERAL - PARIT RAMPAK	6,59
3	015			PARIT RAMPAK - PELABUHAN RORO	3,15
4	016	11	K	PARIT RAMPAK - PARIT BENUT	2,44
5	017	12	K	PARIT BENUT - SP. JELETUNG	1,37
6	018	13	K	SP. JELETUNG - PASIR PANJANG	9,51
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>26,25</b>

Informasi Umum Pulau Lingga dan Pulau Karimun:

Pemerintah Kabupaten Lingga didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341) dengan luas wilayah 45.456,7162 Km<sup>2</sup> (luas daratan 2.117,72 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 43.338,9962 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 88.591 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Lingga terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 s.d 10 Tahun 2011 Kabupaten Lingga terdiri dari 9 kecamatan dengan 75 desa dan 7 diantaranya berstatus kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Karimun didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang - Undang Nomor : 53 tahun 1999 dengan luas wilayah 7.984 Km<sup>2</sup> (luas daratan 1.524 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 225.298 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun terdiri atas 44 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Kabupaten Karimun terdiri atas 12 kecamatan dengan 42 desa dan 29 diantaranya berstatus kelurahan.



Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Lingga dan Pulau Karimun:

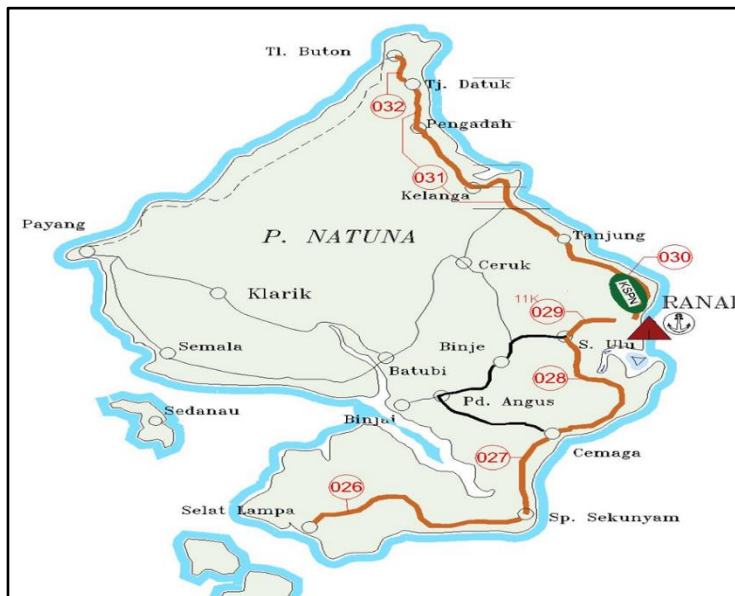
a. Paket Pekerjaan PPK 1.3 terdiri dari:

- Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur
- Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang
- Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel Roro
- Rehabilitasi Jembatan Kp.Pahang Cs

#### 4. Pulau Natuna dan Pulau Anambas

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada Pulau Natuna dan Pulau Anambas penanganan dilakukan oleh PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dengan total panjang ruas 79,79 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan BPJN Kepulauan Riau.

Peta Ruas Jalan Pulau Natuna



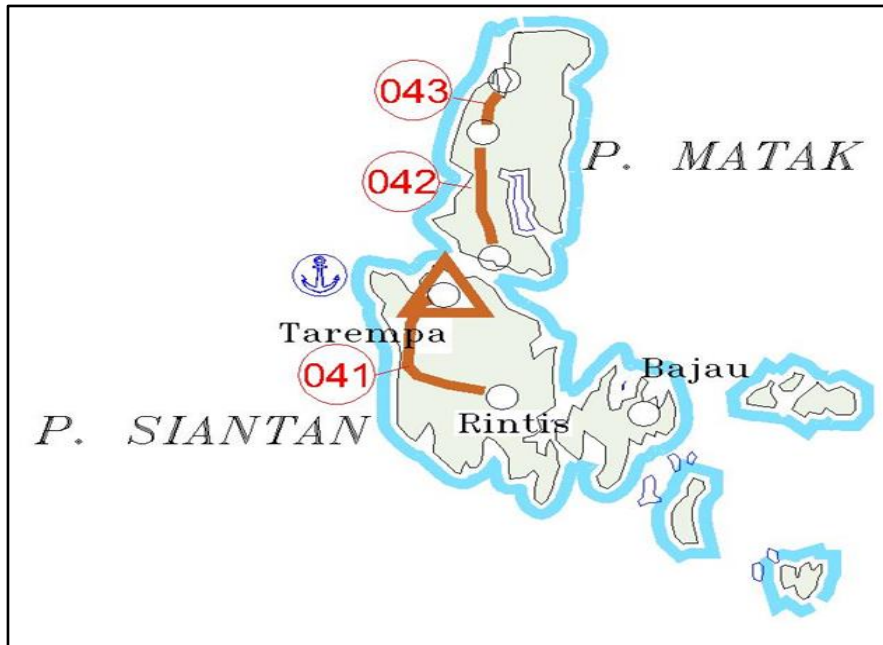
Ruas Jalan Penanganan PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	026	12	K	SELAT LAMPA - SP. SEKUNYAM	14,18
2	027	13	K	SP. SEKUNYAM - DESA CEMAGA	23,65
3	028	14	K	DESA CEMAGA - SEI ULU	21,80
4	029	11	K	SEI ULU - RANAI	9,39
5	030	11	K	RANAI - SP. TANJUNG	12,43
6	031			SP. TANJUNG - TANJUNG DATUK	34,67
7	032			TANJUNG DATUK - TELUK BUTON	1,76
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>48,86</b>





Peta Ruas Jalan Pulau Anambas



Ruas Jalan Penaganan PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	039		TAREMPA - SP. RINTIS	9,50
2	040		PENINTING - PAYALAMAN	18,00
3	041		PAYALAMAN - PEL. RORO	3,43
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>				<b>30,93</b>

Informasi Umum Pulau Natuna dan Pulau Anambas:

Pemerintah Kabupaten Natuna didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang - Undang Nomor: 53 tahun 1999 dengan luas wilayah 264.198,37 Km<sup>2</sup> (luas daratan 2.001,30 Km<sup>2</sup> dan lautan 262.197,07 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 74.520 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2011. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan dengan 73 desa dan 6 diantaranya berstatus kelurahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk melalui Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008, terdiri dari 7 Kecamatan dan terdiri atas 283 pulau. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah 46.664 Km<sup>2</sup> (luas daratan 634,37 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 46.029,27 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 40.414 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 33 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pembentukan Badan pengelolaan perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas. 33 SKPD tersebut terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, 2 (dua) sekretariat, Inspektorat, 6 (enam) Badan, 14 (empat belas) Dinas, 3 (tiga) Kantor, dan 7 (tujuh) Kecamatan.



Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Natuna dan Anambas:

a. Paket Pekerjaan PPK 1.4 terdiri dari:

- Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton
- Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro
- Preservasi Jalan Tarempa - Rintis
- Rehabilitasi Jembatan Kerani Cs
- Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik
- Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs
- Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)

#### 1.4.2 Permasalahan Utama (strategic issues) dan tantangan yang dihadapi

Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*). Dalam konteks etika kebijakan tersebut, penyelenggaraan jalan harus mampu memberikan akses bagi semua penduduk Indonesia. Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya akses jalan ke semua wilayah sesuai dengan kewenangan, berdasarkan SPM (pasal 37 (1) Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2004) yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata - rata. Termasuk dalam aspek aksesibilitas dan keselamatan juga harus dijamin ketersediaan/ pelayanannya bagi kaum disabilitas (berkebutuhan khusus) serta responsif terhadap isu gender.

Sektor jalan, mengalami perubahan regulasi dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan (pengganti Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 1980) yang memperkenalkan pembagian status jalan sebagai respons atas otonomi daerah, serta mereduksi peran Jasa Marga dalam pengelolaan jalan tol (serta menginisiasi pembentukan BPJT) yang membuka peluang bagi swasta untuk lebih banyak berperan dalam investasi jalan tol.

Harmonisasi regulasi antar sektor sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jalan dimana masih terdapat beberapa:

- a. Hambatan pengadaan tanah merupakan salah satu faktor penentu tercapainya target pembangunan/ pelebaran jalan/jalan tol (termasuk izin penggunaan kawasan hutan);
- b. Penetapan sejumlah pusat kegiatan (PKN, PKW, PKSN, termasuk simpul transportasi (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A) dalam RTRWN (PP 13/2017) serta dalam dokumen rencana induk setiap moda transportasi (Rencana Induk Perkeretaapian Nasional/RIPNas, Rencana Induk Pelabuhan Nasional/RIPN, Tatanan Kibandarudaraan Nasional/ TKN, Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/RIJLLAJ) mengharuskan adanya tambahan akses jalan nasional ke titik - titik strategis tersebut;



- c. Perubahan status jalan berkonsekuensi logis terhadap pengelolaan aset negara dan kewajiban penyediaan pendanaannya melalui APBN atau APBD, termasuk penggunaan DAK bidang jalan;
  - d. Upaya percepatan penyelesaian Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera perlu mendapatkan dukungan regulasi dan kebijakan dari sektor - sektor terkait, khususnya dalam pengadaan tanah (termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH, Izin Kolaborasi), pendanaan dan pembiayaan, serta regulasi terkait aspek teknis lainnya;
  - e. Munculnya usulan - usulan terkait dukungan sektor (K/L lain), termasuk arahan khusus melalui Direktif maupun kebijakan insidental lainnya, berakibat pada perubahan prioritas alokasi pendanaan penyelenggaraan jalan untuk mendukung program insidental tersebut. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktercapaian penanganan jalan/jembatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra, bahkan termasuk sulitnya untuk pencapaian target kemandapan jalan Nasional eksisting.
1. Permasalahan yang dihadapi
    - Adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran, menyebabkan pemotongan (Refocusing) realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya target penanganan;
    - Kondisi infrastruktur jalan yang belum cukup memadai di wilayah kerja BPJN Kepulauan Riau sesuai dengan Standart Jalan Nasional;
    - Belum adanya pembangunan jalan lingkar dilokasi penanganan kawasan Perbatasan;
    - Tidak tertata dan terarahnya pengaturan lokasi industri yang semata hanya mengikuti/mendekati lokasi dimana tersedia fasilitas jalan utama, yang berakibat menumpuknya volume lalu lintas;
    - Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak;
    - Belum optimalnya pelayanan drainase skala perkotaan, ditandai masih adanya titik-titik banjir;
    - Belum terbangunnya infrastruktur jalan yang diprioritaskan untuk konektivitas ke kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, pertanian, dan perikanan.
  2. Tantangan yang dihadapi
    - Mewujudkan program pemerintah yang tertuang dalam nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran khususnya dikawasan perbatasan.;
    - Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 19 Pulau Terdepan di Provinsi Kepulauan Riau (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    - Mewujudkan kebutuhan struktur ruang jalan yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau;
    - Mengintegritaskan infrastruktur jalan pusat-pusat kegiatan pemukiman , industri dan perdagangan jasa sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;



- Jarak tempuh antar Kabupaten/Kota dan jarak tempuh antar pulau juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana darat laut untuk mempercepat waktu tempuh;
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan pada kawasan strategis yang berbatasan dengan negara lain;
- Mendukung Rencana Pembangunan Pelabuhan Utama Natuna / Pelabuhan Internasional di Teluk Buton (Cargo, Logistik Industri Migas) dan mendukung akses pertahanan keamanan nasional.





**BAB II**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2024, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha - usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2024.

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut :

*“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada bagian ini disampaikan tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.





Tujuan dan sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024 secara terstruktur dirumuskan dalam peta strategi (strategy map) mengikuti konsep Balanced Score Card (BSC), dan dikelompokkan ke dalam 4 perspektif, yakni :

1. Stakeholder Perspectives (SP), mewakili perspektif kepentingan rakyat Indonesia, yang memandatkan pelaksanaan pemerintahan (termasuk penyelenggaraan jalan) untuk periode 2020-2024 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih (berikut dengan jajaran Kabinetnya);
2. Customer Perspectives (CP), mewakili perspektif kepentingan pengguna (customer) jalan yang dilindungi haknya untuk mendapatkan layanan jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Internal Business Perspectives (IBP), mewakili perspektif internal Ditjen Bina Marga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan) dengan sebaik - baiknya, secara efektif dan efisien sesuai kaidah peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Learning and Growth Perspectives (LGP), mewakili perspektif Ditjen Bina Marga dalam menyediakan sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, sarana prasarana serta informasi pendukung) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan.

Oleh karena itu, tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan Nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut :

1. Mewujudkan konektivitas jalan Nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan Nasional;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Masing - masing tujuan Ditjen Bina Marga tersebut di atas, mewakili setiap perspektif dalam *Balanced Score Card* (BSC), yakni :

1. Mewakili tujuan dari *stakeholders perspectives* (pemberi mandat) yang dalam periode RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan Nasional (agenda Pembangunan Nasional PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang diturunkan dalam PP2 (Infrastruktur ekonomi) dengan sasaran utama yaitu meningkatnya konektivitas wilayah);
2. Mewakili tujuan dari *customer perspectives*, yakni pengguna jalan Nasional dapat memperoleh kinerja pelayanan jalan Nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan Nasional;
3. Mewakili tujuan pada level Internal *Business Perspectives*, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga (sesuai Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2004 maupun Peraturan Menteri PUPR Nomor : 03/PRT/M/2019) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan, yang implementasinya dilaksanakan oleh setiap Unit Eselon II Pusat maupun UPT/Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga;



4. Mewakili tujuan pada level *Learning and Growth Perspectives*, sebagai upaya dari Ditjen Bina Marga untuk memenuhi modal dasar organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

### 2.1.1 Tujuan Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau memiliki tujuan yang merupakan turunan dari tujuan Ditjen Bina Marga yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam Renstra tahun 2020-2024, yaitu:

1. Mewujudkan Program Infrastruktur Konektivitas jalan Nasional dengan sasaran utama yaitu meningkatkannya konektivitas wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
2. Meningkatkan aksesibilitas jalan, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional untuk memperoleh kinerja pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh;
3. Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur jalan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Infrastruktur jalan yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya dalam memenuhi Program Program Penyelenggaraan Jalan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dan Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian tujuan program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau dalam pelaksanaannya diukur dengan menggunakan Indikator kinerja yang yaitu :

1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional;
2. Rating Kondisi Jalan Nasional;
3. Rating Keselamatan Jalan Nasional;
4. Tingkat Dukungan Manajemen.

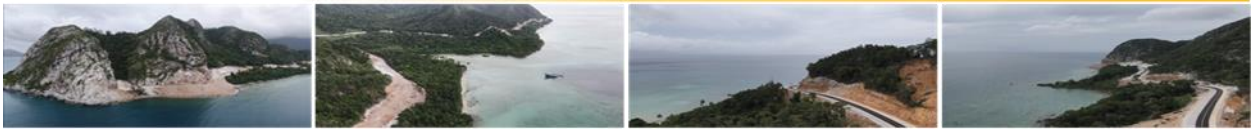
Mendukung terlaksananya tujuan program infrastruktur dalam menyelenggarakan jalan Nasional pada periode tahun 2020 untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan.

### 2.1.2 Sasaran Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

Sasaran program yang dicapai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melalui kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan pada periode tahun 2020 untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional menggunakan indikator kinerja:
  - Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional dari kegiatan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pelebaran Menambah Lajur;





- Rating Kondisi Jalan Nasional dari kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan, Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan, Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan, Preservasi Rutin Jembatan, Preservasi Jembatan dan Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik;
  - Rating Keselamatan Jalan Nasional dari kegiatan Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan.
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
- Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dari kegiatan Layanan Sarana Internal, Layanan Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Perkantoran.

Sasaran Program Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau yang diharapkan dicapai dalam memenuhi Program Penyelenggaraan Jalan pada periode tahun 2020 untuk periode Renstra Tahun 2020-2024.

### 2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau memiliki Arah Kebijakan yang merupakan turunan dari Arah Kebijakan Ditjen Bina Marga yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam Renstra tahun 2020-2024 berdasarkan IKK, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional sesuai dengan program penyelenggaraan Jalan yang ditargetkan di tahun 2020;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan terhadap infrastruktur dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagai bahan perbaikan kedepannya;
3. Mewujudkan pencapaian terhadap kinerja pembangunan jalan dan jembatan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan dan kepatuhan internal dalam penyelenggaraan jalan.

Mendukung terlaksananya arah kebijakan dalam menyelenggarakan jalan Nasional pada periode tahun 2020 untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melakukan strategi dalam kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan:

1. Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan nasional dalam rangka mencapai kondisi jalan sesuai target rating kondisi dan target rating jalan berkeselamatan;
2. Melakukan Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas jalan nasional (jalan strategis pada lintas utama pulau, kawasan prioritas, simpul transportasi, dan jalan bebas hambatan);
3. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional;



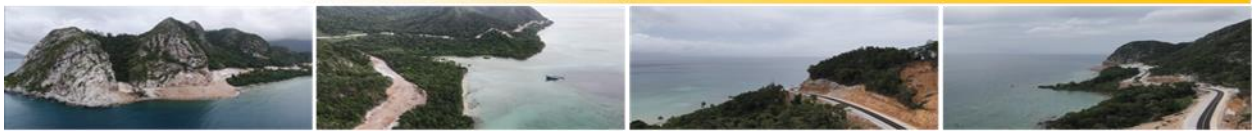
4. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional bidang jalan dan jembatan, keselamatan jalan, layanan teknik, dan pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem informasi manajemen jalan dan jembatan.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja dengan memenuhi kriteria: a. Spesifik; b. Dapat terukur; c. Dapat dicapai; d. Berjangka waktu tertentu; dan e. Dapat dipantau dan dikumpulkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja bertujuan Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Melalui perjanjian kinerja, menyajikan informasi meliputi sasaran strategis Kementerian, indikator kinerja sasaran strategis, target dan anggaran, serta tanda tangan para pihak yang berjanji; perjanjian kinerja unit organisasi menyajikan informasi meliputi sasaran program, indikator kinerja program, target dan anggaran, serta tanda tangan para pihak yang berjanji; dan perjanjian kinerja unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja menyajikan informasi meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan anggaran, serta tanda tangan para pihak yang berjanji.

Perjanjian Kinerja tahun 2020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau ditetapkan dan disampaikan tepat waktu pada Januari 2020 (dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat dimana Perjanjian kinerja Kementerian ditetapkan Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian disahkan. Perjanjian kinerja unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja disepakati oleh Pimpinan entitas yang bersangkutan dengan Pimpinan entitas di atasnya dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disahkan.



Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Revisi / Rekapitulasi Output BPJN Kepulauan Riau TA 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2020
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas</b>	<b>83,30 %</b>	<b>83,00 %</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %
	<b>Output</b>		
	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	5,00 Km	1,00 Km
	Panjang Pembangunan Jalan	<b>23,08 Km</b>	<b>3,75 Km</b>
	a. Pembangunan Jalan	16,94 Km	- Km
	b. Non Pembangunan Jalan:	6,14 Km	3,75 Km
	Panjang Pembangunan Jembatan	327,80 M	19,11 M
	a. Pembangunan Jembatan	241,00 M	19,11 M
	- Duplikasi Jembatan	86,80 M	- M
	<b>IKSP 2 Tingkat Rating Kondisi</b>	<b>2,65 %</b>	<b>2,69 %</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %
	<b>Output</b>		
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	560,03 Km	554,07 Km
	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	<b>29,47 Km</b>	<b>21,65 Km</b>
	a. Rutin Preventif	0,70 Km	3,10 Km
	b. Rekonstruksi Jalan	10,10 Km	3,78 Km
	c. Rehabilitasi Minor Jalan	21,07 Km	12,31 Km
	d. Rehabilitasi Mayor Jalan	- Km	0,95 Km
	e. Penanganan Longsoran	500,00 M	0,45 Km
	f. Penanganan Drainase dan Bangunan Pelengkap	1.500,00 M	- M
	g. Penanganan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan	- Km	1,98 Km
	Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	- Km	34,36 Km
	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	6.189,50 M	5.642,90 M
	Panjang Preservasi Jembatan	756,60 M	475,20 M
	a. Pemeliharaan Berkala Jembatan	756,60 M	- M
	b. Rehabilitasi Jembatan	- M	475,20 M
	Panjang Penggantian Jembatan	41,20 M	- M
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1,00 Layan an	1,00 Layan an
	<b>IKSP 3 Rating Keselamatan</b>	<b>4,40 %</b>	<b>4,30 %</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %	
<b>Output</b>			
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	513,73 Km	465,14 Km	
Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	<b>2.028,77 Km</b>	<b>22,17 Km</b>	
a. Rutin Preventif	10,10 Km	3,10 Km	
b. Rekonstruksi Jalan	18,67 Km	3,78 Km	
c. Rehabilitasi Minor Jalan	- Km	11,91 Km	
d. Rehabilitasi Mayor Jalan	500,00 M	0,95 Km	
e. Penanganan Longsoran	1.500,00 M	0,45 Km	
g. Penanganan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan	- Km	1,98 Km	
Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	- Km	18,60 Km	
Panjang Preservasi Rutin Jembatan	6.189,50 M	5.642,90 M	
Panjang Preservasi Jembatan	756,60 M	475,20 M	
a. Pemeliharaan Berkala Jembatan	756,60 M	- M	
b. Rehabilitasi Jembatan	- M	475,20 M	
Panjang Penggantian Jembatan	41,20 M	- M	



Wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau yang semula berada di BPJN IV Jambi terdiri dari 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berubah menjadi 1 (satu) provinsi yaitu Provinsi Jambi, sementara untuk wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau berada dibawah BPJN Kepulauan Riau. Hal ini sesuai Permen PUPR nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau dalam membuat Perjanjian Kinerja berdasarkan Permen PUPR nomor 16/PRT/M/2020 dengan wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau semula Perjanjian Kinerja Awal dan tidak terdapat Perjanjian Kinerja Revisi dikarenakan baru terbentuknya BPJN Kepulauan Riau di tahun 2020 yang melanjutkan Perjanjian Kinerja dari BPJN IV Jambi. Perubahan Perjanjian Kinerja terjadi perubahan pada Satker yang berada diwilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau disebabkan adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran, menyebabkan pemotongan (Refocusing) realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19. Terhadap kebijakan tersebut menyebabkan perubahan berkurangnya target penanganan dan relokasi anggaran tahun 2020 pada Perjanjian Kinerja disetiap Satker yang ada diwilayah Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau.

## 2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran sasaran strategis dilakukan melalui survei tersendiri dan pengukuran berbasis outcome (*outcome based*), pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator kinerja (*output*) pada Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SiPP) dan e-Monitoring Kementerian PUPR dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Metode pengukuran untuk mengevaluasi hasil kinerja diuraikan pada tabel metode pengukuran untuk sasaran program dan pada tabel metode pengukuran untuk sasaran kegiatan.

Tabel Metode Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Program

No.	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Melalui perhitungan kemantapan kondisi jalan. Melalui perhitungan waktu tempuh yang merupakan fungsi dari kondisi IRI, Lebar Perkerasan dan Volume Capacity Ratio (VCR)	Hasil Survey





Tabel Metode Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rutin	e-Monitoring
2.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Rekonstruksi dan Rehabilitasi	e-Monitoring
3.	Preservasi Rutin Jembatan	Total Panjang Jembatan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rutin	e-Monitoring
4.	Preservasi Jembatan	Total Panjang Jembatan yang mendapatkan Penanganan Preservasi	e-Monitoring
5.	Pembangunan Jalan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pembangunan	e-Monitoring
6.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pelebaran Menambah Lajur	e-Monitoring
7.	Pembangunan Jembatan	Total Panjang Jembatan yang mendapatkan Penanganan Pembangunan	e-Monitoring
8.	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	Total Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	e-Monitoring
9.	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Total Panjang Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan yang mendapatkan Penanganan	e-Monitoring
10.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Total Layanan Sarana dan Prasarana Internal	e-Monitoring
11.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan Dukungan Manajemen Satker	e-Monitoring
12.	Layanan Perkantoran	Total Layanan Perkantoran	e-Monitoring

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) - Waktu Tempuh

Konektivitas' pada Perencanaan Jangka Menengah 2020-2024 didefinisikan sebagai waktu tempuh per 100 km. Rata-rata waktu tempuh di Indonesia saat ini adalah 2,4-2,5 jam/100 km, yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, yang memiliki waktu tempuh rata-rata dibawah 2,0 jam/100 km. Waktu tempuh yang tinggi dapat berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global. Diharapkan pada tahun 2024 dapat diwujudkan dominasi jaringan jalan nasional yang memiliki waktu tempuh dibawah 1,9 jam/100 km (dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Waktu Tempuh} = \frac{100}{S} \text{ (jam per 100 km)}$$

S: Kecepatan rata-rata, (km/jam).



Pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain.

#### Indikator Kinerja Program - 1 (IKP - 1) (Aksesibilitas)

Aksesibilitas didefinisikan sebagai persentase jumlah simpul/kawasan/wilayah strategis yang sudah terhubung oleh jalan nasional. Sejumlah simpul/kawasan/wilayah strategis tersebut meliputi PKN, PKW, PKSN, KSPN, KEK, KI, PU, PP, Bandar udara. Persentase jumlah pusat kegiatan dan simpul transportasi yang terakses langsung dengan jalan nasional. Dalam hal ini pusat kegiatan atau simpul transportasi didefinisikan telah terakses bila jalan nasional telah terhubung sampai dengan pintu masuk (gate) dari masing-masing pusat kegiatan. Khusus untuk Pelabuhan, Bandara, Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimana jalan akses berada dalam kewenangan operator/pengembang (developer), maka akses jalan nasional hanya sampai pada titik awal jalan yang dikelola oleh operator/developer.

$$TI = \frac{SN_a}{\sum SN} \times 100 (\%)$$

Dimana:

- TI : Tingkat Aksesibilitas (%)
- $SN_a$  : Jumlah Pusat Kegiatan yang telah terakses Jalan Nasional
- $\sum SN$  : Total jumlah Pusat Kegiatan

#### Indikator Kinerja Program – 2 (IKP – 2) (Rating Kondisi Jalan)

IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:

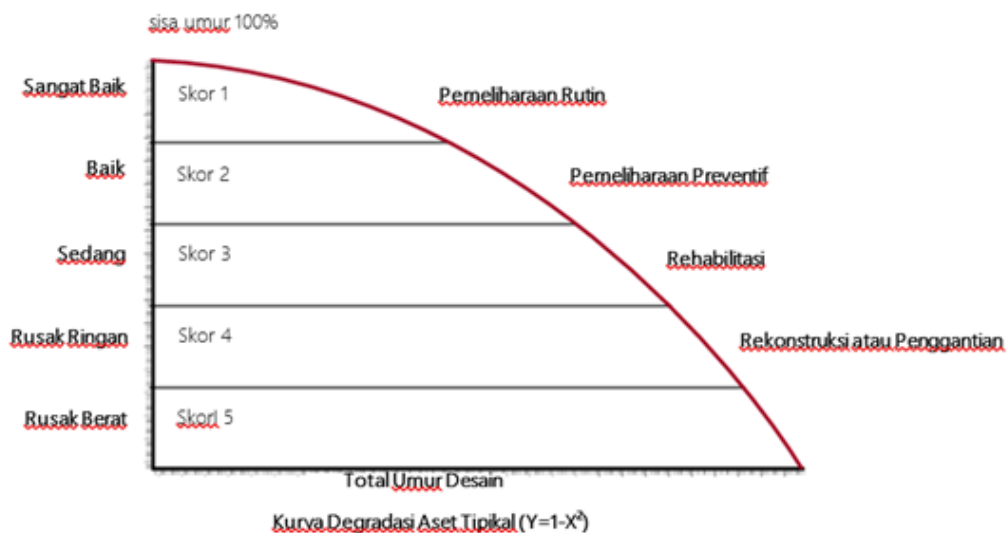
- Kekasaran / *Roughness* (nilai international roughness index, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (Pavement Strength)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

#### Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
<u>Kekasaran (IRI)</u>	60%
<u>Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)</u>	10%
<u>Sisa Umur Perkerasan (RSL)</u>	15%
<u>Efektivitas Drainase</u>	15%



Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau baru, sedangkan skor 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat. Setiap komponen juga memiliki skor individu yang berupa bilangan bulat dalam rentang 1 sampai 5. Setiap skor kemudian dikalikan dengan faktor pembobot yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai IKP Komponen Final. Namun bila ada setidaknya satu dari keempat IKP Komponen tersebut memperoleh skor 5, maka nilai IKP Rating Kondisi Jalan Final secara otomatis adalah 5. Nilai Final ini mengindikasikan perlu adanya penanganan/perbaikan pada segmen tersebut untuk mencapai tingkat layanan yang disyaratkan.



Contoh Penggunaan KPI Kondisi Jalan

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa IKU Kondisi Jalan merupakan rerata terbobot dari empat komponen KPI individu yaitu kekasaran (IRI), kondisi permukaan perkerasan (PCI), sisa umur perkerasan (*residual pavement strength*), dan efektivitas drainase (drainase permukaan dan bawah permukaan). Pada bab ini, masing-masing komponen IKU individu akan diulas secara terperinci.

Perlu dipahami bahwa data yang diambil dan digunakan adalah dalam penilaian indikator ini adalah data segmen per 100m pada setiap lajur, sesuai yang tersedia di database Subdit ADPS. Nantinya masing-masing segmen memiliki 4 nilai KPI individu, dan KPI final sebagai rerata terbobot dari 4 nilai KPI individu tersebut.

IKU Kondisi Jalan merupakan rerata terbobot dari empat komponen KPI individu yaitu :

- Kekasaran (IRI)
- Kondisi permukaan perkerasan (PCI)
- Sisa umur perkerasan (*residual pavement strength*)
- Efektivitas drainase (drainase permukaan dan bawah permukaan).

KPI Individu – Kekasaran / Roughness (IRI)



Dalam menilai IKU Kekasaran/ *Roughness KPI* diperlukan data IRI untuk setiap tipe perkerasan per 100m yang dikelompokkan dalam 2 tipe, yaitu berpenutup dan tanpa penutup. **Error! Reference source not found.** berikut menunjukkan pengelompokan tipe perkerasan berdasarkan material perkerasannya.

Kode Perkerasan	Material Perkerasan	Tipe Perkerasan	Kode Perkerasan	Material Perkerasan	Tipe Perkerasan
1	Tanah	Tanpa Penutup	11	Lataston (HRS)	Berpenutup
2	Japat (AWCAS) / Kerikil	Tanpa Penutup	12	HRSSA	Berpenutup
3	Telford / Macadam Terbuka	Berpenutup	13	Slurry Seal	Berpenutup
4	Burtu	Berpenutup	14	Macro Seal	Berpenutup
5	Burda	Berpenutup	15	Micro Asbuton	Berpenutup
6	Penetrasi Macadam 1 Lapis	Berpenutup	16	DGEM	Berpenutup
7	Penetrasi Macadam 2 Lapis	Berpenutup	17	SMA	Berpenutup
8	Lasbutag (Butas)	Berpenutup	18	DMA	Berpenutup
9	Aspal Beton (AC)	Berpenutup	19	HSWC	Berpenutup
10	Latasbum (NACAS)	Berpenutup	21	Beton	Berpenutup

Pada tabel di bawah ini menunjukkan sistem penilaian IKU Kekasaran (IRI) dengan Skala Penilaian KPI *Roughness*.

Tabel Skala Penilaian KPI *Roughness*

Skor KPI	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
1	Sangat Baik	$IRI < 2$	$IRI < 4$
2	Baik	$2 \leq IRI < 4$	$4 \leq IRI < 9$
3	Sedang	$4 \leq IRI < 6$	$9 \leq IRI < 13$
4	Rusak Ringan	$6 \leq IRI < 8$	$13 \leq IRI < 14$
5	Rusak Berat	$IRI \geq 8$	$IRI \geq 14$

IKU Individu Kekasaran adalah **bilangan bulat** dalam skala 1 - 5.





### KPI Individu - Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition Index*

KPI individu Kondisi Permukaan Jalan dihitung berdasarkan data PCI yang tersedia. Tabel di bawah ini menunjukkan sistem skala penilaian KPI untuk PCI.

Tabel Skala Penilaian KPI PCI

IKU Kondisi Permukaan Jalan	Deskripsi	Rentang PCI <sub>final</sub>
1	Sangat Baik	PCI > 85
2	Baik	70 < PCI ≤ 85
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition

KPI Individu PCI adalah **bilangan bulat** dalam skala 1 - 5.

### KPI Individu – Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Structural Life*

Dalam menghitung Sisa Umur Perkerasan (RSL) diperlukan data lendutan/defleksi yang menggambarkan kondisi struktural suatu segmen jalan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung RSL:

1. Menghitung Nilai Struktural Perkerasan / *Structural Number of Pavement* (SNP)

$$SNP = \frac{167}{d_0^{0.57}} \quad \text{Persamaan 3}$$

dimana:

$SNP$  = Nilai Struktural Perkerasan

$d_0$  = defleksi sensor  $d_0$  FWD yang sudah dinormalisasi ke beban 50 kN (microns)

2. Menghitung Sisa Kapasitas Struktural / *Remaining Structural Capacity* (CAP)

$$CAP = \left\{ \frac{[SNP - (K_i * 1.05)]}{[K_g * 2.135]} \right\}^{K_c * 0.175} \quad \text{Persamaan 4}$$

dimana:

$CAP$  = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)

$SNP$  = Nilai Struktural Perkerasan

$K_i, K_g, K_c$

= faktor kalibrasi berdasarkan tipe perkerasan (sesuai dengan Error! Reference source not found.)  
(aspal full depth digunakan sebagai default)



Tabel Faktor Kalibrasi K

Jenis Perkerasan	$K_i$	$K_g$	$K_c$
Aspal Tipis Tak Terikat	1.650	0.925	2.100
Aspal Tipis Stabilised	1.700	0.700	2.800
Aspal Full Depth	0.000	1.930	0.610

Sumber: KIAT IRAMS-DC IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

### 3. Menghitung Sisa Umur Perkerasan / Remaining Structural Life (RSL)

$$RSL = \frac{LN \left( \frac{CAP+r+MESA*(1+r)}{MESA} \right)}{LN (1+r)} - 1 \quad \text{Persamaan 5}$$

dimana :

$RSL$  = Sisa Umur Perkerasan (dalam tahun)

$CAP$  = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)

$SNP$  = Nilai Stuktural Perkerasan

$r$  = Laju pertumbuhan lalu lintas

Apabila data lendutan/defleksi tidak tersedia, nilai RSL dapat diperoleh dengan pendekatan terhadap nilai IRI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{\ln \frac{IRI-1.52}{6.48}}{-0.074} \quad \text{Persamaan 6}$$

jika  $IRI = 0$  atau tidak ada data, maka diambil nilai  $RSL = 9$  (tahun)

jika  $IRI < 2$ , maka diambil nilai  $RSL = 35$  (tahun)

Bila nilai  $RSL_{IRI}$  kurang dari 0, maka diambil nilai  $RSL = 0$  sesuai persamaan berikut:

$$RSL_{approx} = \max (RSL_{IRI} , 0) \quad \text{Persamaan 7}$$

Nilai  $RSL_{final}$  adalah nilai minimum antara  $RSL_{approx}$  atau 50 sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{final} = \min (RSL_{approx} , 50) \quad \text{Persamaan 8}$$

Tabel Skala Penilaian KPI RSL

Skor KPI	Deskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	$RSL > 15$
2	Baik	$10 < RSL \leq 15$
3	Sedang	$5 < RSL \leq 10$
4	Rusak Ringan	$1 < RSL \leq 5$
5	Rusak Berat	$RSL \leq 1$

Nilai KPI Individu RSL adalah bilangan bulat dalam skala 1 - 5



### KPI Individu - Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness*

Terdapat 2 sub-komponen penting dalam menentukan nilai KPI Efektivitas Drainase, yaitu kondisi drainase permukaan dan kondisi drainase subsoil. Nilai KPI Efektivitas Drainase final adalah rata-rata terbobot dari kedua sub-komponen tersebut. Efektivitas drainase permukaan mengindikasikan seberapa baik air mengalir dari permukaan jalan. Nilai KPI efektivitas drainase permukaan merupakan fungsi dari permukaan perkerasan dan kondisi bahu jalan. Faktor penunjang lainnya adalah *terrain*, dimana daerah berbukit atau pegunungan dapat meningkatkan nilai KPI daripada daerah datar.

Efektivitas drainase subsoil mengindikasikan seberapa baik air mengalir dari perkerasan jalan dan sekelilingnya (termasuk *cross road drainage*). Nilai KPI efektivitas drainase permukaan merupakan fungsi dari a) persyaratan drainase subsoil; b) desain, konstruksi, dan pemeliharaan drainase subsoil; c) kondisi infrastruktur drainase subsoil. Karena keterbatasan data yang tersedia saat ini, digunakan sistem penilaian KPI Efektivitas Drainase yang sederhana untuk jangka pendek. Seiring dengan berjalannya waktu dan ketersediaan data yang makin lengkap, akan digunakan sistem penilaian KPI Efektivitas Drainase jangka panjang.

Dalam mengolah KPI Efektivitas Drainase Permukaan digunakan pendekatan menggunakan data kondisi permukaan perkerasan (PCI) dan data *terrain* per 100m.

#### Efektifitas Drainase Permukaan

Tabel di bawah ini menunjukkan sistem penilaian KPI untuk Efektivitas Drainase Permukaan.

Skor KPI	Deskripsi	Kombinasi PCI dan <i>Terrain</i>		Kombinasi PCI dan <i>Terrain</i>	
		Datar		Berbukit/Pegunungan	
		Rentang PCI <sub>raw</sub>	<i>Terrain</i>	Rentang PCI <sub>raw</sub>	<i>Terrain</i>
1	Sangat Baik	PCI > 85	Datar	PCI > 70	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	70 < PCI ≤ 85	Datar	55 < PCI ≤ 70	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	Datar	25 < PCI ≤ 55	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	Datar	PCI ≤ 25	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	Datar		

#### Efektifitas Drainase Subsoil

Dalam mengolah KPI Efektivitas Drainase Subsoil digunakan pendekatan menggunakan data ketersediaan infrastruktur drainase dan data *terrain* per 100m.

Tabel di bawah ini menunjukkan sistem penilaian KPI untuk Efektivitas Drainase Subsoil.

Skor KPI	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	<i>Terrain</i>
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak / Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	Ya	Datar
5	Rusak Berat	Tidak / Tidak ada data	Datar



Nilai KPI Efektivitas Drainase final adalah rata-rata terbobot dari kedua komponen tersebut di atas dengan rasio pembobotan 80% drainase permukaan dan 20% drainase subsoil. Apabila salah satu dari kedua komponen mendapatkan skor 5, maka nilai KPI Efektivitas Drainase final otomatis adalah 5.

#### KPI Final

KPI final suatu segmen merupakan rata-rata terbobot dari keempat komponen tersebut di atas dengan faktor pembobot sesuai dengan **Error! Reference source not found.** Dalam menentukan faktor pembobot untuk masing-masing komponen harus selaras dengan prioritas Bina Marga dan sesuai dengan proporsi kepentingannya. Faktor pembobotan ditetapkan oleh protokol Direktorat Jenderal Bina Marga yang akan disepakati lebih lanjut. Pembobotan dapat disesuaikan di level Nasional, Balai, Provinsi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%

Jika salah satu dari komponen memiliki skor 5, maka skor keseluruhan pada segmen tersebut otomatis adalah 5.

#### Indikator Kinerja Program – 3 (IKP – 3) (Tingkat Keselamatan Jalan)

Indikator Kinerja Program – 3 (Tingkat Keselamatan Jalan) terdiri dari nilai komposit yang terbobot dari 2 komponen individu yakni IKP Komponen Kecelakaan dan IKP Komponen Blackspot. IKP Komponen Kecelakaan diperoleh dari rasio angka kecelakaan terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu (provinsi/Balai/Pulau/Nasional). Sedangkan IKP Komponen Blackspot diperoleh dari rasio jumlah blackspot terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu.

#### IKP Komponen Kecelakaan

$$IKP_{kecelakaan} = \frac{\text{Indeks Kecelakaan}}{60} * 5$$

jika Indeks Kecelakaan  $\leq 15$ , maka diambil nilai  $KPI_{kecelakaan} = 1$

jika Indeks Kecelakaan  $> 60$ , maka diambil nilai  $KPI_{kecelakaan} = 5$

Dimana

$$\text{Indeks Kecelakaan} = \frac{\text{Total kecelakaan terbobot}}{\text{Populasi (juta)}}$$





IKP Komponen Blackspot

$$IKP_{blackspot} = \frac{Indeks\ Blackspot}{8} * 5$$

*jika Indeks Blackspot  $\leq 2$ , maka diambil nilai  $KPI_{blackspot} = 1$*

*jika Indeks Blackspot  $> 8$ , maka diambil nilai  $KPI_{blackspot} = 5$*

Dimana

$$Indeks\ Blackspot = \frac{Total\ blackspot}{Populasi\ (juta)}$$

IKP Tingkat Keselamatan Final dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$IKP\ Kecelakaan : IKP\ Blackspot = 70\% : 30\%$$



## 2.4 Target Tahun ini Menurut Rencana Strategis

Target tahun 2020 pada Rencana Strategis (Renstra) dimana seluruh target dari sasaran program dengan indikator kinerja/output kegiatan tahun 2020 dijabarkan di dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau 2020-2024. Berdasarkan Renstra tahun 2020 target sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Target Sasaran Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Jalan Nasional	IKP.1 - Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (Persentase PKN, PKW, PKS, dan simpul transportasi nasional yg telah diakses jalan nasional)	%	83,00
		IKP.2 - Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai rating terhadap indikator IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan)	-	2,69
		IKP.3 - Tingkat Rating Keselamatan Jalan Nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi serta jumlah titik blackspot per populasi)	-	4,30

Pengukuran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional berdasarkan sasaran program tahun 2020 pada indikator kinerja dengan output kegiatan yaitu: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan, Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan, Preservasi Rutin Jembatan, Preservasi Jembatan, Pembangunan Jalan, Pelebaran Jalan Menambah Lajur, Pembangunan Jembatan dan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan. Adapun perbandingan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau tahun 2020.

Tabel Perbandingan Target Tahun 2020 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KETERANGAN
			RENSTRA	AWAL	REVISI AKHIR	
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	554,07	542,85	554,07	
2	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	21,65	33,16	22,57	
	- Rehabilitasi Minor Jalan	km		16,56	12,99	
	- Rehabilitasi Mayor Jalan	km		3,90	1,55	
	- Rekonstruksi Jalan	km		8,00	4,13	
	- Pemeliharaan Preventif Jalan	km		3,90	3,45	
	- Penanganan Longsor	km		0,80	0,45	
3	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	m	5.642,90	5.654,50	5.642,90	
4	Panjang Preservasi Jembatan	m	475,20	1.464,60	475,20	
	- Rehabilitasi Jembatan	m	475,20	1.464,60	475,20	
5	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	km	2,05	1,00	1,00	
6	Panjang Pembangunan Jalan	km	3,75	10,73	3,75	
	- Pembangunan Jalan	km	3,75	10,73	3,75	
7	Panjang Pembangunan Jembatan	m	19,11	82,00	19,11	
	- Pembangunan Jembatan	m	19,11	82,00	19,11	
8	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1,00	1,00	1,00	





# BAB III

BPJN KEPULAUAN RIAU

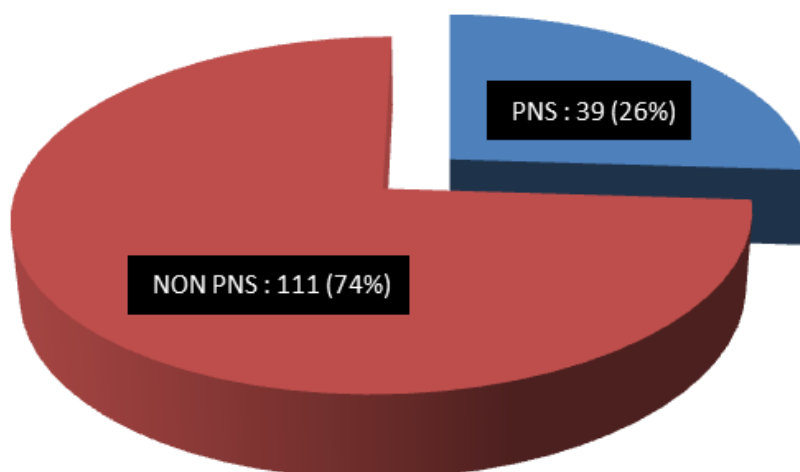


## BAB III KAPASITAS ORGANISASI

### 3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam suatu organisasi perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang keberlangsungan suatu organisasi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau didukung oleh sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan pangkat/golongan. Total keseluruhan jumlah pegawai di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau adalah 150 orang, yang terdiri dari 39 orang PNS dan 111 orang Non PNS.

Gambar 3.1 Grafik Status Kepegawaian Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau



Sumber daya manusia yang mendukung kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan usia. Adapun informasi rinci mengenai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau, sebagai berikut:

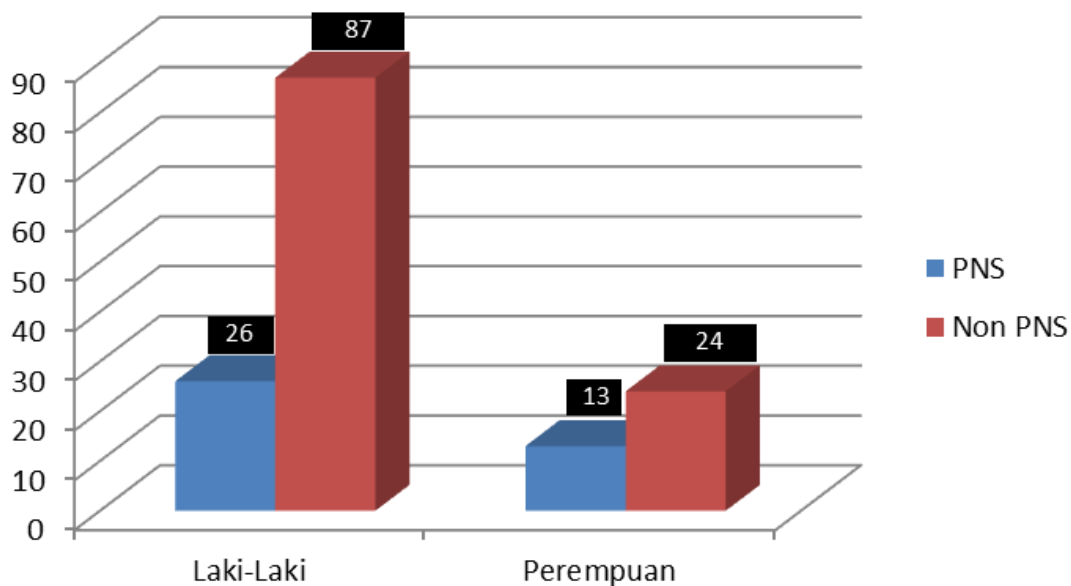
#### 3.1.1 Informasi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2020, PNS dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang sedangkan perempuan 13 orang dan Non PNS jenis Kelamin pria sebanyak 87 orang sedangkan perempuan 24 orang.





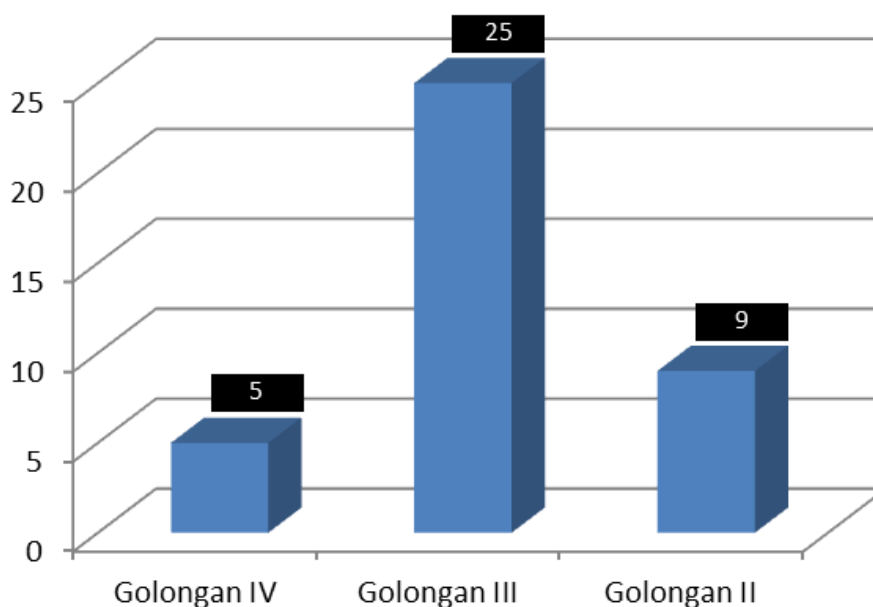
Gambar 3.1.1 Grafik Informasi SDM PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



### 3.1.2 Informasi Kepegawaian berdasarkan Golongan

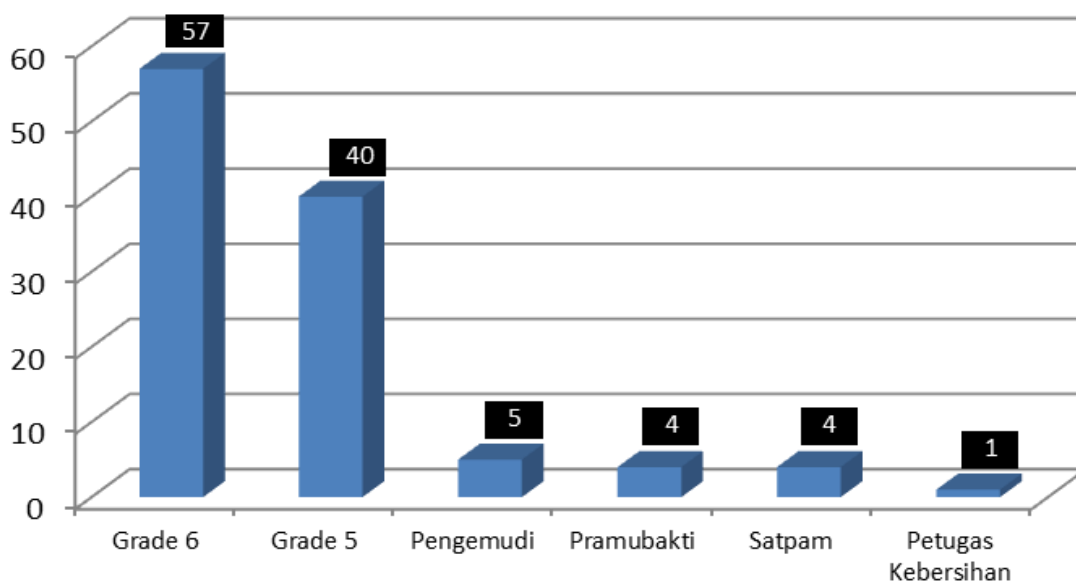
Berdasarkan Golongan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2020, PNS dengan Golongan IV (empat) sebanyak 5 orang, Golongan III (tiga) sebanyak 25 orang dan Golongan II (dua) sebanyak 9 orang. Sedangkan Non PNS dengan Grade 6 (enam) sebanyak 57 orang, Grade 5 (lima) sebanyak 40 orang, Pengemudi 5 orang, Pramubakti 4 orang, Satpam 4 orang dan Petugas Kebersihan 1 orang.

Gambar 3.1.2.1 Grafik Informasi SDM PNS Berdasarkan Golongan





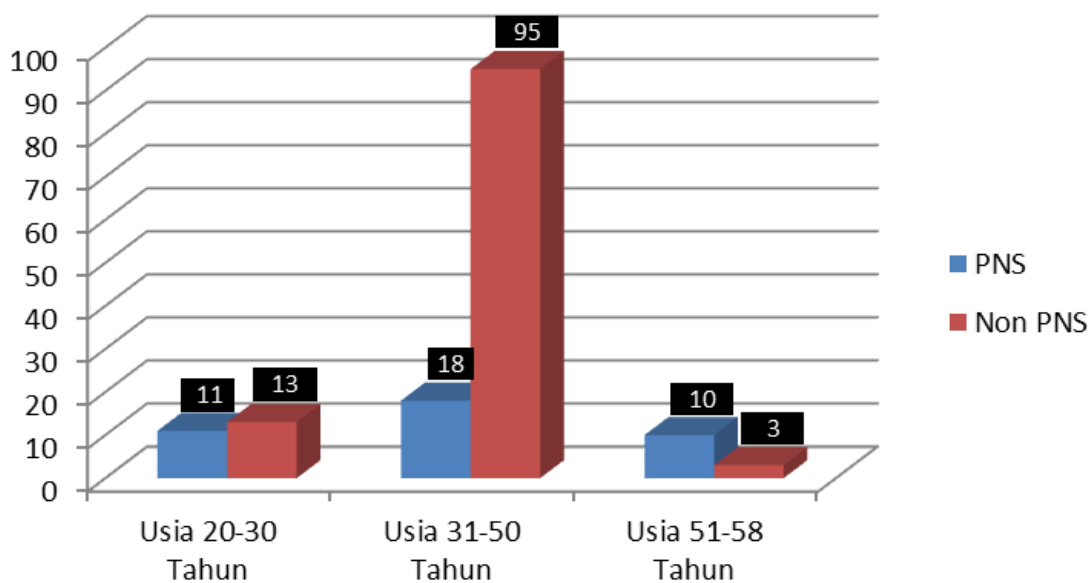
Gambar 3.1.2.2 Grafik Informasi SDM Non PNS Berdasarkan Grade



### 3.1.3 Informasi Kepegawaian berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2020, PNS dengan usia 51 - 58 tahun sebanyak 10 orang, dengan usia 31 - 50 tahun sebanyak 18 orang dan usia 20 - 30 sebanyak 11 orang. Sedangkan Non PNS dengan usia 51 - 58 tahun sebanyak 3 orang, dengan usia 31 - 50 tahun sebanyak 95 orang dan usia 20-30 sebanyak 13 orang.

Gambar 3.1.3 Grafik Informasi SDM PNS dan Non PNS Berdasarkan Usia

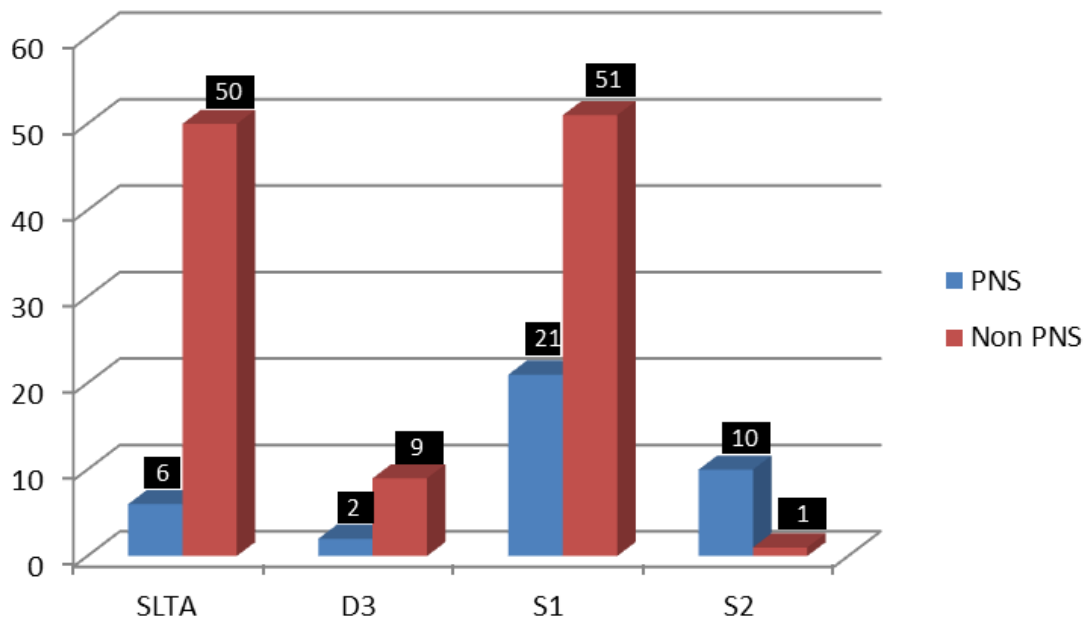




### 3.1.4 Informasi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2020, PNS dengan pendidikan S2 sebanyak 10 orang, dengan pendidikan S1 sebanyak 21 orang, dengan pendidikan D3 sebanyak 2 orang dan pendidikan SLTA sebanyak 6 orang. Sedangkan Non PNS dengan pendidikan S2 sebanyak 1 orang, dengan pendidikan S1 sebanyak 51 orang, dengan pendidikan D3 sebanyak 9 orang dan pendidikan SLTA sebanyak 50 orang.

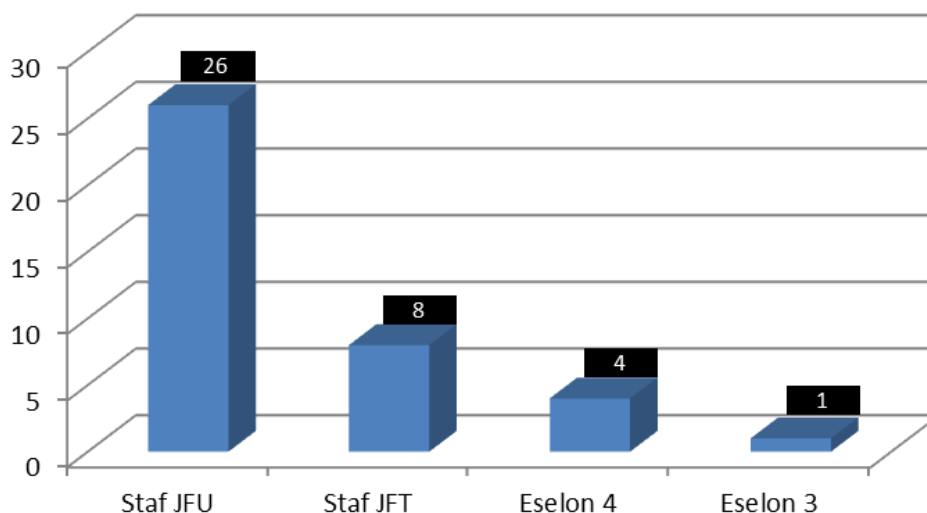
Gambar 3.1.4 Grafik Informasi SDM PNS Berdasarkan Pendidikan



### 3.1.5 Informasi Kepegawaian berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2020, PNS dengan Jabatan Eselon 3 sebanyak 1 orang, dengan Jabatan Eselon 4 sebanyak 4 orang, dengan Jabatan Staf JFT sebanyak 8 orang dan Jabatan JFU sebanyak 26 orang.

Gambar 3.1.5 Grafik Informasi SDM PNS Berdasarkan Jabatan





## 3.2 Sarana Prasarana

Dalam melakukan tugas dan fungsinya di wilayah kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau belum didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dikarenakan baru terbentuknya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau berdasarkan Permen PUPR nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana sebelumnya wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau berada dibawah BPJN IV Jambi. Dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau belum adanya serah terima aset antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau sehingga belum adanya pencatatan Aset di Simak BMN.

## 3.3 DIPA

### 3.3.1 Alokasi DIPA dan penjelasan perubahan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kepulauan Riau

Pada Awal tahun 2020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau yang terdiri dari 3 (tiga) satker mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp. 361.573.357.000,- dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan. Perubahan terjadi disebabkan adanya pemotongan (refocusing) realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya pagu anggaran menjadi Rp. 208.980.826.000,- ditahun 2020. Berikut disampaikan kronologis perubahan pagu pnggaran tahun 2020 di wilayah kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau.

Tabel 3.3.1 Alokasi DIPA

No	Kode	Satuan Kerja	PAGU (Rp.000)	
			Awal	Revisi
1	329039	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9.095.312	11.529.181
2	498585	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	328.990.279	171.622.355
3	902083	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	23.487.766	25.829.290
Total			361.573.357	208.980.826





Tabel 3.3.1 Perubahan Alokasi DIPA BPJN Kepulauan Riau dan Penjelasannya

No	Balai/Satker	DIPA	Tanggal DIPA	Alokasi Anggaran (Rp)	Kode DS	Keterangan
1.	<b>Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau</b>	DIPA Awal	12 November 2019	328.990.279.000	3719-0864-3639-9592	<b>DIPA Awal.</b>
		Revisi 1	13 Februari 2020	328.990.279.000	3719-0864-3639-9592	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Revisi halaman III DIPA dan Revisi POK pada keluaran 994, komponen 002 subkomponen AI dan AJ
		Revisi 2	22 Mei 2020	157.684.819.000	2104-4234-3630-8530	<b>Alokasi anggaran berkurang</b> 1. Revisi refocusing realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19 2. Perubahan jenis akun (tahap satu) pada paket yang terdapat kesalahan akun pada paket2 longsegment/ dari 523131 mejadi 534141
		Revisi 3	15 Juni 2020	157.684.819.000	2104-4234-3630-8530	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Revisi halaman III DIPA (triwulan II)
		Revisi 4	10 Juli 2020	157.684.819.000	0865-3675-3943-0427	<b>Alokasi anggaran tetap</b> 1. Menambahkan ouput 019 (Penanganan Drainase dan Bangunan Pelengkap dan Keselamatan Jalan) untuk mengakomodir penanganan jalan pada longsegment PPK 1.2 2. Pergeseran antar keluaran pada longsegment PPK 1.2
		Revisi 5	18 Agustus 2020	171.622.355.000	2538-2607-1880-0778	<b>Alokasi anggaran bertambah</b> 1. Revitalisasi Drainase Secara padat karya 2. Pengadaan CPHMA
		Revisi 6	28 Agustus 2020	171.622.355.000	0318-1754-5893-8752	<b>Alokasi anggaran tetap</b> 1. Perubahan jenis akun (tahap yang terakhir) paket-paket yang terdapat kesalahan akun pada paket2 longsegment/ dari 523131 mejadi 534141 2. Pergeseran antar subkomponen dalam satu komponen pada paket2 Revitalisasi Drainase Secara padat karya 3. Penyesuaian nama paket2 yang mengalami relaksasi (pada paket2 tersebut ditambahkan kata refocusing) 4. Ralat/penyesuaian volime target penanganan (+/-) pd ppk 1.2 dan ppk 1.4 5. Perubahan jenis akun belanja pada kegiatan pencegahan covid-19 (penggunaan kode akun khusus untuk covid-19) 6. Pengadaan alat perangkat pengolah data dan komunikasi yg dananya diambil dari sppd



		Revisi 7	14 September 2020	171.622.355.000	4588-3403-9402-7409	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Pergeseran antar subkomponen dalam satu komponen pada paket2 Revitalisasi Drainase Secara padat karya dan penambahan volume penanganan (revisi penyesuaian harga satuan dan pergeseran ruas penanganan Drainase Secara padat karya)
		Revisi 8	19 Oktober 2020	171.622.355.000	4006-1028-8184-8596	<b>Alokasi anggaran tetap</b> 1. Perubahan pejabat perbendaharaan; 2. Ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA; 3. Perubahan catatan halaman IV.b DIPA; 4. Pergeseran alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak berupa penanganan badan jalan akibat bencana alam (revisi pergeseran dana dari <i>output</i> 002 ke <i>output</i> 019 dan penambahan <i>volume</i> target pada <i>output</i> 019) pada longsegment PPK 1.2; 5. Pergeseran alokasi anggaran antar keluaran dilakukan untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 (revisi pergeseran dana dari <i>output</i> 001 ke <i>output</i> 970) 6. Penambahan <i>volume</i> keluaran dan pergeseran alokasi anggaran pada Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya
		Revisi 9	06 November 2020	171.622.355.000	8366-8157-0960-2105	<b>Alokasi anggaran tetap</b> 1. Pergeseran alokasi sisa dana panitia pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 2. Revisi POK pada Keluaran/output 994 komponen 002 subkomponen AI dan AJ.
		Revisi 10	24 November 2020	171.622.355.000	8366-8157-0960-2105	<b>Alokasi anggaran tetap</b> 1.Revisi rencana penarikan dana (halaman III DIPA) 2.Revisi antar komponen dalam satu keluaran dan satu paket longsegment D 3. Revisi POK paket rehab jembatan RH. Fisabillah Cs 4. Revisi POK Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 5. Revisi POK pada Keluaran/output 994 komponen 002 subkomponen AI dan AJ
2.	<b>Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Naasional Provinsi Kepulauan Riau</b>	Awal	12 November 2019	23.487.766.000	0905-3143-4032-7569	<b>DIPA Awal</b>
		Revisi 1	18 Februari 2020	23.487.766.000	0905-3143-4032-7569	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Perubahan Pejabat PPSPM dan Bendahara
		Revisi 2	30 April 2020	23.001.543.000	5680-0930-0963-9135	<b>Alokasi anggaran berkurang</b> Revisi <i>refocusing</i> realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19
		Revisi 3	28 Agustus 2020	25.829.290.000	9703-9437-3898-0555	<b>Alokasi anggaran Bertambah</b>



						Alokasi Pagu BPJN Kepri
		Revisi 4	24 September 2020	25.829.290.000	9703-9437-3898-0555	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Balance Budget
		Revisi 5	19 November 2020	25.829.290.000	9703-9437-3898-0555	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Balance Budget
3.	<b>Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP)</b>	Awal	12 November 2019	9.095.312.000	5143-6600-1990-7315	<b>DIPA Awal</b>
		Revisi 1	30 April 2020	8.085.217.000	4840-9709-6311-5605	<b>Alokasi anggaran berkurang</b> 1. Penyesuaian Nilai Kontrak 2. Revisi <i>refocusing</i> realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19
		Revisi 2	13 Juli 2020	8.085.217.000	4840-9709-6311-5605	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA (Triwulan III).
		Revisi 3	18 Agustus 2020	11.529.181.000	1900-5320-4890-1944	<b>Alokasi anggaran bertambah</b> Penambahan Program PEN (Revitalisasi Drainase Secara padat karya)
		Revisi 4	28 Agustus 2020	11.529.181.000	1900-5320-4890-1944	<b>Alokasi anggaran tetap</b> Ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA (Triwulan III).
		Revisi 5	28 Agustus 2020	11.529.181.000	1900-5320-4890-1944	<b>Alokasi anggaran tetap</b> 1.Revisi POK Revitalisasi Drainase Secara padat karya 2.Ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA (Triwulan III).



### 3.3.2 Komposisi pendanaan (RPM, PHLN, SBSN, dll) pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau

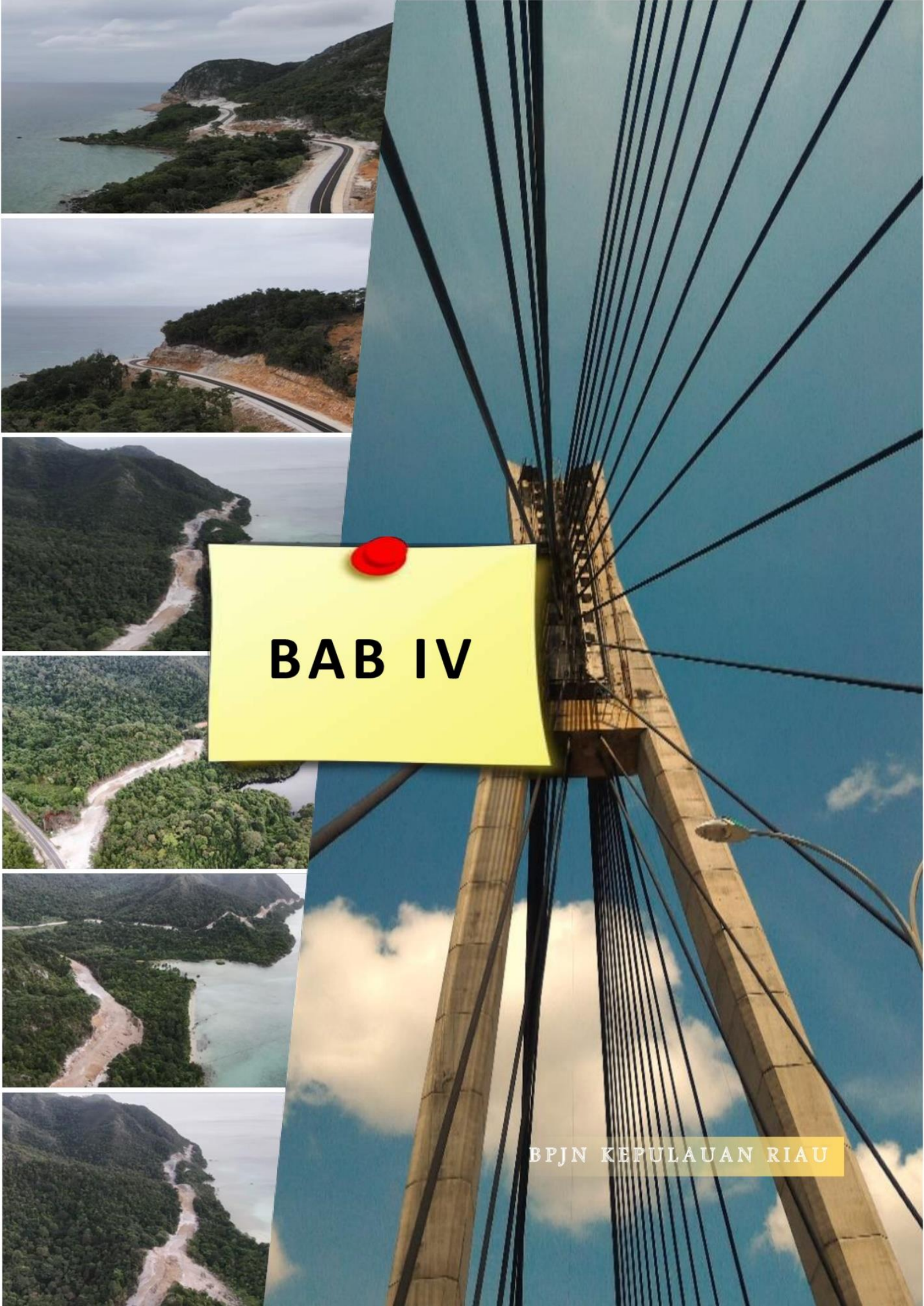
Untuk Komposisi pendanaan DIPA TA. 2020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau, terbagi menjadi pendanaan RPM dan SBSN, sedangkan di TA. 2020 tidak ada pendanaan PHLN oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau. Untuk Total Pagu DIPA Awal TA. 2020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau adalah sebesar Rp. 361.573.357.000,- dibagi menjadi Rp. 291.573.357.000 untuk RPM (Rupiah Murni) dan Rp. 70.000.000.000 untuk dana SBSN. Selanjutnya terdapat perubahan, revisi terhadap Pagu DIPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau menjadi Rp. 208.980.826.000, yang dibagi menjadi Rp. 190.839.106.000 untuk RPM dan Rp. 18.141.720.000 untuk dana SBSN.

Tabel 3.3.2 Komposisi pendanaan BPJN Kepulauan Riau PerSumber Dana TA. 2020

NO	KODE	SATUAN KERJA	PAGU (Rp Ribu)							TOTAL
			RM	RMP	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	
1.	329039	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	11.529.181	-	-	-	-	-	-	11.529.181
2.	498585	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	153.480.635	-	-	-	-	-	18.141.720	171.622.355
3.	902083	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	25.829.290	-	-	-	-	-	-	25.829.290
<b>Total</b>			<b>190.839.106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.141.720</b>	<b>208.980.826</b>

Isu Terkait Anggaran adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran, menyebabkan pemotongan (Refocusing) realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya relokasi anggaran tahun 2020 yang menyebabkan tidak tercapainya target anggaran dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan.





**BAB IV**



## BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau akan menguraikan mengenai (1) capaian kinerja organisasi yang merupakan informasi mengenai realisasi kinerja dalam bentuk fisik dan keuangan tahun anggaran 2020 terhadap perjanjian kinerja 2020 dan rencana penyerapan keuangan yang telah ditetapkan serta analisis keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi capaian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau; (2) Perbandingan kinerja organisasi yang merupakan perbandingan kinerja tahun anggaran 2020 dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2018 dan 2019; (3) Realisasi anggaran yang merupakan analisis atas efisiensi sumber daya di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang diturunkan dari review rencana kinerja tahunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024.

### 4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau saat ini sangat terkait dengan kemantapan jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemantapan jalan Nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah.

Proses pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dari program dan sasaran pada penetapan kinerja tahun 2020 dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator output dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau. Data realisasi kegiatan berasal dari realisasi DIPA pada akhir tahun kegiatan. Adapun capaian kinerja organisasi yang digolongkan dalam tiap output adalah sebagai berikut :





Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2020

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	83,00	83,00	100,00	
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	%	2,69	2,46	91,45	
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	%	4,30	-	-	

Perhitungan terhadap capaian Tingkat Aksebilitas Jalan Nasional dapat terpenuhi sesuai dengan target 83% dimana semua indikator kinerja/output kinerja dapat direalisasikan 100%, sedangkan untuk Rating Kondisi Jalan Nasional dari target 2,69 yang dapat terpenuhi hanya 2,46 dimana indikator kinerja/output yang terealisasi 91,45% untuk capaian kinerja di tahun 2020. Kegiatan dengan indikator kinerja/output terhadap Rating Keselamatan Jalan Nasional tidak termasuk dalam kegiatan di tahun 2020 sehingga capaian yang terealisasi tidak ada.

## Kemantapan Jalan Nasional Semester I Tahun 2020

TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL (SK 2015)	Total Panjang Survey	Kondisi Semester 1 2020			
		Baik	Sedang	R. Ringan	R. Berat
(Km)	SM. 1&2 2020				
586,87	578,991	341,464 Km	222,09 Km	6,718 Km	7,197 Km
		563,472 Km		13,916 Km	
		97,59 %		2,41 %	
		MANTAP		TIDAK MANTAP	

## Kemantapan Jalan Nasional Semester II Tahun 2020

TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL (SK 2015)	Total Panjang Survey	Kondisi Semester 1 2020			
		Baik	Sedang	R. Ringan	R. Berat
(Km)	SM. 1&2 2020				
586,87	578,991	341,464 Km	222,09 Km	6,718 Km	7,197 Km
		563,472 Km		13,916 Km	
		97,59 %		2,41 %	
		MANTAP		TIDAK MANTAP	



Tabel 4.1 Capaian Kinerja Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2020

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	km	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
2	Panjang Pembangunan Jalan	km	10,73	3,75	3,75	34,95	100,00	
	- Pembangunan Jalan	km	10,73	3,75	3,75	34,95	100,00	
3	Panjang Pembangunan Jembatan	m	82,00	19,11	19,11	23,30	100,00	
	- Pembangunan Jembatan	m	82,00	19,11	19,11	23,30	100,00	
4	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	542,85	554,07	554,07	102,07	100,00	
5	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	33,16	22,57	22,57	68,06	100,00	
	- Rehabilitasi Minor Jalan	km	16,56	12,99	12,99	78,44	100,00	
	- Rehabilitasi Mayor Jalan	km	3,90	1,55	1,55	39,74	100,00	
	- Rekonstruksi Jalan	km	8,00	4,13	4,13	51,63	100,00	
	- Pemeliharaan Preventif Jalan	km	3,90	3,45	3,45	88,46	100,00	
	- Penanganan Longsoran	km	0,80	0,45	0,45	56,25	100,00	
6	Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	km	-	22,45	22,45	-	100,00	
7	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	m	5.654,50	5.642,90	5.642,90	99,79	100,00	
8	Panjang Preservasi Jembatan	m	1.464,60	475,20	475,20	32,45	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan	m	1.464,60	475,20	475,20	32,45	100,00	
9	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	





#### 4.1.1 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

Kegiatan pemeliharaan rutin jalan ini merupakan kegiatan pemeliharaan pada ruas jalan dengan kondisi sedang, sangat diperlukan untuk mempertahankan kemantapan dan kondisi jalan agar tetap mampu melayani pengguna jalan dengan aman dan nyaman sesuai dengan umur rencana. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan level IRI (ketidakrataan jalan) sehingga tidak terjadi penurunan drastis setiap tahun. Kegiatan pemeliharaan rutin yang telah dilakukan antara lain : pekerjaan pengendalian tanaman, pekerjaan pembersihan drainase, pengecatan kerb dan median jalan, pengecatan jembatan, Pemeliharaan Rutin Kondisi meliputi pengisian celah/retak permukaan (*sealing*), penambalan lubang, dan *grading operation/reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup, serta Penunjangan/Holding meliputi pengaspalan sebagian badan jalan jika pelaksanaan patching tidak efisien dilakukan sehingga mampu menunda penanganan sesuai yang dibutuhkan (rekonstruksi), dimana manfaat pemeliharaan rutin:

1. Mempertahankan Kemantapan jalan;
2. Pembersihan Drainase Jalan untuk mempertahankan kinerja fungsional dan struktural jalan Nasional;
3. Penyerapan tenaga kerja pekerjaan padat karya di sekitar lokasi pekerjaan.

Tabel 4.1.1 Capaian Kinerja Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
	<b>Tingkat Rating Kondisi</b>						
	<b>Satker PJN Wil.I Prov Kepri</b>						
1.	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	453,92	465,60	465,60	102,57	100,00
	- Pemeliharaan Rutin	km	106,61	222,09	222,09	208,32	100,00
	- Pemeliharaan Rutin Kondisi	km	217,58	141,79	141,79	65,17	100,00
	- Penunjangan/Holding	km	129,73	101,72	101,72	78,41	100,00
	<b>SKPD-TP Prov. Kepri</b>						
2.	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	88,93	88,93	88,93	100,00	100,00
	- Pemeliharaan Rutin	km	10,95	10,95	10,95	100,00	100,00
	- Pemeliharaan Rutin Kondisi	km	29,40	29,40	29,40	100,00	100,00
	- Penunjangan/Holding	km	48,58	48,58	48,58	100,00	100,00

**Manfaat:** Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan dilaksanakan setiap tahun yang berfungsi mempertahankan kemantapan dan kondisi jalan serta mempertahankan level IRI (ketidakrataan jalan) sehingga tidak terjadi penurunan drastis setiap tahun agar tetap mampu melayani pengguna jalan dengan aman dan nyaman sesuai dengan umur rencana.

**Kendala:** Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan akhir tahun 2020.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk tahun berikutnya

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya Pelaksanaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 100% sesuai dengan target revisi akhir.



## DOKUMENTASI

### Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Daik Tg. Buton Sungai Besar - Pancur



#### 4.1.2 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

Kegiatan Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dilakukan secara periodik yang bertujuan menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi yang baik setelah pembangunan sehingga mampu mencapai umur yang direncanakan. Kegiatan Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan ruas jalan yang semula ditangani melalui pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan, yang berakibat menurunnya kondisi menjadi kondisi rusak ringan. Output ini terdiri dari beberapa komponen yaitu : penanganan longsor, rehabilitasi/rekonstruksi daerah bencana, rehabilitasi minor dan rehabilitasi mayor.

Tabel 4.1.2 Capaian Kinerja Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
<b>Tingkat Rating Keselamatan</b>							
<b>Satker PJN Wil.I Prov Kepri</b>							
1.	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	33,16	22,57	22,57	68,06	100,00
	- Pemeliharaan Preventif Jalan	km	3,90	3,45	3,45	88,46	100,00
	- Rehabilitasi Minor Jalan	km	16,56	12,99	12,99	78,44	100,00
	- Rehabilitasi Mayor Jalan	km	3,90	1,55	1,55	39,74	100,00
	- Rekonstruksi Jalan	km	8,00	4,13	4,13	51,63	100,00
	- Penanganan Longsoran	km	0,80	0,45	0,45	56,25	100,00
<b>SKPD-TP Prov. Kepri</b>							
2.	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	0,40	0,40	0,40	100,00	100,00
	- Rehabilitasi Minor Jalan	km	0,40	0,40	0,40	100,00	100,00





**Manfaat:** Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dilakukan secara periodik yang bertujuan menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi yang baik sehingga kerusakan yang ada dapat ditangani agar tetap mampu melayani pengguna jalan dengan aman dan nyaman.

**Kendala:** Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan akhir tahun 2020.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk dalam Penanganan Rekonstruksi atau Rehabilitasi tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 100% sesuai dengan target revisi akhir.

## DOKUMENTASI

### Rehabilitasi Minor Jalan Sei Harapan - Base Camp



### Pekerjaan Overlay ACWC Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Gesek (KM 16) - Sp. Busung



#### 4.1.3 Preservasi Rutin Jembatan

Pemeliharaan rutin jembatan pada dasarnya menjaga jembatan dalam tetap dalam kondisi baik, pemeliharaan rutin jembatan antara lain mencakup pembersihan secara umum, membuang tumbuhan liar dan sampah, pembersihan dan melancarkan lubang saluran jembatan, pengecatan sederhana dan pemeliharaan permukaan lantai kendaraan.



Tabel 4.1.3 Capaian Kinerja Preservasi Rutin Jembatan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
	<b>Tingkat Rating Kondisi</b>						
<b>Satker PJN Wil.I Prov Kepri</b>							
1.	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	m	5.654,50	5.642,90	5.642,90	99,79	100,00
	- Pemeliharaan Rutin Jembatan	km	5.654,50	5.642,90	5.642,90	99,79	100,00

**Manfaat:** Preservasi Rutin Jembatan dilaksanakan setiap tahun yang berfungsi mempertahankan kemantapan dan kondisi Jembatan agar tetap mampu melayani pengguna Jembatan dengan aman dan nyaman dan dapat meningkatkan pertumbuhan prekonomian antar wilayah di daerah tersebut.

**Kendala:** Preservasi Rutin Jembatan dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 100% sesuai dengan target revisi ahir.

#### DOKUMENTASI



#### 4.1.4 Preservasi Jembatan

Preservasi Jembatan atau pemeliharaan berkala jembatan adalah upaya menjaga jembatan tetap dalam kondisi yang baik. Kegiatan pemeliharaan berkala jembatan dilakukan secara periodik dimana struktur yang ada sudah mengalami penurunan tingkat pelayanan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas layanan agar kemampuan daya dukung dapat memenuhi kualifikasi teknis jembatan sesuai umur rencana. Setelah pembangunan, kegiatan yang dilakukan antara lain : pengecatan ulang, penggantian lapis permukaan, pembersihan jembatan secara keseluruhan, pemeliharaan perletakan atau landasan, penggantian expansion joint dan lain sebagainya. Sedangkan perbaikan sederhana mencakup pada penggantian elemen/bagian yang kecil, perbaikan tiang dan sandaran, perkuatan bagian - bagian





yang bergerak, perkuatan bagian yang struktural, perbaikan tebing yang longsor atau terkena erosi, perbaikan bangunan pengaman yang sederhana dan lain sebagainya.

Tabel 4.1.4 Capaian Kinerja Preservasi Jembatan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
<b>Tingkat Rating Keselamatan</b>							
<b>Satker PJN Wil.I Prov Kepri</b>							
1.	Panjang Preservasi Jembatan	m	1.464,60	475,20	475,20	32,45	100,00
	- Rehabilitasi Jembatan	m	1.464,60	475,20	475,20	32,45	100,00

**Manfaat:** Preservasi Rutin Jembatan dilakukan secara berkala/preodik dalam upaya menjaga kondisi Jembatan dimana struktur yang ada sudah mengalami penurunan tingkat pelayanan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas layanan agar kemampuan daya dukung dapat memenuhi kualifikasi teknis jembatan sesuai umur rencana agar tetap mampu melayani pengguna Jembatan dengan aman dan nyaman dan dapat meningkatkan pertumbuhan prekonomian antar wilayah didaerah tersebut.

**Kendala:** Preservasi Rutin Jembatan dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja penanganan Preservasi Jembatan agar lebih baik untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 100% sesuai dengan target revisi ahir.

#### DOKUMENTASI



#### 4.1.5 Pembangunan Jalan

Pada tahun 2020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau memiliki pekerjaan pembangunan jalan yang terdiri dari Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik dan Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Depih Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC). Pembangunan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau mengalami perubahan target panjang penanganan dikarenakan adanya Refocusing Realokasi Anggaran dampak dari pandemi Covid-19.



Tabel 4.1.5 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
	<b>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>						
	<b>Satker PJN Wil.I Prov Kepri</b>						
1.	Panjang Pembangunan Jalan	km	10,73	3,75	3,75	34,95	100,00
	- Pembangunan Jalan	km	10,73	3,75	3,75	34,95	100,00

**Manfaat:** Pembangunan Jalan tahun 2020 dilaksanakan Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik yang bertujuan untuk membuka trase baru sehingga jalan tersebut dapat dilalui masyarakat, dan Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Depih Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) dimana pelaksanaannya dilaksanakan untuk pengalihan trase jalan yang sudah ada agar mampu mempersingkat jarak tempuh dan mengurangi kendala terhadap jalan yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan prekonomian antar wilayah didaerah tersebut.

Sasaran Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik dimana akan terbangunnya jalan lingkar pulau natuna, akses ke pusat pelayanan kawasan industri berbasis migas, wisata laut dan kawasan pertanian, akses ke rencana pembangunan dermaga samudra dan bandara internasional natuna, mendukung akses pertahanan (kompi artileri TNI AD), mendukung Rencana Pembangunan Pelabuhan Utama Natuna / Pelabuhan Internasional di Teluk Buton (Cargo, Logistik Industri Migas).

**Kendala:** Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik dan Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Depih Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal tercapainya pelaksanaan program penyelenggaraan jalan untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik dan Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Depih Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) 100% sesuai dengan target revisi ahir. Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Depih Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) pembangunannya berlanjut ke tahun 2021 karena pekerjaan tersebut Multy Years.

## DOKUMENTASI

### Pembangunan Jalan - Teluk Buton Klarik





#### 4.1.6 Pelebaran Jalan Menambah Lajur

Pelebaran Jalan Menambah Lajur merupakan kegiatan melebarkan badan jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan dalam menampung volume lalu lintas di atasnya dan menuju standar sesuai dengan spesifikasi. Manfaat kegiatan tersebut antara lain memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta distribusi barang dan jasa.

Tabel 4.1.6 Capaian Kinerja Pelebaran Jalan Menambah Lajur

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional							
Satker PJN Wil.I Prov Kepri							
1.	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	km	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	- Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	km	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

**Manfaat:** Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada tahun 2020 dilaksanakan melebarkan badan jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan dalam menampung volume lalu lintas di atasnya dan menuju standar sesuai dengan spesifikasi yang bermanfaat antara lain memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta distribusi barang dan jasa.

**Kendala:** Pelaksanaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada tahun 2020 tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal tercapainya pelaksanaan program penyelenggaraan jalan untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada tahun 2020 100% sesuai dengan target revisi ahir.

#### DOKUMENTASI

##### Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Tembesi – Tj. Berikat







#### 4.1.7 Pembangunan Jembatan

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau mendapatkan penanganannya pembangunan jembatan di daerah Kabupaten Natuna, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs. Pembangunan Jembatan pada BPJN Kepulauan Riau mengalami perubahan target panjang penanganannya dikarenakan adanya Refocusing Realokasi Anggaran dampak dari pandemi Covid-19.

Tabel 4.1.7 Pembangunan Jembatan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
<b>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>							
<b>Satker PJN Wil.I Prov Kepri</b>							
1.	Panjang Pembangunan Jembatan	m	82,00	19,11	19,11	23,30	100,00
	- Pembangunan Jembatan	m	82,00	19,11	19,11	23,30	100,00

**Manfaat:** Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs pada tahun 2020 dilaksanakan sebagai penghubung antar wilayah agar bisa dilalui untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Selain dari sebagai sarana penghubung juga dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Pelabuhan Utama Natuna / Pelabuhan Internasional di Teluk Buton (Cargo, Logistik Industri Migas) dan mendukung akses pertahanan keamanan nasional sebagai akses lalu lintas alutsista, maka diusulkan Program Penanganan 15 (lima belas) Jembatan di ruas jalan Teluk Buton – Klarik.

**Kendala:** Penanganan Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal tercapainya pelaksanaan program penyelenggaraan jalan untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs 100% sesuai dengan target revisi akhir.

#### DOKUMENTASI

##### Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs



Project Klarik 2  
Item ABT 1 sisi sebelah Kiri





#### 4.1.8 Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan

Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan kegiatan Program Padat Karya. Kegiatan Padat Karya dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Tabel 4.1.8 Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
<b>Tingkat Rating Keselamatan</b>							
<b>Satker PJN Wil.I Prov Kepri</b>							
1.	Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	km	-	22,45	22,45	100,00	100,00
	- Penanganan Drainase	km	-	22,45	22,45	-	100,00
<b>SKPD-TP Prov. Kepri</b>							
2.	Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	km	-	22,45	22,45	100,00	100,00
	- Penanganan Drainase	km	-	3,27	3,27	-	100,00

**Manfaat:** Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan dilaksanakan setiap tahun yang berfungsi mendukung kemantapan dan kondisi jalan serta dalam pelaksanaan bisa memberdayakan masyarakat setempat dengan program padat karya sesuai arahan dari Kementerian PUPU guna meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

**Kendala:** Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal tercapainya pelaksanaan program penyelenggaraan jalan untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan 100% sesuai dengan target revisi ahir.

#### DOKUMENTASI





## 4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap realisasi yang dicapai sebagai perbaikan capaian kinerja setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi bahan acuan untuk melaksanakan perencanaan kedepan dan strategi pencapaian target perencanaan tersebut. Adapun perbandingan rata-rata capaian kinerja output Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun terakhir pada tahun 2020. Tabel perbandingan ini akan diperoleh gambaran apakah target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam renstra bisa tercapai atau sebaliknya.

Tabel 4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

NO	OUTPUT	SAT	2020		
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
<b>1</b>	<b>Jalan yang Terpelihara</b>	<b>km</b>	<b>554,07</b>	<b>594,96</b>	<b>107,38</b>
	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km	554,07	554,07	
	Pemeliharaan Preventif Jalan	km	-	3,45	
	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	-	14,99	
	Rekonstruksi Jalan	km	-	4,13	
	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	km	-	22,45	
<b>2</b>	<b>Jalan yang Ditingkatkan</b>	<b>km</b>	<b>2,05</b>	<b>1,00</b>	<b>48,78</b>
	Pelebaran Jalan/Pelebaran Jalan Menambah Lajur	km	2,05	1,00	
<b>3</b>	<b>Jembatan yang Dipelihara</b>	<b>m</b>	<b>6.118,10</b>	<b>6.118,10</b>	<b>100,00</b>
	Preservasi Rutin Jembatan	m	5.642,90	5.642,90	
	Rehabilitasi Jembatan	m	475,20	475,20	
<b>5</b>	<b>Jalan yang Dibangun</b>	<b>km</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>100,00</b>
	Pembangunan Jalan	km	3,75	3,75	
<b>6</b>	<b>Jembatan yang Dibangun</b>	<b>m</b>	<b>19,11</b>	<b>19,11</b>	<b>100,00</b>
	Pembangunan Jembatan	m	19,11	19,11	

Pencapaian Kinerja selama satu tahun pertama pada renstra 2020-2024 bisa terealisasi sesuai antara target yang ada pada renstra dan pelaksanaan yang terealisasi pada tahun 2020 rata-rata realisasi volume pada seluruh output dengan pencapaian 91,21% dapat dipenuhi. Pada pencapaian antara target awal dan terhadap target revisi realisasi pada seluruh output terpenuhinya dengan pencapaian 100%.

## 4.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2020 dengan rincian penyerapan anggaran berdasarkan Output disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 4.3 Realisasi Anggaran BPJN Kepulauan Riau TA. 2020

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
<b>Indikator Kinerja Program: Meningkatnya Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional</b>							
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	39.991.700	37.017.711	36.710.722	91,80	99,17	
2	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	4.561.540	4.151.193	4.151.193	91,00	100,00	
<b>Indikator Kinerja Program: Meningkatnya Tingkat Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>							
3	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	117.825.861	51.552.981	51.552.981	43,75	100,00	
4	Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	-	26.007.437	25.995.747	-	99,96	
5	Panjang Preservasi Jembatan	33.233.162	8.868.677	8.868.570	26,69	100,00	
<b>Indikator Kinerja Program: Meningkatnya Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>							
6	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	10.670.000	9.598.760	9.598.760	89,96	100,00	
7	Panjang Pembangunan Jalan	86.410.000	32.902.853	32.902.853	38,08	100,00	
8	Panjang Pembangunan Jembatan	40.347.000	8.064.500	8.064.500	19,99	100,00	

#### 4.3.1 Analisis atas efisiensi sumber daya terhadap capaian kinerja dan anggaran

Berdasarkan Permen PUPR nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terbentuklah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau dengan wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau pada tahun 2020 didukung oleh unit satuan kerja yang terdiri atas 2 (dua) satuan kerja dengan jumlah PNS 39 orang dan Non PNS 111 orang.

Meskipun BPJN Kepulauan Riau baru terbentuk dengan jumlah sumber daya manusia yang ada dalam memenuhi target capaian kinerja pada Tahun 2020 berhasil dicapai dengan beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Memberdayakan SDM yang ada sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidangnya masing-masing;
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja SDM yang ada;
3. Membuat komitmen dan integritas yang tinggi terhadap SDM yang ada di BPJN Kepulauan Riau dalam penyelesaian pekerjaan.



Pagu Anggaran yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau tahun anggaran sebesar Rp. 208.092.255.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 208.092.255.000 dengan persentase 99,57%. Dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada di BPJN Kepulauan Riau terhadap realisasi anggaran maka dilakukan antara lain:

1. Upaya percepatan penyerapan anggaran untuk mencapai target hingga berhasil mencapai hasil yang baik pada akhir tahun 2020;
2. Mempercepat proses Lelang Dini di tahun 2020;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pengendalian terhadap progres keuangan;
4. Membuat rencana penyerapan yang akan dievaluasi pencapaiannya setiap bulan;
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi setiap SDM yang ada dalam organisasi dalam pencapaian target dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Tabel 4.3.1 Realisasi Anggara BPJN Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020

No	Kode	Satuan Kerja	PAGU (Rp.000)			REALISASI (Rp.000)			Progres	
			RPM	PHLN	TOTAL	RPM	PHLN	TOTAL	Keu	Fis
1	329039	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	11.529.181	-	11.529.181	11.504.438	-	11.504.438	99,79	100
2	498585	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	171.622.355	-	171.622.355	171.227.561	-	171.227.561	99,77	100
3	902083	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	25.829.290	-	25.829.290	25.360.257	-	25.360.257	98,18	100
Total			208.980.826	-	208.980.826	208.092.255	-	208.092.255	99,57	100

#### 4.4 Paket Strategis

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Selat Lampa – Teluk Depih – Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) yang dibiayai dari dana SBSN. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau di pada PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kabupaten Natuna.

Gambaran umum Kabupaten Natuna merupakan Kabupaten paling utara di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus kepulauan terluar Nusantara yang terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Potensi yang dimiliki Kabupaten Natuna terdapat SDA Perikanan Laut Mencapai 1 Jt Ton/Tahun Dengan Kisaran Pemanfaatan 36%, Perkiraan potensi gas mencapai 222 Triliyun ft<sup>3</sup>, Perkiraan potensi recoverable gas 46 tof (46.000 bcf) atau setara dengan 8.383 milyar barel minyak dan Memiliki beberapa wisata seperti Pantai Tanjung, Alif Stone Park, Pulau Senua, Tanjung Datuk, Masjid Agung Natuna, Dll.

Latar belakang embangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, yang menyebutkan bahwa Pulau Natuna ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang meliputi lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan dan kawasan strategis pariwisata nasional.





Dalam Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2012, disebutkan bahwa daerah Selat Lampa - Sekunyam merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi kegiatan industri berbasis migas dan sektor wisata laut.

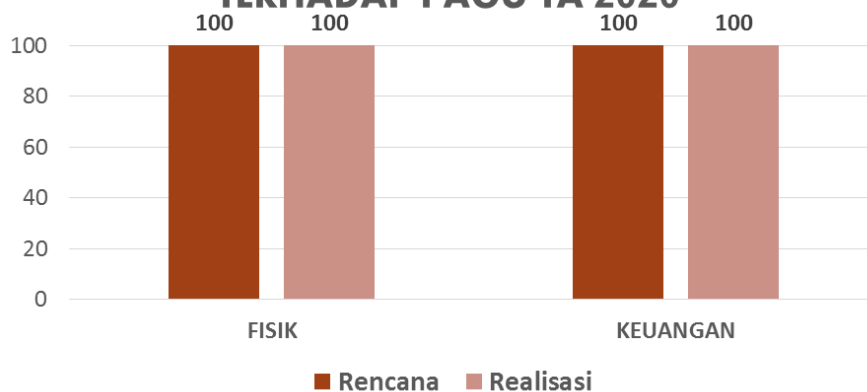
Informasi Paket Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) sebagai berikut :

<b>No. Kontrak</b>	<b>HK.0201/SP-HS/PJN1-PPK 1.4/IX/2020/07</b>
<b>Tanggal Kontrak</b>	<b>08 September 2020</b>
<b>Nilai Kontrak (7,10 Km)</b>	<b>Rp. 68.156.714.000,-</b>
Nilai Kontrak Tahun 2020 (1,75 km)	Rp. 18.141.720.000,-
Nilai Kontrak Tahun 2021 (4,25 km)	Rp. 41.779.923.000,-
Nilai Kontrak Tahun 2022 (1,10 km)	Rp. 8.235.071.000,-
<b>Rencana PHO</b>	<b>01 Maret 2022</b>

Realisasi berdasarkan Nilai Refocusing

No	Nama Paket	Nilai Kontrak / Add	Progres Fisik			Progres Keuangan			KET.
			REAL (%)	RENC. (%)	Deviasi	REAL (Rp)	RENC. (Rp)	Deviasi	
1.	Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)	18.141.720.000	100	100	-	18.141.720.000	18.141.720.000	-	-

### PROGRESS FISIK & KEUANGAN TERHADAP PAGU TA 2020





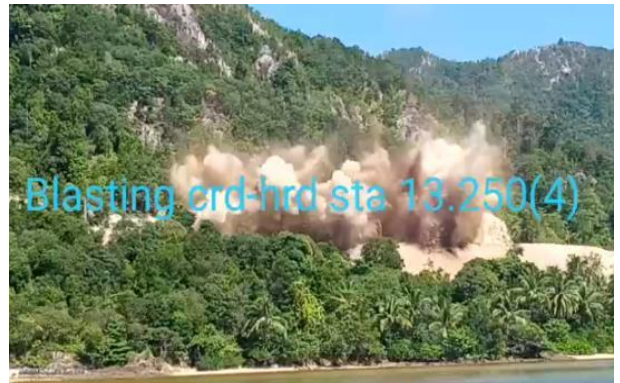
Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Galian Batu (Blasting) - Penggunaan CRD







Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Galian Batu (Blasting) - Peledakan



Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Galian Batu (Blasting) - Pembersihan Hasil Ledakan

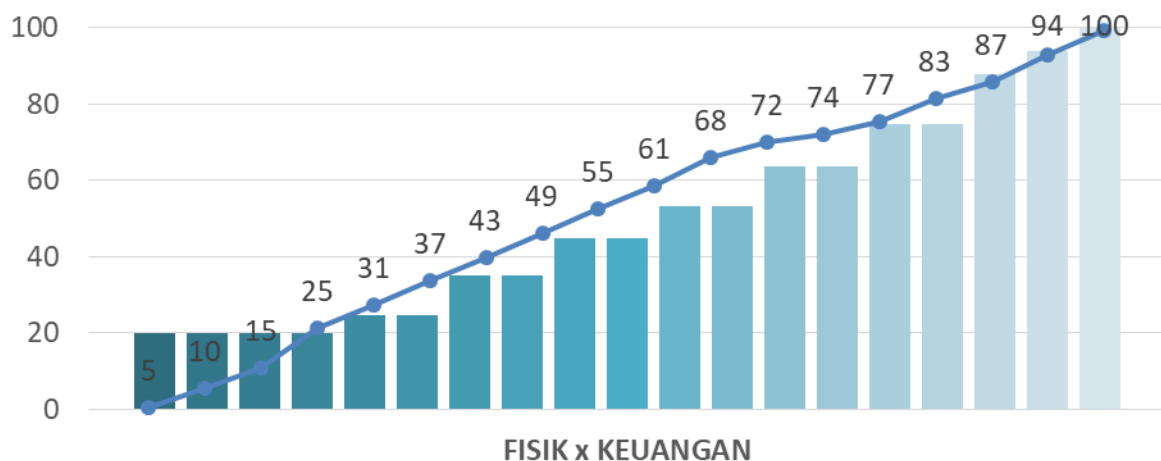




## TAHAPAN KEGIATAN PERTAHUN (Berdasarkan Penawaran)

Tahun	TA.2020	TA.2021	TA. 2022
<b>Cakupan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi</li> <li>• Manajemen dan keselamatan lalu lintas</li> <li>• Pengamanan lingkungan hidup</li> <li>• Keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Manajemen mutu</li> <li>• Pekerjaan Tanah dan Geosintetik               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan galian</li> <li>- Pekerjaan timbunan</li> <li>- Penyiapan badan jalan</li> <li>- Pembersihan dan pengupasan lahan</li> <li>- Pemotongan Pohon</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen keselamatan lalu lintas</li> <li>• Pengamanan lingkungan hidup</li> <li>• Keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Manajemen mutu</li> <li>• Pekerjaan drainase</li> <li>• Pekerjaan Tanah dan Geosintetik               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan galian</li> <li>- Pekerjaan timbunan</li> <li>- Penyiapan badan jalan</li> <li>- Pembersihan dan pengupasan lahan</li> <li>- Pemotongan Pohon Pilihan</li> </ul> </li> <li>• Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapis Fondasi Agregat Kelas A</li> </ul> </li> <li>• Perkerasan aspal</li> <li>• Pekerjaan struktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demobilisasi</li> <li>• Manajemen keselamatan lalu lintas</li> <li>• Pengamanan lingkungan hidup</li> <li>• Keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Manajemen mutu</li> <li>• Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapis Fondasi Agregat Kelas S</li> </ul> </li> <li>• Perkerasan aspal</li> <li>• Pekerjaan harian dan lain – lain (Marka)</li> </ul>

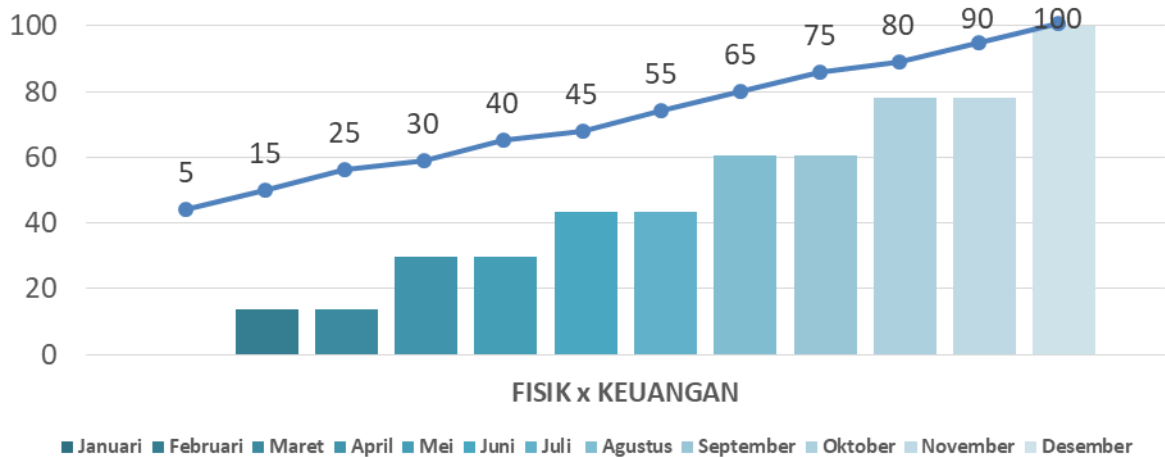
**RENCANA PROGRESS FISIK x KEUANGAN  
TERHADAP NILAI KONTRAK**







### RENCANA PROGRESS FISIK & KEUANGAN TERHADAP PAGU TA 2021



#### KETERANGAN :

**Alokasi DIPA TA 2021** : Rp. 55.705.671.000,-  
**Terkontrak TA 2021** : Rp. 41.779.923.000,-  
**Terkontrak TA 2022** : Rp. 8.235.071.000,-

Apabila Pagu DIPA TA 2021 di tambah dengan Nilai TA 2020 Nilai Uang Melebihi Nilai Kontrak

Kendala yang dihadapi dan Tindak lanjut yang dihadapi selama proses pelaksanaan pekerjaan tahun 2020 dimana terjadi keterlambatan pada pekerjaan galian batu diakibatkan terlalu lama Alat yang digunakan untuk pelaksanaan blasting belum sepenuhnya di mobilisasi ke lokasi pekerjaan. Dalam menangani permasalahan tersebut, PPK langsung mengarahkan Kontraktor untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pada tanggal 02 Desember 2020 Alat telah tiba di Natuna dan akan di dan langsung dimobilisasi ke lokasi pekerjaan.

Dalam pencapaian keberhasilan yang dibebankan terhadap target pekerjaan Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) dapat dipenuhi sepanjang 1,73 km dengan progress 100%, dan untuk penyerpan anggaran dapat dipenuhi sebesar Rp. 18.141.720.000 dengan progress 100%.

#### 4.5 Paket Diresmikan dan Penghargaan

Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau di tahun anggaran 2020 Sampai dengan Bulan Desember tidak terdapat paket kegiatan yang diresmikan atau mendapatkan penghargaan.



**BAB V**





## BAB V PENUTUP

### 5.1 Permasalahan

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sudah menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dan dikarenakan BPJN Kepulauan Riau masih tebilang baru terbentuk akan terus mencari tahu tentang permasalahan yang sering terjadi dan berusaha untuk mengatasinya.

### 5.2 Rekomendasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dalam pencapaian target baik itu realisasi terhadap fisik maupun realisasi terhadap keuangan sehingga pencapaian yang diharapkan bisa terpenuhi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan mutu dalam hal pelaksanaan program penyelenggaraan jalan sehingga kemantapan jalan nasional bisa ditingkatkan dan dipertahankan kondisinya tetap baik dan diharapkan dengan kemantapan jalan nasional baik bisa meningkatkan prekonomian, pariwisata, penghubung antar wilayah dan akses menuju kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.



# LAMPIRAN

---





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAIZAL  
Jabatan : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



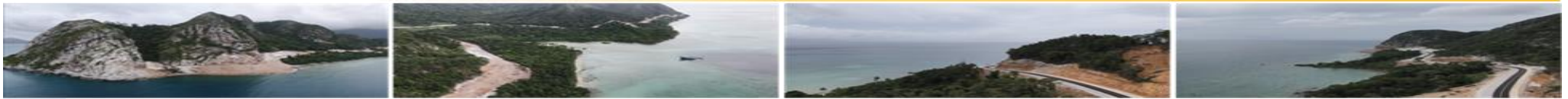


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

REVISI
--------

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2020	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas</b>	<b>83,30</b>	%	<b>83,00</b>	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>				
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00	%	100,00	%
	<b>Output</b>				
	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	5,00	Km	1,00	Km
	Panjang Pembangunan Jalan	<b>23,08</b>	<b>Km</b>	<b>3,75</b>	Km
	a. Pembangunan Jalan	16,94	Km	-	Km
	b. Non Pembangunan Jalan:	6,14	Km	3,75	Km
	Panjang Pembangunan Jembatan	327,80	M	19,11	M
	a. Pembangunan Jembatan	241,00	M	19,11	M
	- Duplikasi Jembatan	86,80	M	-	M
	<b>IKSP 2 Tingkat Rating Kondisi</b>	<b>2,65</b>	%	<b>2,69</b>	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>				
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00	%	100,00	%
	<b>Output</b>				
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	560,03	Km	554,07	Km
	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	<b>29,47</b>	<b>Km</b>	<b>21,65</b>	Km
	a. Rutin Preventif	0,70	Km	3,10	Km
	b. Rekonstruksi Jalan	10,10	Km	3,78	Km
	c. Rehabilitasi Minor Jalan	21,07	Km	12,31	Km
	d. Rehabilitasi Mayor Jalan	-	Km	0,95	Km
	e. Penanganan Longsoran	500,00	M	0,45	Km
	f. Penanganan Drainase dan Bangunan Pelengkap	1.500,00	M	-	M
g. Penanganan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan	-	Km	1,98	Km	
Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	-	Km	34,36	Km	
Panjang Preservasi Rutin Jembatan	6.189,50	M	5.642,90	M	
Panjang Preservasi Jembatan	756,60	M	475,20	M	





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2020
	<b>IKSP 3 Rating Keselamatan</b>	<b>4,40 %</b>	<b>4,30 %</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %
	<b>Output</b>		
	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	513,73 Km	465,14 Km
	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	<b>2.028,77 Km</b>	<b>22,17 Km</b>
	a. Rutin Preventif	10,10 Km	3,10 Km
	b. Rekonstruksi Jalan	18,67 Km	3,78 Km
	c. Rehabilitasi Minor Jalan	- Km	11,91 Km
	d. Rehabilitasi Mayor Jalan	500,00 M	0,95 Km
	e. Penanganan Longsoran	1.500,00 M	0,45 Km
	g. Penanganan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan	- Km	1,98 Km
	Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	- Km	18,60 Km
	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	6.189,50 M	5.642,90 M
	Panjang Preservasi Jembatan	756,60 M	475,20 M
	a. Pemeliharaan Berkala Jembatan	756,60 M	- M
	b. Rehabilitasi Jembatan	- M	475,20 M
	Panjang Penggantian Jembatan	41,20 M	- M

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 208.980.826.000

Direktur Jenderal Bina Marga,



Batam, 27 Oktober 2020





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Rp 208.980.826.000	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					KEPULAUAN RIAU	Rp 9.603.000.000	
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	100 %			KEPULAUAN RIAU	Rp 9.603.000.000	
		Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1 KM			KEPULAUAN RIAU	Rp 9.603.000.000	
				Provinsi Kepulauan Riau				
				Satker PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau		KEPULAUAN RIAU	Rp 9.603.000.000	
				328 Pelebaran Jalan Menambah Lajur		KEPULAUAN RIAU	Rp 9.603.000.000	
					> PPK 1.2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
					R Pelebaran Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tanjung Berikat	KOTA BATAM	Rp 9.603.000.000	
			1 KM		- Pelebaran Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tanjung Berikat		Rp 9.588.160.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar [7 O		Rp 14.840.000	
		Panjang Pembangunan Jalan	3,75 Km					
				Provinsi Kepulauan Riau				
				Satker PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau				
				338 Pembangunan Jalan			Rp 32.912.673.000	
					> PPK 1.4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
					O Pembangunan Jalan Teluk Buton - Klarik (PN)	KAB. NATUNA	Rp 14.751.423.000	
			2 KM		- Jalan Teluk Buton - Klarik (PN)		Rp 14.736.583.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar [7 OR		Rp 14.840.000	
					P Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)	KAB. NATUNA	Rp 18.141.720.000	
			1,75 KM		- Jalan Selat Lampa - Teluk Dapih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (PN)		Rp 18.141.720.000	
					> Honor Panitia Lelang Paket Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)	KOTA BATAM	Rp 19.530.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar [7 O		Rp 19.530.000	





NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<b>Panjang Pembangunan Jembatan</b>	<b>19,11 M</b>					
				<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>				
				<b>Satker PJJ Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau</b>				
				<b>339 Pembangunan Jembatan</b>			<b>Rp 8.069.400.000</b>	
					<b>&gt; PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
					<b>T Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs</b>	<b>KAB. NATUNA</b>		
			6,88 M		- Jembatan Klarik 2 (STA 10250)		Rp 2.692.250.000	
			5,65 M		- Jembatan Klarik 3 (STA 13450)		Rp 2.680.000.000	
			6,58 M		- Jembatan Klarik 4 (STA 18335)		Rp 2.680.000.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar [7 O		Rp 17.150.000	
		<b>Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	<b>554,07 Km</b>					
				<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>				
				<b>Satker PJJ Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau</b>			<b>Rp 30.301.526.000</b>	
			<b>220,51 KM</b>	<b>319 Pemeliharaan Rutin Jalan</b>			<b>Rp 10.180.692.000</b>	
			<b>19,69 KM</b>		<b>&gt; PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 411.664.000</b>	
					<b>A Preservasi Jalan Sp. Gesek (KM 16) - Tanjung Uban - Sialang</b>	<b>KAB. BINTAN</b>		
			9,49 KM		- Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Sp. Busung (10.005)		Rp 35.815.000	
			1,70 KM		- Jalan Sp. Busung - Sp. Lobam (10.006)		Rp 6.320.000	
			0,30 KM		- Jalan Sp. Lobam - Tanjung Uban (10.007.11 K)		Rp 52.670.000	
			2,50 KM		- Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Gesek (10.035)		Rp 6.320.000	
			0,30 KM		- Jalan Gesek - Kangka (10.036)		Rp 113.786.000	
			5,40 KM		- Jalan Kangka - Sialang (10.037)			
			<b>143,77 KM</b>		<b>&gt; PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 7.984.704.000</b>	
					<b>B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang</b>	<b>KOTA BATAM</b>		
			1,72 KM		- Jalan Batam Centre - Sp. Franky (10.008.11 K)		Rp 223.885.000	
			1,93 KM		- Jalan Sp. Frangky - Sp. Kabil (10.008.12 K)		Rp 268.546.000	
			3,82 KM		- Jalan Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani) (10.008.13 K)		Rp 154.393.000	
			3,70 KM		- Jalan Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letje Suprapto) (10.008.14 K)		Rp 334.289.000	
			6,16 KM		- Jalan Tembesi - Tanjung Berikat (10.008.15 K)		Rp 1.592.288.000	
			24,93 KM		- Jalan Tanjung Berikat - Sp. Sembulang (10.008.16 K)		Rp 1.172.153.000	
			29,53 KM		- Jalan Sp. Sembulang - Pel. Galang (10.008.17 K)		Rp 451.815.000	
			7,27 KM		- Jalan Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada) (10.009.12 K)		Rp 64.245.000	
			3,29 KM		- Jalan Sp. Kabil - Sp. Jam (Jl. Jend. Sudirman) (10.009.11 K)		Rp 80.594.000	
			3,52 KM		- Jalan Sei Harapan - Sekupang (Jl. Re. Martadinata) (10.009.13 K)		Rp 353.481.000	
			4,07 KM		- Jalan Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman) (10.010.11 K)		Rp 466.482.000	
			6,74 KM		- Jalan Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah) (10.010.12 K)		Rp 435.241.000	
			14,23 KM		- Jalan Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu) (10.010.13 K)		Rp 1.314.347.000	
			9,54 KM		- Jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin) (10.011.11 K)		Rp 208.062.000	
			4,85 KM		- Jalan Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprapto) (10.012.11 K)		Rp 415.189.000	
			7,89 KM		- Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang (Jln. Bngjen Katamsno) (10.012.12 K)		Rp 192.757.000	
			6,80 KM		- Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basechamp Batu Aji) (10.044.11 K)		Rp 10.540.000	
			3,50 KM		- Jalan Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre) (10.045.11 K)		Rp 9.560.000	
			0,58 KM		- Jalan Baloi Centre - Sp. Sei Ladi (IUB) (10.034.12 K)			
			<b>18,89 KM</b>		<b>&gt; PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 450.820.000</b>	
			<b>5,73 KM</b>		<b>C Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang</b>	<b>KAB. KARIMUN</b>	<b>Rp 149.506.000</b>	
			0,20 KM		- Jalan Tg. Balai - Meral (10.013.11 K)		Rp 5.218.000	
			2,30 KM		- Jalan Meral - Parit Rampak (10.014)		Rp 60.011.000	
			1,16 KM		- Jalan Parit Rampak - Pelabuhan Roro (10.015)		Rp 30.266.000	
			0,30 KM		- Jalan Parit Rampak - Parit Benut (10.016)		Rp 7.828.000	
			0,30 KM		- Jalan Parit Benut - Sp. Jeletung (10.017)		Rp 7.828.000	
			1,47 KM		- Jalan Sp. Jeletung - Pasir Panjang (10.018)		Rp 38.355.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8,36	KM	<b>D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur</b>	<b>KAB. LINGGA</b>	<b>Rp 198.153.000</b>	
			1,00	KM	- Jalan Daik - Tg. Buton (10.019.11 K)		Rp 22.258.000	
			1,40	KM	- Jalan Daik - Sp. Limbung (sp. batu gajah) (10.020.11 K)		Rp 32.090.000	
			0,50	KM	- Jalan Sp. Limbung (sp. batu gajah) - Sp. Resun (10.021)		Rp 12.040.000	
			1,10	KM	- Jalan Sp. Resun - Pel. Sei Tenam (10.022.11 K)		Rp 25.364.000	
			4,36	KM	- Jalan Sp. Sungai Besar - Pancur (10.040)		Rp 106.401.000	
			4,80	KM	<b>E Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro</b>	<b>KAB. LINGGA</b>	<b>Rp 103.161.000</b>	
			3,60	KM	- Jalan Dabo - Kote (10.023.11 K)		Rp 77.371.000	
			1,20	KM	- Jalan Kote - Jagoh (10.024)		Rp 25.790.000	
			37,16	KM	<b>&gt; PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 729.641.000</b>	
			7,90	KM	<b>F Preservasi Jalan Tarempa - Rintis</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>	<b>Rp 136.698.000</b>	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta (7 ORG)		Rp 5.950.000	
			7,90	KM	- Jalan Pel. Tarempa - Sp. Rintis (10.041)		Rp 130.748.000	
			3,40	KM	<b>G Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>	<b>Rp 47.195.000</b>	
			1,90	KM	- Jalan Peninting - Payalaman (10.042)		Rp 26.374.000	
			1,50	KM	- Jalan Payalaman - Pel. Roro (10.043)		Rp 20.821.000	
			25,86	KM	<b>H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton</b>	<b>KAB. NATUNA</b>	<b>Rp 545.748.000</b>	
			2,46	KM	- Jalan Selat Lampa - Sp. Sekunyam (10.026)		Rp 51.916.000	
			5,90	KM	- Jalan Sp. Sekunyam - Desa Cemaga (10.027)		Rp 124.513.000	
			6,20	KM	- Jalan Desa Cemaga - Sei Ulu (10.028)		Rp 130.844.000	
			1,00	KM	- Jalan Sei Ulu - Ranai (10.029.11 K)		Rp 21.104.000	
			2,20	KM	- Jalan Ranai - Sp. Tanjung (10.030.11 K)		Rp 48.429.000	
			7,80	KM	- Jalan Sp. Tanjung - Tanjung Datuk (10.031)		Rp 164.611.000	
			0,30	KM	- Jalan Tanjung Datuk - Teluk Buton (10.032)		Rp 6.331.000	
			1,00	LS	<b>&gt; Dana Transisi Kegiatan Rutin</b>		<b>Rp 603.863.000</b>	
			1,00	LS	<b>I Satker Induk</b>	<b>KOTA BATAM</b>		
					- Dana Transisi Kegiatan Rutin		Rp 603.863.000	
			143,86	KM	<b>320 Pemeliharaan Rutin Kondisi</b>		<b>Rp 8.631.018.000</b>	
			40,11	KM	<b>&gt; PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 761.227.000</b>	
			20,33	KM	<b>A Preservasi Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Tanjung Uban - Sialang</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 622.670.000</b>	
			8,69	KM	- Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Sp. Busung (10.005)		Rp 315.604.000	
			0,70	KM	- Jalan Sp. Busung - Sp. Lobam (10.006)		Rp 134.904.000	
			0,90	KM	- Jalan Sp. Lobam - Tanjung Uban (10.007.11 K)		Rp 10.867.000	
			0,70	KM	- Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Gesek (10.035)		Rp 13.972.000	
			8,79	KM	- Jalan Gesek - Kangka (10.036)		Rp 10.867.000	
					- Jalan Kangka - Sialang (10.037)		Rp 136.456.000	
			-	KM	<b>AL Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Busung (6.413 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AL Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Busung (6.398 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 73.521.000</b>	
			-	KM	<b>AM Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Busung - Lobam (3.703 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AM Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Busung - Lobam (3.513 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 31.089.000</b>	
			-	KM	<b>AN Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Lobam - Tanjung Uban (3.045 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AN Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Lobam - Tanjung Uban (1.940 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 17.169.000</b>	
			-	KM	<b>AO Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Gesek (0.586 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AO Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Gesek (1.896 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 16.778.000</b>	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<b>8,36</b>	<b>KM</b>	<b>D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur</b>	<b>KAB. LINGGA</b>	<b>Rp 198.153.000</b>	
			1,00	KM	- Jalan Daik - Tg. Buton (10.019.11 K)	Rp	22.258.000	
			1,40	KM	- Jalan Daik - Sp. Limbung (sp. batu gajah) (10.020.11 K)	Rp	32.090.000	
			0,50	KM	- Jalan Sp. Limbung (sp. batu gajah) - Sp. Resun (10.021)	Rp	12.040.000	
			1,10	KM	- Jalan Sp. Resun - Pel. Sei Tenam (10.022.11 K)	Rp	25.364.000	
			4,36	KM	- Jalan Sp. Sungai Besar - Pancur (10.040)	Rp	106.401.000	
			<b>4,80</b>	<b>KM</b>	<b>E Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro</b>	<b>KAB. LINGGA</b>	<b>Rp 103.161.000</b>	
			3,60	KM	- Jalan Dabo - Kote (10.023.11 K)	Rp	77.371.000	
			1,20	KM	- Jalan Kote - Jagoh (10.024)	Rp	25.790.000	
			<b>37,16</b>	<b>KM</b>	<b>&gt; PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 729.641.000</b>	
			<b>7,90</b>	<b>KM</b>	<b>F Preservasi Jalan Tarempa - Rintis</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>	<b>Rp 136.698.000</b>	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta [7 ORG	Rp	5.950.000	
			7,90	KM	- Jalan Pel. Tarempa - Sp. Rintis (10.041)	Rp	130.748.000	
			<b>3,40</b>	<b>KM</b>	<b>G Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>	<b>Rp 47.195.000</b>	
			1,90	KM	- Jalan Peninting - Payalaman (10.042)	Rp	26.374.000	
			1,50	KM	- Jalan Payalaman - Pel. Roro (10.043)	Rp	20.821.000	
			<b>25,86</b>	<b>KM</b>	<b>H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton</b>	<b>KAB. NATUNA</b>	<b>Rp 545.748.000</b>	
			2,46	KM	- Jalan Selat Lampa - Sp. Sekunyam (10.026)	Rp	51.916.000	
			5,90	KM	- Jalan Sp. Sekunyam - Desa Cemaga (10.027)	Rp	124.513.000	
			6,20	KM	- Jalan Desa Cemaga - Sei Ulu (10.028)	Rp	130.844.000	
			1,00	KM	- Jalan Sei Ulu - Ranai (10.029.11 K)	Rp	21.104.000	
			2,20	KM	- Jalan Ranai - Sp. Tanjung (10.030.11 K)	Rp	46.429.000	
			7,80	KM	- Jalan Sp. Tanjung - Tanjung Datuk (10.031)	Rp	164.611.000	
			0,30	KM	- Jalan Tanjung Datuk - Teluk Buton (10.032)	Rp	6.331.000	
			<b>1,00</b>	<b>LS</b>	<b>&gt; Dana Transisi Kegiatan Rutin</b>		<b>Rp 603.863.000</b>	
					<b>I Satker induk</b>	<b>KOTA BATAM</b>		
			1,00	LS	- Dana Transisi Kegiatan Rutin	Rp	603.863.000	
			<b>143,86</b>	<b>KM</b>	<b>320 Pemeliharaan Rutin Kondisi</b>		<b>Rp 8.631.018.000</b>	
			<b>40,11</b>	<b>KM</b>	<b>&gt; PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 761.227.000</b>	
					<b>A Preservasi Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Tanjung Uban - Sialang</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 622.670.000</b>	
			20,33	KM	- Jalan Sp. Gesek (Km 16) - Sp. Busung (10.005)	Rp	315.604.000	
			8,69	KM	- Jalan Sp. Busung - Sp. Lobam (10.006)	Rp	134.904.000	
			0,70	KM	- Jalan Sp. Lobam - Tanjung Uban (10.007.11 K)	Rp	10.867.000	
			0,90	KM	- Jalan Sp. Gesek (Km 16) - Gesek (10.035)	Rp	13.972.000	
			0,70	KM	- Jalan Gesek - Kangka (10.036)	Rp	10.867.000	
			8,79	KM	- Jalan Kangka - Sialang (10.037)	Rp	136.456.000	
			-	KM	<b>AL Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Busung (6.413 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AL Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Busung (6.398 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 73.521.000</b>	
			-	KM	<b>AM Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Busung - Lobam (3.703 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AM Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Busung - Lobam (3.513 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 31.089.000</b>	
			-	KM	<b>AN Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Lobam - Tanjung Uban (3.045 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AN Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Lobam - Tanjung Uban (1.940 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 17.169.000</b>	
			-	KM	<b>AO Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Gesek (0.586 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp -</b>	
			-	KM	<b>AO Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Gesek (1.896 KM)</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 16.778.000</b>	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					> PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	2.364.816.000
			8,40	KM	B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang	KOTA BATAM	Rp	2.219.514.000
			-	KM	- Jalan Batam Centre - Sp. Franky (10.008.11.K)		Rp	-
			-	KM	- Jalan Sp. Frangky - Sp. Kabil (10.008.12.K)		Rp	-
			-	KM	- Jalan Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani) (10.008.13.K)		Rp	-
			-	KM	- Jalan Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letje Suprpto) (10.008.14.K)		Rp	-
			1,50	KM	- Jalan Tembesi - Tanjung Berikat (10.008.15.K)		Rp	432.787.000
			1,00	KM	- Jalan Tanjung Berikat - Sp. Sembulang (10.008.16.K)		Rp	217.000.000
			0,10	KM	- Jalan Sp. Sembulang - Pel. Galang (10.008.17.K)		Rp	8.472.000
			-	KM	- Jalan Sp. Kabil - Sp. Jam (Jl. Jend. Sudirman) (10.009.11.K)		-	-
			0,20	KM	- Jalan Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada) (10.009.12.K)		Rp	48.527.000
			0,30	KM	- Jalan Sei Harapan - Sekupang (Jl. Re Martadinata) (10.009.13.K)		Rp	62.826.000
			2,20	KM	- Jalan Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman) (10.010.11.K)		Rp	557.203.000
			0,30	KM	- Jalan Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah) (10.010.12.K)		Rp	193.866.000
			0,80	KM	- Jalan Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu) (10.010.13.K)		Rp	72.988.000
			-	KM	- Jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin) (10.011.11.K)		Rp	-
			0,80	KM	- Jalan Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto) (10.012.11.K)		Rp	182.439.000
			1,20	KM	- Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang (Jln. Brigjen Katamso) (10.012.12.K)		Rp	443.406.000
			-	KM	- Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basechamp Batu Aji) (10.044.11.K)		Rp	-
			-	KM	- Jalan Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Balai Centre) (10.045.11.K)		Rp	-
			-	KM	- Jalan Balai Centre - Sp. Sei Ladi (UIB) (10.045.12.K)		Rp	-
			-	KM	BL Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang (13.22 KM)	KOTA BATAM	Rp	-
			-	KM	BL Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang (14.46 KM)	KOTA BATAM	Rp	-
			-	KM	BL Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Sembulang - Pel. Galang (14.50 KM)	KOTA BATAM	Rp	145.302.000
			40,00	KM	> PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	3.170.451.000
			15,72	KM	C Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang	KAB. KARIMUN	Rp	618.770.000
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar [7 O		Rp	8.890.000
			2,00	KM	- Jalan Tg. Balai - Meral (10.013.11.K)		Rp	78.724.000
			3,72	KM	- Jalan Meral - Parit Rampak (10.014)		Rp	146.426.000
			0,70	KM	- Jalan Parit Rampak - Pelabuhan Roro (10.015)		Rp	27.553.000
			2,10	KM	- Jalan Parit Rampak - Parit Benut (10.016)		Rp	82.660.000
			0,90	KM	- Jalan Parit Benut - Sp. Jelutung (10.017)		Rp	35.426.000
			6,30	KM	- Jalan Sp. Jelutung - Pasir Panjang (10.018)		Rp	239.091.000
			-	KM	CD Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Tanjung Balai - Meral (2.33 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp	72.800.000
			-	KM	CE Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Meral - Parit Rampa (9.02 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp	229.767.000
			-	KM	CF Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Parit Rampak - Parit Benut (1.54 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp	17.265.000
			-	KM	CG Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Parit Benut - Sp. Jelutung (1.30 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp	14.575.000
			-	KM	CH Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Jelutung - Pasir Panjang (11.13 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp	228.094.000
			15,88	KM	D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur	KAB. LINGGA	Rp	572.048.000
			2,81	KM	- Jalan Daik - Tj. Buton (10.019.11.K)		Rp	102.397.000
			2,30	KM	- Jalan Daik - Sp. Limbung (sp. batu gajah) (10.020.11.K)		Rp	90.300.000
			1,18	KM	- Jalan Sp. Limbung (sp. batu gajah) - Sp. Resun (10.021)		Rp	47.197.000
			3,95	KM	- Jalan Sp. Resun - Pel. Sei Tenam (10.022.11.K)		Rp	145.605.000
			5,64	KM	- Jalan Sp. Sungai Besar - Pancur (10.040)		Rp	186.549.000
			-	KM	DA Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Daik - Tj. Buton (2.99 KM)	KAB. LINGGA	Rp	-





NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			-	KM	DA Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Daik - Tj. Buton (3.71 KM)	KAB. LINGGA	Rp 256.262.000	
			-	KM	DB Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Daik - Sp. Limbung (3.94 KM)	KAB. LINGGA	Rp -	
			-	KM	DB Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Daik - Sp. Limbung (4.11 KM)	KAB. LINGGA	Rp 176.697.000	
			-	KM	DC Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Daik - Sp. Limbung (8.20 KM)	KAB. LINGGA	Rp -	
			-	KM	DC Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Daik - Sp. Limbung (7.46 KM)	KAB. LINGGA	Rp -	
			-	KM	DC Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Daik - Sp. Limbung (3.77 KM)	KAB. LINGGA	Rp 99.324.000	
			-	KM	DE Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Limbung - Sp. Resun (0.73 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp 52.305.000	
			-	KM	DF Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Sungai Besar - Pel. Pancur (1.62 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp 20.535.000	
			8,40	KM	E Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro	KAB. LINGGA	Rp 316.931.000	
			5,00	KM	- Jalan Dabo - Kote (10.023.11 K)	Rp	188.649.000	
			3,40	KM	- Jalan Kote - Jagoh (10.024)	Rp	128.282.000	
			-	KM	EA Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Dabo - Kote (5.20 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp 262.115.000	
			-	KM	EB Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Kote - Jagoh (2.00 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp 23.092.000	
			-	KM	EC Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Jagoh - Pel. Roro (0.46 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp 209.871.000	
			55,35	KM	> PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp	2.334.524.000	
			0,30	KM	F Preservasi Jalan Tarempa - Rintis	KAB. ANAMBAS	Rp 11.781.000	
			0,30	KM	- Jalan Pel. Tarempa - Sp. Rintis (10.041)	Rp	11.781.000	
			-	KM	FA Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Tarempa - Rintis (0.50 KM)	KAB. ANAMBAS	Rp -	
			-	KM	FA Perjalanan Dinas Kunjungan Kegiatan Revitalisasi Drainase Padat Karya Ruas Jalan Nasional Ke Kab. Kepulauan Anambas	KAB. ANAMBAS	Rp 62.000.000	
			3,86	KM	G Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro	KAB. ANAMBAS	Rp 140.083.000	
			2,60	KM	- Jalan Peninting - Payalaman (10.042)	Rp	94.356.000	
			1,26	KM	- Jalan Payalaman - Pel. Roro (10.043)	Rp	45.727.000	
			-	KM	GA Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Payalaman - Pel. Roro (0.50 KM)	-	Rp -	
			-	KM	GB Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Payalaman - Peninting (0.40 KM)	-	Rp -	
			51,19	KM	H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA	Rp 1.957.809.000	
			7,40	KM	- Jalan Selat Lampa - Sp. Sekunyam (10.026)	Rp	283.020.000	
			11,90	KM	- Jalan Sp. Sekunyam - Desa Cemaga (10.027)	Rp	455.127.000	
			10,07	KM	- Jalan Desa Cemaga - Sei Ulu (10.028)	Rp	385.136.000	
			2,00	KM	- Jalan Sei Ulu - Ranai (10.029.11 K)	Rp	76.492.000	
			2,60	KM	- Jalan Ranai - Sp. Tanjung (10.030.11 K)	Rp	99.439.000	
			16,40	KM	- Jalan Sp. Tanjung - Tanjung Datuk (10.031)	Rp	627.233.000	
			0,82	KM	- Jalan Tanjung Datuk - Teluk Buton (10.032)	Rp	31.362.000	
			-	KM	HA Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Tanjung - Tanjung Datuk (7.00 KM)	KAB. NATUNA	Rp -	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			-	KM	HA	Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Tanjung - Tanjung Datuk (8,00 KM)	KAB. NATUNA	Rp -
			-	KM	HA	Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Tanjung - Tanjung Datuk (6,80 KM)	KAB. NATUNA	Rp 120.625.000
			-	KM	HB	Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sei Ulu - Cemaga (4,68 KM)	KAB. NATUNA	Rp -
			-	KM	HB	Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sei Ulu - Cemaga (5,06 KM)	KAB. NATUNA	Rp 34.143.000
			-	KM	HQ	Rutin Kondisi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Ranai - Sp. Tanjung (1,20 KM)	KEPULAUAN RIAU	Rp 8.083.000
			97,03	KM	329	Penunjang/Holding	Rp 11.489.816.000	
						> PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 2.647.616.000	
			22,58	KM	A	Preservasi Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Tanjung Uban - Sialang	KAB. BINTAN	
			0,40	KM	-	Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Sp. Busung (10.005)	Rp	48.902.000
			0,05	KM	-	Jalan Sp. Busung - Sp. Lobam (10.006)	Rp	5.863.000
			2,90	KM	-	Jalan Sp. Lobam - Tanjung Uban (10.007.11 K)	Rp	340.039.000
			1,48	KM	-	Jalan Sp. Gesek (Km.16) - Gesek (10.035)	Rp	173.537.000
			3,70	KM	-	Jalan Gesek - Kangka (10.036)	Rp	433.843.000
			14,05	KM	-	Jalan Kangka - Sialang (10.037)	Rp	1.647.432.000
						> PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 1.262.397.000	
			2,10	KM	B	Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang	KOTA BATAM	
			-	KM	-	Jalan Batam Centre - Sp. Franky (10.008.11 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Sp. Franky - Sp. Kabil (10.008.12 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani) (10.008.13 K)	Rp	-
			0,10	KM	-	Jalan Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letje Suprpto) (10.008.14 K)	Rp	15.313.000
			0,10	KM	-	Jalan Tembesi - Tanjung Berikat (10.008.15 K)	Rp	67.883.000
			0,20	KM	-	Jalan Tanjung Berikat - Sp. Sembulang (10.008.16 K)	Rp	166.141.000
			0,10	KM	-	Jalan Sp. Sembulang - Pel. Galang (10.008.17 K)	Rp	89.548.000
			0,10	KM	-	Jalan Sp. Kabil - Sp. Jam (Jl. Jend. Sudirman) (10.009.11 K)	Rp	39.153.000
			1,20	KM	-	Jalan Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada) (10.009.12 K)	Rp	600.565.000
			0,10	KM	-	Jalan Sei Harapan - Sekupang (Jl. Re Martadinata) (10.009.13 K)	Rp	13.836.000
			-	KM	-	Jalan Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman) (10.010.11 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Sp. Punggur - Batu Besar (Jl. Hang Tuah) (10.010.12 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Batu Besar - Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. Hang Lekiu) (10.010.13 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin) (10.011.11 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto) (10.012.11 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang (Jln. Brigjen Katamso) (10.012.12 K)	Rp	-
			-	KM	-	Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basechamp Batu Aji) (10.044.11 K)	Rp	-
			0,20	KM	-	Jalan Balai Centre - Sp. Sei Ladi (UIB) (10.045.12 K)	Rp	269.958.000
			34,06	KM		> PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 3.684.523.000	
			4,37	KM	C	Preservasi Jalan TJ. Balai - Meral - Pasir Panjang	KAB. KARIMUN	Rp 414.491.000
			1,00	KM	-	Jalan Tg. Balai - Meral (10.013.11 K)	Rp	94.849.000
			0,50	KM	-	Jalan Meral - Parit Rampak (10.014)	Rp	47.425.000
			1,20	KM	-	Jalan Parit Rampak - Pelabuhan Roro (10.015)	Rp	113.819.000
			0,17	KM	-	Jalan Parit Benut - Sp. Jeletung (10.017)	Rp	16.124.000
			1,50	KM	-	Jalan Sp. Jeletung - Pasir Panjang (10.018)	Rp	142.274.000



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<b>16,85</b>	<b>KM</b>	<b>D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur</b>	<b>KAB. LINGGA</b>	<b>Rp 1.877.407.000</b>	
			2,00	KM	- Jalan Daik - Tg. Buton (10.019.11 K)		Rp 201.724.000	
			3,99	KM	- Jalan Daik - Sp. Limbung (sp. batu gajah) (10.020.11 K)		Rp 430.577.000	
			1,50	KM	- Jalan Sp. Limbung (sp. batu gajah) - Sp. Resun (10.021)		Rp 166.297.000	
			6,80	KM	- Jalan Sp. Resun - Pel. Sei Tenam (10.022.11 K)		Rp 760.111.000	
			2,56	KM	- Jalan Sp. Sungai Besar - Pancur (10.040)		Rp 318.698.000	
			<b>12,84</b>	<b>KM</b>	<b>E Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro</b>	<b>KAB. LINGGA</b>	<b>Rp 1.392.625.000</b>	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar [7 O		Rp 8.890.000	
			7,36	KM	- Jalan Dabo - Kote (10.023.11 K)		Rp 789.376.000	
			5,00	KM	- Jalan Kote - Jagoh (10.024)		Rp 542.299.000	
			0,48	KM	- Jalan Jagoh - Pelabuhan Roro (Sei Beluh) (10.025)		Rp 52.060.000	
			<b>38,29</b>	<b>KM</b>	<b>&gt; PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 3.895.280.000</b>	
			<b>1,30</b>	<b>KM</b>	<b>F Preservasi Jalan Tarempa - Rintis</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>	<b>Rp 92.024.000</b>	
			1,30	KM	- Jalan Pel. Tarempa - Sp. Rintis (10.041)		Rp 92.024.000	
			<b>3,67</b>	<b>KM</b>	<b>G Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>	<b>Rp 432.889.000</b>	
			3,47	KM	- Jalan Peninting - Payalaman (10.042)		Rp 409.298.000	
			0,20	KM	- Jalan Payalaman - Pel. Roro (10.043)		Rp 23.591.000	
			<b>33,32</b>	<b>KM</b>	<b>H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton</b>	<b>KAB. NATUNA</b>	<b>Rp 3.370.367.000</b>	
			3,80	KM	- Jalan Selat Lampa - Sp. Sekunyam (10.026)		Rp 384.376.000	
			5,10	KM	- Jalan Sp. Sekunyam - Desa Cemaga (10.027)		Rp 515.873.000	
			0,70	KM	- Jalan Desa Cemaga - Sei Ulu (10.028)		Rp 70.806.000	
			6,30	KM	- Jalan Sei Ulu - Ranai (10.029.11 K)		Rp 637.254.000	
			7,36	KM	- Jalan Ranai - Sp. Tanjung (10.030.11 K)		Rp 744.475.000	
			9,46	KM	- Jalan Sp. Tanjung - Tanjung Datuk (10.031)		Rp 956.893.000	
			0,60	KM	- Jalan Tanjung Datuk - Teluk Buton (10.032)		Rp 60.690.000	
			<b>88,93</b>		<b>Satker SKPD - TP Prov Kepri</b>		<b>Rp 6.764.705.000</b>	
			<b>10,95</b>	<b>KM</b>	<b>319 Pemeliharaan Rutin Jalan</b>		<b>Rp 230.707.000</b>	
					<b>A Preservasi Jalan Km 16 (SP. Gesek) - Kjang CS - Sialang - SP. Lagoi</b>	<b>Kepulauan Riau (Tanjungpinang - Bintan)</b>	<b>Rp 230.707.000</b>	
			1,00	KM	- Sp. Wacopek - Kjang (Sei Enam) ( 003 )		Rp 20.080.000.000	
			0,10	KM	- Jl. Kebun Nenas ( 004.12 K )		Rp 2.408.000.000	
			0,28	KM	- Jl. Hang Jebat ( 004.15 K )		Rp 7.809.000.000	
			0,10	KM	- Jl. Sribayintan - Pelabuhan ( 004.17 K )		Rp 1.848.000.000	
			0,60	KM	- Sialang - Sp. Pengudang (038)		Rp 11.076.000.000	
			5,20	KM	- Sp. Pengudang - Sp. Lagoi (039)		Rp 79.547.000.000	
			0,27	KM	- Jl. Yos Soedarmo (001.14 K)		Rp 7.727.000.000	
			0,10	KM	- Jl. A. Yani ( 001.17 K )		Rp 2.815.000.000	
			0,70	KM	- Jl. Rh. Fisabilillah ( 001.18 K )		Rp 16.856.000.000	
			0,40	KM	- Jl. Sp. Adi Sucipto - Gesek ( 001.1A K )		Rp 15.226.000.000	
			0,30	KM	- Jl. Bandara (SP RSUP - Bandara RHF) ( 001.1B K )		Rp 13.749.000.000	
			0,60	KM	- Sp. Rumah Sakit - Senggarang ( 044 )		Rp 24.080.000.000	
			0,10	KM	- Jl. Rh. Fisabilillah (Kp. Haji) - Sp. Dompok Lama ( 002.11 K )		Rp 5.818.000.000	
			1,20	KM	- Jl. Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek ( 002.12 K )		Rp 21.870.000.000	
			<b>41,88</b>	<b>KM</b>	<b>320 Pemeliharaan Rutin Kondisi</b>		<b>Rp 1.570.814.000</b>	
			29,40	<b>KM</b>	<b>A Preservasi Jalan Km.16 (SP. Gesek) - Kjang CS - Sialang - SP. Lagoi</b>	<b>Kepulauan Riau (Tanjungpinang - Bintan)</b>	<b>Rp 1.475.541.000</b>	
			1,40	KM	Jl. Bandara (SP RSUP - Bandara RHF) ( 001.1B K )		Rp 104.050.000	
			4,51	KM	Sp. Rumah Sakit - Senggarang ( 044 )		Rp 292.943.000	
			1,88	KM	Jl. Rh. Fisabilillah (Kp. Haji) - Sp. Dompok Lama ( 002.11 K )		Rp 135.545.000	
			2,90	KM	Jl. Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek ( 002.12 K )		Rp 91.400.000	
			3,60	KM	Sp. Wacopek - Kjang (Sei Enam) ( 003 )		Rp 128.876.000	
			0,20	KM	Jl. Kebun Nenas ( 004.12 K )		Rp 9.632.000	
			0,20	KM	Jl. Hang Jebat ( 004.15 K )		Rp 8.428.000	
			0,15	KM	Jl. Hang Tuah ( 004.16 K )		Rp 6.446.000	
			0,27	KM	Jl. Sribayintan - Pelabuhan ( 004.17 K )		Rp 7.569.000	
			2,60	KM	Sialang - Sp. Pengudang (038)		Rp 84.839.000	
			0,53	KM	Jl. Agus Salim (001.12 K)		Rp 29.722.000	
			2,70	KM	Sp. Pengudang - Sp. Lagoi (039)		Rp 104.588.000	
			0,20	KM	Jl. Usman Harun (001.13 K)		Rp 11.237.000	
			0,27	KM	Jl. Wiratno (001.15 K)		Rp 15.226.000	
			0,59	KM	Jl. Basuki Rahmat ( 001.16 K )		Rp 47.253.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0,38 KM		Jl. A. Yani ( 001.17 K )		Rp 17.445.000	
			2,49 KM		Jl. Rh. Fisabilillah ( 001.18 K )		Rp 98.824.000	
			1,00 KM		Jl. D.I. Panjatan ( 001.19 K )		Rp 100.796.000	
			3,55 KM		Jl. Sp. Adi Sucipto - Gesek ( 001.1A K )		Rp 180.722.000	
			1,0031 KM		AA Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Hang Tuah(1,0031KM)		Rp 11.311.000	
			1,07 KM		AB Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Yos Soedarso(1.07KM)		Rp 7.823.000	
			0,72 KM		AC Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Wiratno(0.72KM)		Rp 5.230.000	
			1,12 KM		AD Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Basuki Rahmat(1.12KM)		Rp 8.174.000	
			2,05 KM		AE Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. A. Yani(2.05KM)		Rp 14.997.000	
			1,97 KM		AF Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl.Rh. Fisabilillah(1.97KM)		Rp 14.411.000	
			3,50 KM		AG Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Sp Wacopek-Kijang(Sei Enam)(3.50KM)		Rp 25.634.000	
			0,16 KM		AI Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl.Berdikari(0.16KM)		Rp 1.170.000	
			0,23 KM		AJ Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Tanah Kuning(0.23KM)		Rp 1.682.000	
			0,12 KM		AK Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Barok Betawi(0.12KM)		Rp 877.000	
			0,10 KM		AL Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Hang Jebal(0.10KM)		Rp 731.000	
			0,44 KM		AM Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya.Jl. Sribayantan-Pelabuhan(0.44KM)		Rp 3.233.000	
			<b>48,58 KM</b>	<b>329 Penunjang/Holding</b>			<b>Rp 4.963.184.000</b>	
			<b>48,58</b>		A Preservasi Jalan Km 16 (SP Gesek ) - Kijang CS - Sialang - SP. Lagoi	Kepulauan Riau (Tanjungpinang - Bintan)	Rp 4.963.184.000	
			1,10 KM		- Jl. D.I. Panjatan ( 001.19 K )		Rp 235.160.000	
			2,40 KM		- Jl. Sp. Adi Sucipto - Gesek ( 001.1A K )		Rp 335.635.000	
			0,70 KM		- Jl. Bandara (SP RSUP - Bandara RHF) ( 001.1B K )		Rp 150.389.000	
			4,30 KM		- Sp. Rumah Sakit - Senggarang ( 044 )		Rp 552.029.000	
			0,50 KM		- Jl. Rh. Fisabilillah (Kp. Hai) - Sp. Dompok Lama ( 002.11 K )		Rp 98.262.000	
			3,60 KM		- Jl. Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek ( 002.12 K )		Rp 414.794.000	
			3,30 KM		- Sp. Wacopek - Kijang (Sei Enam) ( 003 )		Rp 358.261.000	
			0,15 KM		- Jl. Berdikari ( 004.11 K )		Rp 14.834.000	
			0,18 KM		- Jl. Kebun Nenas ( 004.12 K )		Rp 16.656.000	
			0,74 KM		- Jl. Tanah Kuning ( 004.13 K )		Rp 104.154.000	
			0,85 KM		- Jl. Hang Tuah ( 001.11 K )		Rp 170.616.000	
			0,35 KM		- Jl. Barok Betawi ( 004.14 K )		Rp 41.908.000	
			0,20 KM		- Jl. Sribayantan - Pelabuhan ( 004.17 K )		Rp 14.112.000	
			11,30 KM		- Sialang - Sp. Pengudang (038)		Rp 812.468.000	
			13,26 KM		- Sp. Pengudang - Sp. Lagoi (039)		Rp 886.409.000	
			5,00 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar		Rp 8.900.000	
			0,20 KM		- Jl. Agus Salim (001.12 K)		Rp 22.772.000	
			0,75 KM		- Jl. Usman Harun (001.13 K)		Rp 94.578.000	
			0,40 KM		- Jl. Yos Soedarso (001.14 K)		Rp 57.080.000	
			0,80 KM		- Jl. Wiratno (001.15 K)		Rp 131.463.000	
			0,70 KM		- Jl. Basuki Rahmat ( 001.16 K )		Rp 112.160.000	
			1,40 KM		- Jl. A. Yani ( 001.17 K )		Rp 179.817.000	
			1,40 KM		- Jl. Rh. Fisabilillah ( 001.18 K )		Rp 150.727.000	
		<b>Panjang Preservasi Rutin Jembatan</b>	<b>5.642,90 M</b>					
				<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>				
				<b>Satker PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau</b>				
			<b>5.642,90 M</b>	<b>325 Pemeliharaan Rutin Jembatan</b>			<b>Rp 4.151.193.000</b>	
					<b>&gt; PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
			<b>2.754,40 M</b>		<b>A Preservasi Jalan Km 16 (Sp. Gesek) Kijang CS Sp. Pengudang (Km 46) Tanjung Uban</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 2.002.378.000</b>	
			23,50 M		- Jembatan Sei Angus (10.001.104.0.15)		Rp 16.919.000	
			61,00 M		- Jembatan Sei Jang (10.001.106.0.16)		Rp 42.825.000	
			15,60 M		- Jembatan Blongkeng (10.002.103.0.12)		Rp 12.296.000	
			81,60 M		- Jembatan Simpang Kiri (10.002.106.0.12)		Rp 55.332.000	
			60,50 M		- Jembatan Sei Wacopek (10.002.107.0.12)		Rp 40.561.000	
			230,70 M		- Jembatan Engku Putri Raja Hamidah 1 (10.044.001.0.00)		Rp 173.518.000	
			175,10 M		- Jembatan Engku Putri Raja Hamidah 2 (10.044.003.0.00)		Rp 126.323.000	
			43,10 M		- Jembatan Tanjung Lanjut (10.044.004.0.00)		Rp 32.184.000	
			20,80 M		- Jembatan Sei Ladi (10.044.005.0.00)		Rp 15.305.000	





NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			20,70	M	- Jembatan Waduk Kijang (10.003.005.0.00)		Rp	15.278.000
			61,40	M	- Jembatan Gesek (10.005.002.0.00)		Rp	43.951.000
			502,80	M	- Jembatan Kang Boy (10.005.011.0.00)		Rp	396.390.000
			82,20	M	- Jembatan Bintan (10.005.014.0.00)		Rp	54.967.000
			582,90	M	- Jembatan Anculai (10.005.016.0.00)		Rp	465.592.000
			226,80	M	- Jembatan Ekang (10.005.018.0.00)		Rp	137.648.000
			268,60	M	- Jembatan Busung (10.005.022.0.00)		Rp	160.243.000
			25,60	M	- Jembatan Waduk Gesek 1 (10.035.007.0.00)		Rp	16.724.000
			26,90	M	- Jembatan Waduk Gesek 2 (10.035.008.0.00)		Rp	21.080.000
			6,00	M	- Jembatan Gesek 1 (10.036.003.0.00)		Rp	22.876.000
			8,90	M	- Jembatan Kawal 1 (10.037.001.0.00)		Rp	7.437.000
			56,40	M	- Jembatan Kawal (10.037.004.0.00)		Rp	44.023.000
			20,80	M	- Jembatan Sei Kelubi (10.037.012.0.00)		Rp	12.755.000
			18,70	M	- Jembatan Teluk Bakau 8 (10.037.017.0.00)		Rp	12.123.000
			6,90	M	- Jembatan Kampung Keling A (10.037.019.A.00)		Rp	5.740.000
			6,90	M	- Jembatan Kampung Keling B (10.037.019.B.00)		Rp	5.326.000
			6,80	M	- Jembatan Kampung Keling 2 (10.037.021.0.00)		Rp	5.296.000
			6,90	M	- Jembatan Kampung Keling 3 (10.037.022.0.00)		Rp	5.326.000
			6,90	M	- Jembatan Dakomas 3 (10.037.025.0.00)		Rp	5.326.000
			6,80	M	- Jembatan Pulau Pucung (10.037.026.0.00)		Rp	4.070.000
			23,70	M	- Jembatan Teluk Dalam (10.037.028.0.00)		Rp	7.450.000
			6,60	M	- Jembatan Teluk Dalam 2 (10.037.030.0.00)		Rp	4.039.000
			20,70	M	- Jembatan Kampung Sumpat 1 (10.038.001.0.00)		Rp	8.511.000
			23,80	M	- Jembatan Kampung Sumpat 2 (10.038.002.0.00)		Rp	10.060.000
			8,00	M	- Jembatan Kampung Sumpat 3 (10.038.003.0.00)		Rp	6.933.000
			9,90	M	- Jembatan Ekang Anculai (10.039.006.0.00)		Rp	7.951.000
					<b>&gt; PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
			<b>1.619,40</b>	<b>M</b>	<b>B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang</b>	<b>KOTA BATAM</b>	<b>Rp</b>	<b>1.225.965.000</b>
			9,00	M	- Jembatan Muka Kuning 2 (10.008.107.0.13)		Rp	7.200.000
			420,00	M	- Jembatan Nara Singa (10.008.110.0.16)		Rp	266.445.000
			271,80	M	- Jembatan Raja Ali Haji (10.008.111.0.16)		Rp	217.440.000
			365,00	M	- Jembatan Sultan Jainal (10.008.112.0.16)		Rp	292.000.000
			181,60	M	- Jembatan Raja Kecil (10.008.115.0.17)		Rp	145.280.000
			18,00	M	- Jembatan Baloi A (10.009.103.A.12)		Rp	14.400.000
			18,30	M	- Jembatan Baloi B (10.009.103.B.12)		Rp	14.640.000
			18,30	M	- Jembatan Baloi C (10.009.103.C.12)		Rp	14.640.000
			21,00	M	- Jembatan Baloi D (10.009.103.D.12)		Rp	16.800.000
			10,00	M	- Jembatan Tiban 1 (10.009.106.0.12)		Rp	8.000.000
			10,00	M	- Jembatan Duta Mas A (10.010.101.A.11)		Rp	8.000.000
			10,00	M	- Jembatan Duta Mas B (10.010.101.B.11)		Rp	8.000.000
			10,30	M	- Jembatan KDA 2 A (10.010.103.A.11)		Rp	8.240.000
			10,30	M	- Jembatan KDA 2 B (10.010.103.B.11)		Rp	8.240.000
			10,00	M	- Jembatan Bandara Mas 1 A (10.010.104.A.12)		Rp	8.000.000
			10,00	M	- Jembatan Bandara Mas 1 B (10.010.104.B.12)		Rp	8.000.000
			6,00	M	- Jembatan Bandara Mas 2 B (10.010.105.B.12)		Rp	4.800.000
			163,00	M	- Jembatan Nongsa (10.010.106.0.13)		Rp	130.400.000
			8,00	M	- Jembatan Tembesi 2 A (10.012.102.A.11)		Rp	6.400.000
			8,00	M	- Jembatan Tembesi 2 B (10.012.102.B.11)		Rp	6.400.000
			6,40	M	- Jembatan Batu Aji 1 A (10.012.104.A.12)		Rp	5.120.000
			6,40	M	- Jembatan Batu Aji 1 B (10.012.104.B.12)		Rp	5.120.000
			9,00	M	- Jembatan Sei Jodoh 2A (10.034.102.A.11)		Rp	7.200.000
			9,00	M	- Jembatan Sei Jodoh 2B (10.034.102.B.11)		Rp	7.200.000
			10,00	M	- Jembatan Baloi View (10.034.103.0.12)		Rp	8.000.000
					<b>&gt; PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp</b>	<b>246.000.000</b>
			<b>307,50</b>	<b>M</b>	<b>C Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang</b>	<b>KAB. KARIMUN</b>	<b>Rp</b>	<b>8.800.000</b>
			11,00	M	- Jembatan Kolong (10.013.002.0.11)		Rp	8.800.000



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			120,30	M	D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur	KAB. LINGGA	Rp 96.240.000	
			12,60	M	- Jembatan Tande Udu (10.019.003.0 11)	Rp	10.080.000	
			6,40	M	- Jembatan Kp.Budus (10.019.005.0 11)	Rp	5.120.000	
			7,50	M	- Jembatan Sepincan 1 (10.020.003.0 11)	Rp	6.000.000	
			24,50	M	- Jembatan Sepincan 2 (10.020.004.0 11)	Rp	19.600.000	
			13,70	M	- Jembatan Air Pemadi (10.020.008.0 11)	Rp	10.960.000	
			15,80	M	- Jembatan Air Pangga (10.020.009.0 11)	Rp	12.640.000	
			8,90	M	- Jembatan Air Batu hitam (10.020.012.0 11)	Rp	7.120.000	
			6,20	M	- Jembatan Air Jihak (10.021.005.0)	Rp	4.960.000	
			7,00	M	- Jembatan Sungai Salak 2 (10.021.007.0)	Rp	5.600.000	
			17,70	M	- Jembatan Desa Resun 5 (10.022.007.0 11)	Rp	14.160.000	
			176,20	M	E Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro	KAB. LINGGA	Rp 140.960.000	
			9,10	M	- Jembatan Sergang Darat (10.023.002.0 11)	Rp	7.280.000	
			12,70	M	- Jembatan Berindat (10.023.003.0 11)	Rp	10.160.000	
			15,00	M	- Jembatan Persing 1 (10.023.004.0 11)	Rp	12.000.000	
			10,30	M	- Jembatan Persing 2 (10.023.005.0 11)	Rp	8.240.000	
			14,30	M	- Jembatan Sungai Nyiur (10.023.006.0 11)	Rp	11.440.000	
			17,00	M	- Jembatan Nerakak (10.023.009.0 11)	Rp	13.600.000	
			10,00	M	- Jembatan Air Merah (10.023.010.0 11)	Rp	8.000.000	
			14,90	M	- Jembatan Lanjut 2 (10.023.012.0 11)	Rp	11.920.000	
			17,30	M	- Jembatan Penat (10.023.013.011)	Rp	13.840.000	
			21,00	M	- Jembatan Kote Tengah (10.024.001.0)	Rp	16.800.000	
			25,70	M	- Jembatan Kote Barat (10.024.002.0)	Rp	20.560.000	
			8,90	M	- Jembatan Pelakak 2 (10.024.004.0)	Rp	7.120.000	
			961,60	M	> PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp	676.850.000	
			9,50	M	F Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA	Rp 6.687.000	
			25,60	M	- Jembatan Sei Sempar (10.026.008.0)	Rp	18.019.000	
			61,00	M	- Jembatan Semintan (10.027.001.B)	Rp	42.937.000	
			155,00	M	- Jembatan Singgang Bulan (10.028.007.0)	Rp	109.101.000	
			26,50	M	- Jembatan Batu Bayan (10.028.010.B)	Rp	18.653.000	
			9,50	M	- Jembatan Cemaga Darat (10.028.011.0)	Rp	6.687.000	
			9,40	M	- Jembatan Sei Lak-Lak (10.028.012.0)	Rp	6.616.000	
			6,10	M	- Jembatan Cemaga Selatan (10.028.015.0)	Rp	4.294.000	
			50,60	M	- Jembatan Ranai (10.029.001.0 11)	Rp	35.616.000	
			11,10	M	- Jembatan Batu Hitam (10.029.002.0 11)	Rp	7.813.000	
			20,40	M	- Jembatan Bandarsyah (10.029.003.0 11)	Rp	14.359.000	
			6,40	M	- Jembatan Air Muling 1 (10.029.004.0 11)	Rp	4.505.000	
			6,80	M	- Jembatan Air Muling 2 (10.029.005.0 11)	Rp	4.786.000	
			20,00	M	- Jembatan Sei Ulu (10.029.006.0 11)	Rp	14.077.000	
			20,00	M	- Jembatan Jemengan (10.030.001.0 11)	Rp	14.077.000	
			16,00	M	- Jembatan Batu Kapal (10.030.002.0 11)	Rp	11.262.000	
			16,00	M	- Jembatan Sepampang (10.030.006.0 11)	Rp	11.262.000	
			16,70	M	- Jembatan Sejuba (10.030.007.0 11)	Rp	11.755.000	
			16,70	M	- Jembatan Teluk Selahang (10.030.009.0 11)	Rp	11.755.000	
			19,10	M	- Jembatan Tanjung (10.030.010.0 11)	Rp	13.444.000	
			32,80	M	- Jembatan Kelanga (10.031.003.0)	Rp	23.087.000	
			31,30	M	- Jembatan Silas (10.031.004.0)	Rp	22.031.000	
			25,50	M	- Jembatan Tedung (10.031.007.0)	Rp	17.949.000	
			142,50	M	- Jembatan Semitan (10.031.020.0)	Rp	100.306.000	
			15,10	M	- Jembatan Sei Bemban (10.031.026.0)	Rp	10.629.000	
			25,10	M	- Jembatan Sei Panas (10.031.030.0)	Rp	17.667.000	
			35,20	M	- Jembatan Air Nabal (10.031.031.0)	Rp	24.776.000	
			15,20	M	- Jembatan Air Udang (10.031.033.0)	Rp	10.699.000	
			50,60	M	- Jembatan Muara (10.031.035.0)	Rp	35.616.000	
			25,70	M	- Jembatan Air Buntu (10.031.036.0)	Rp	18.090.000	
			40,20	M	- Jembatan Beladang (10.032.001.0)	Rp	28.295.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	4 Layanan				Rp 19.811.132.000	
				Provinsi Kepulauan Riau				
			4 Layanan	Satker P2JN KEPRI			Rp 19.811.132.000	
			1 Layanan	307 Perencanaan Teknik (DED)			5.223.124.000,00	
			1 Lap		A PERENCANAAN TEKNIS JALAN NASIONAL DAN REHABILITASI JEMBATAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Provinsi Kepri (Tersebar)	Rp 2.301.002.000	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	Rp 5.450.000	
			1 Lap		B CORE TEAM CONSULTANT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Provinsi Kepri	Rp 1.918.159.000	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	Rp 5.450.000	
			1 Lap		CORE TEAM CONSULTANT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Provinsi Kepri	Rp 993.063.000	
			1 Layanan	308 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan			354.587.000,00	
					DA Penyusunan Tata Batas Di Ruas Simpang Sikunyam - Teluk Depih - Selat Lampa Provinsi Kepulauan Riau	Natuna	354.587.000	
					SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN		9.400.000	
			4 OB		- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [1 ORG x 4 BLN]		1.800.000	
			4 OB		- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [1 ORG x 4 BLN]		1.600.000	
			20 OB		- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [5 ORG x 4 BLN]		6.000.000	
					SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN		84.186.000	
			36 OH		- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [4 ORG x 9 HARI]		13.320.000	
			18 OH		- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU) [2 ORG x 9 HARI]		14.256.000	
			18 OH		RIAU) [2 ORG x 9 HARI]		18.666.000	
			12 OK		- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BATAM [4 ORG x 3 KALI]		34.656.000	
			24 OK		- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kepulauan Riau) [4 ORG x 3 KALI x 2 PP]		3.288.000	
					SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN		201.001.000	
					Pembuatan Tanda Batas		232.000.000	
			650 Patok		- Pembuaian Patok		227.500.000	
			30 OH		- Upah Buruh Pemasangan Patok [3 org x 10 hari]		4.500.000	
			2 OB		Pembuatan Peta dan Titik Koordinat Patok		29.001.000	
			1 Keg		- Konsultan Individu [1 ORG x 2 BLN]		21.000.000	
					- ATK		8.001.000	
			1 Layanan	309 Pengawasan teknik			13.119.115.000,00	
			1 Lap		C PENGAWASAN PRESERVASI JALAN KM 16 (SP GESEK) - KIJANG CS - SIALANG - SP LAGOI DAN PRESERVASI JALAN KM 10 (SP GESEK) - TANJUNG UBAN - SIALANG	Kabupaten Bintan	2.028.937.000,00	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1 Lap		D PENGAWASAN PRESERVASI JALAN NONGSA - BATU AMPAR - TEMBESI - GALANG DAN PELEBARAN PENAMBAHAN LAJUR JALAN TEMBESI - TANJUNG BERIKAT	Kota Batam	2.105.736.000,00	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1 Lap		E PENGAWASAN PRESERVASI JALAN T.J. BALAI - MERAL - PASIR PANJANG, PRESERVASI JALAN DAIK - T.J. BUTON - SUNGAI BESAR - PANCUR DAN PRESERVASI JALAN DABO - KOTE - PEL. RORO	Kab Karimun dan Kab Lingga	1.452.473.000,00	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1 Lap		F PENGAWASAN PRESERVASI JALAN TAREMPA - RINTIS DAN PRESERVASI JALAN PENINTING - PAYALAMAN - PEL. RORO	Kab Anambas	1.212.530.000,00	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1 Lap		G PENGAWASAN PRESERVASI JALAN SELAT LAMPA - RANAI - TELUK BUTON	Kab Natuna	1.604.519.000,00	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1 Lap		H PENGAWASAN REHABILITASI JEMBATAN DI PULAU BINTAN DAN PULAU BATAM	Pulau Bintan dan Pulau Batam	1.077.549.000,00	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1 Lap		I PENGAWASAN REHABILITASI JEMBATAN DI KABUPATEN LINGGA	Kab Lingga	835.046.000,00	
			5 OP		- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar)	Tanjungpinang	3.600.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1	Lap	J PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN DI PULAU NATUNA	Pulau Natuna	1.081.080.000,00	
			5	OP	- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1	Lap	K PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN SELAT LAMPA - TELUK DEPIH - SP- SEKUNYAM (PENGALIHAN TRASE) (UMYC)	Pulau Natuna	670.572.000,00	
			5	OP	- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	5.450.000	
			1	Lap	L PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK BUTON - KLARIK	Pulau Natuna	1.005.223.000,00	
			5	OP	- Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar)	Tanjungpinang	4.550.000	
			1	Layanan	<b>401 Monitoring dan evaluasi</b>		<b>1.114.306.000,00</b>	
					DB Monitoring dan Evaluasi Tata Usaha - BPJN KEPRI		120.382.000	
					SATKER INDUK			
			6	OH	RIAU] [1 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		6.222.000	
			24	OH	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [4 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		8.880.000	
			18	OH	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU) [3 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		14.256.000	
			16	OK	- BATAM [4 ORG x 4 KALI]		77.872.000	
			96	OK	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kepulauan Riau) [4 ORG x 12 KALI x 2 PPI]		13.152.000	
					DC KEPRI		159.318.000	
					SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN			
			24	OH	RIAU] [1 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		8.880.000	
			18	OH	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU) [3 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		14.256.000	
			6	OH	RIAU] [1 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		6.222.000	
			24	OK	- BATAM [4 ORG x 6 KALI]		118.808.000	
			96	OK	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kepulauan Riau) [4 ORG x 12 KALI x 2 PPI]		13.152.000	
					DD Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan - BPJN KEPRI		118.190.000	
					SEKSI PEMBANGUNAN JALAN BPJN KEPRI			
			6	OH	RIAU] [1 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		6.222.000	
			24	OH	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [4 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		8.880.000	
			18	OH	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU) [3 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		14.256.000	
			16	OK	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Bisnis JAKARTA - BATAM [4 ORG x 4 KALI]		77.872.000	
			80	OK	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kepulauan Riau) [4 ORG x 10 KALI x 2 PPI]		10.960.000	
					DE Monitoring dan Evaluasi Preservasi - BPJN KEPRI		115.276.000	
					SEKSI PRESERVASI			
			12	OH	RIAU] [2 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		12.444.000	
			24	OH	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [4 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		8.880.000	
			12	OH	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU) [2 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		9.504.000	
			16	OK	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Bisnis JAKARTA - BATAM [4 ORG x 4 KALI]		77.872.000	
			48	OK	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kepulauan Riau) [4 ORG x 12 KALI x 0 PPI]		6.576.000	
					M PEMANTAUAN DAN EVALUASI SATKER PAKET P2JN		601.140.000	
					SATKER P2JN			
			1	LS	- Dokumentasi, Pelaporan dan Penjilidan		6.000.000	
			1	LS	- Supply Komputer		8.000.000	
			1	LS	- ATK		8.220.000	
					Monitoring dan Evaluasi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan			
			16	OH	RIAU] [1 ORG x 2 HARI x 3 BLN]		5.920.000	
					Monitoring dan Evaluasi Kota Batam			
			120	OK	[4 ORG x 30 KALI]		18.000.000	
			63	OH	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [21 OK x 3 HARI]		23.310.000	
			42	OH	HARI]		18.900.000	
					Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Karimun			
			30	OK	Karimun [3 ORG x 10 KALI]		13.500.000	
			18	OH	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [6 OK x 3 HARI]		6.660.000	
			12	OH	HARI]		5.400.000	
					Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Lingga			
			24	OK	Lingga [3 ORG x 8 KALI]		12.000.000	





NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			36	OH	- Uang Harian Penyalinan Dinas Luar Kola (Kepulauan Riau) [9 OK x 4 HARI]		13.320.000	
			27	OH	HARI]		12.150.000	
			30	OK	Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Natuna		75.000.000	
			36	OH	- Uang Harian Penyalinan Dinas Luar Kola (Kepulauan Riau) [9 OK x 4 HARI]		13.320.000	
			36	OH	HARI]		16.200.000	
			30	OK	Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Anambas		71.490.000	
			36	OH	- Uang Harian Penyalinan Dinas Luar Kola (Kepulauan Riau) [9 OK x 4 HARI]		13.320.000	
			45	OH	HARI]		20.250.000	
			30	OK	Presentasi dan Pelaporan Movev		60.000.000	
			24	OH	- Uang Harian Penyalinan Dinas Luar Kola (Jambi) [6 OK x 4 HARI]		8.880.000	
			18	OH	- Biaya Penginapan Penyalinan Dinas Golongan III. (J A M B I) [6 OK x 3 HARI]		10.440.000	
			45	OK	BATAM [3 ORG x 15 KALI]		135.000.000	
			24	OH	- Uang Harian Penyalinan Dinas Luar Kola (D.K.I. Jakarta) [6 OK x 4 HARI]		12.720.000	
			18	OH	JAKARTA) [6 OK x 3 HARI]		13.140.000	
		<b>Tingkat Rating Keselamatan</b>	<b>4,3</b>	<b>%</b>				
		<b>Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan</b>	<b>22,05</b>	<b>Km</b>				
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>								
					<b>Satker PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>Rp 51.388.843.000</b>	
			<b>3,10</b>	<b>KM</b>	<b>321 Pemeliharaan Rutin Preventif</b>		<b>Rp 300.888.000</b>	
		22,17			<b>&gt; PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 66.683.000,00</b>	
					<b>B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang</b>	<b>KOTA BATAM</b>		
					- Uang Muka Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang		Rp -	
					<b>B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang</b>	<b>KOTA BATAM</b>		
			0,30	KM	- Jalan Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letje Suprpto) (10.00.14 K)		Rp 66.683.000,00	
					<b>&gt; PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 234.205.000,00</b>	
					<b>G Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>		
					- Uang Muka Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro		Rp -	
					<b>G Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro</b>	<b>KAB. ANAMBAS</b>		
			2,80	KM	- Jalan Peninting - Payalaman (10.042)		Rp 234.205.000,00	
			<b>11,91</b>	<b>KM</b>	<b>322 Rehabilitasi Minor Jalan</b>		<b>Rp 19.847.711.000</b>	
					<b>&gt; PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
			<b>6,80</b>	<b>KM</b>	<b>A Preservasi Jalan Sp. Gesek (KM 16) - Tanjung Uban - Sialang</b>	<b>KAB. BINTAN</b>	<b>Rp 9.322.035.000</b>	
			1,10	KM	- Jalan Sp. Gesek (Km 16) - Sp. Busung (10.005)		Rp 1.505.202.000	
			2,50	KM	- Jalan Sp. Busung - Sp. Lobam (10.006)		Rp 3.420.914.000	
			1,20	KM	- Jalan Gesek - Kangka (10.036)		Rp 1.642.038.000	
			2,00	KM	- Jalan Kangka - Sialang (10.037)		Rp 2.736.731.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar [7 O		Rp 17.150.000	
			<b>4,11</b>	<b>KM</b>	<b>&gt; PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
			<b>0,81</b>	<b>KM</b>	<b>B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang</b>	<b>KOTA BATAM</b>	<b>Rp 8.417.942.000</b>	
			-	KM	- Jalan Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letje Suprpto) (10.008.14 K)		Rp 1.497.566.000	
			-	KM	- Jalan Sei Harapan - Sekupang (Jl. Re Martadinata) (10.009.13 K)		Rp -	
			-	KM	- Jalan Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. Sudirman) (10.010.11 K)		Rp -	
			2,10	KM	- Jalan Sp. Punggur - Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin) (10.011.11 K)		Rp 4.576.980.000	
			1,20	KM	- Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basechamp Batu Aji) (10.033.11 K)		Rp 2.326.256.000	
			-	KM	- Jalan Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Balai Centre) (10.034.11 K)		Rp -	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar [7 O		Rp 17.150.000	
			<b>1,00</b>	<b>KM</b>	<b>&gt; PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 2.107.734.000</b>	
					<b>D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur</b>	<b>KAB. LINGGA</b>		
					- Uang Muka Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur		Rp -	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1,00		D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur - Jalan Sp. Resun - Pel. Sei Tenam (10.022.11 K)	KAB. LINGGA	Rp 2.107.734.000	
			<b>0,95</b>	<b>KM</b>	<b>323 Rehabilitasi Mayor Jalan</b>		<b>Rp 3.489.116.000</b>	
					> PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 2.963.270.000</b>	
					B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang - Uang Muka Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang	KOTA BATAM	Rp -	
			0,82	KM	B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang - Jalan Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani) (10.008.13 K)	KOTA BATAM	Rp -	
			-	KM	- Jalan Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre) (10.034.11 K)	Rp	-	
			0,82	KM	- Jalan Baloi Centre - Sp. Sei Ladi (UIB) (10.034.12 K)	Rp	2.963.270.000	
			<b>0,13</b>	<b>KM</b>	<b>&gt; PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 525.846.000</b>	
					D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur - Uang Muka Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur	KAB. LINGGA	Rp -	
					D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur - Jalan Sp. Sungai Besar - Pancur (10.040)	KAB. LINGGA	Rp 525.846.000	
			0,13	KM				
			<b>3,78</b>	<b>KM</b>	<b>324 Rekonstruksi Jalan</b>		<b>Rp 15.251.056.000</b>	
					> PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 2.467.862.000</b>	
			0,40	KM	A Preservasi Jalan Sp. Gesek (KM 16) - Tanjung Uban - Sialang - Jalan Sp. Gesek (Km. 16) - Sp. Busung (10.005)	KAB. BINTAN	Rp 2.467.862.000	
			0,40	KM				
					> PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 884.095.000</b>	
					B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang - Uang Muka Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang	KOTA BATAM	Rp -	
			0,40	KM	B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang - Jalan Duyung (Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre) (10.034.11 K)	KOTA BATAM	Rp 884.095.000	
			0,40	KM				
					> PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 4.200.676.000</b>	
					D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur - Uang Muka Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur	KAB. LINGGA	Rp -	
			1,00	KM	D Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur - Jalan Sp. Sungai Besar - Pancur (10.040)	KAB. LINGGA	Rp 4.185.836.000	
			1,00	KM	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar /7 OR	Rp	14.840.000	
					> PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 7.698.423.000</b>	
			1,98	KM	G Preservasi Jalan Penting - Payalaman - Pel. Roro - Jalan Penting - Payalaman (10.042)	KAB. ANAMBAS	Rp 7.683.583.000	
			1,98	KM	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar /7 OR	Rp	14.840.000	
			<b>0,45</b>	<b>KM</b>	<b>331 Penanganan Longsoran</b>		<b>Rp 6.607.117.000</b>	
					> PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 4.351.397.000</b>	
			0,15	KM	A Preservasi Jalan Sp. Gesek (KM 16) - Tanjung Uban - Sialang - Jalan Sp. Gesek (Km. 16) - Sp. Busung (10.005)	KAB. BINTAN	Rp 4.351.397.000	
			0,15	KM				
					> PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 2.255.720.000</b>	
			0,30	KM	B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang - Jalan Sp. Jam - Sei Harapan (Jl. Gajah Mada) (10.009.12 K)	KOTA BATAM	Rp -	
			-	KM	- Jalan Sp. Sembulang - Pel. Galang (10.008.17 K)	Rp	-	
			0,30	KM		Rp	2.255.720.000	
			1,98	KM	2409.002.054 Penanganan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan		Rp 5.892.955.000	
			<b>0,35</b>	<b>KM</b>	<b>321 Pemeliharaan Rutin Preventif</b>		<b>Rp 37.628.000</b>	
					> PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<b>Rp 37.628.000</b>	
					H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton - Uang Muka Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA	Rp -	
			0,35	KM	H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton - Jalan Desa Cemaga - Sei Ulu (10.028)	KAB. NATUNA	Rp 37.628.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0,68 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan			Rp 613.059.000	
					> PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp 613.059.000	
					H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA		
					- Uang Muka Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton		Rp -	
			0,68 KM		H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA	Rp 613.059.000	
					- Jalan Desa Cemaga - Sei Ulu (10.028)			
			0,60 KM	323 Rehabilitasi Mayor Jalan			Rp 945.680.000	
					> PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp 945.680.000	
					H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA		
					- Uang Muka Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton		Rp -	
			0,50 KM		H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA	Rp 819.589.000	
					- Jalan Desa Cemaga - Sei Ulu (10.028)			
			0,10 KM		- Jalan Sp. Tanjung - Tanjung Datuk (10.031)		Rp 126.091.000	
			0,35 KM	324 Rekonstruksi Jalan			Rp 4.296.588.000	
					> PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
			0,35 KM		H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton	KAB. NATUNA	Rp 4.296.588.000	
					- Jalan Desa - Cemaga - Sei Ulu (10.028)		Rp 4.281.748.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar [7.0		Rp 14.840.000	
				Satker SKPD - TP Prov Kepri			Rp 887.949.000	
			0,40 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan			Rp -	
					B PRESERVASI JALAN KM16 (SP. GESEK) - KIJANG CS - SIALANG - SP. LAGOI		Rp 887.949.000,00	
					- Jl Yos Soedarso (001.14.K)		Rp 887.949.000,00	
		Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	21,62 KM					
				Provinsi Kepulauan Riau				
				Satker PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau				
				403 Penanganan Drainase			Rp 21.957.455.000	
			6,49 KM		> PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp 6.195.208.000	
			3,20 KM		AP Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Busung	KAB. BINTAN	Rp 3.011.957.000	
			0,58 KM		AQ Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek (KM.16) - Gesek	KAB. BINTAN	Rp 553.621.000	
			2,04 KM		AR Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Gesek - Kangka	KAB. BINTAN	Rp 1.975.677.000	
			0,67 KM		AS Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Kangka - Sialang	KAB. BINTAN	Rp 653.953.000	
			3,31 KM		> PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp 13.421.009.000	
			0,42 KM		B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang	KOTA BATAM	Rp 10.926.331.000	
			0,05 KM		- Jalan Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A.Yani) (10.008.13.K) (Depan Panbil Mall)		Rp 3.189.461.000	
			0,25 KM		- Jalan Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto) (10.012.11.K) (Putri Tujuh)		Rp 2.714.568.000	
			0,05 KM		- Jalan Tembesi - Batu Aji (Jln. Letjen Suprpto) (10.012.11.K) (Makam Pahlawan)		Rp 2.424.431.000	
			0,01 KM		- Jalan Sp. Sei Harapan - Sp. Basecamp (Depan Perum Paradise) (10.033.11.K)		Rp 741.146.000	
			0,03 KM		- Jalan Sembulang - Pelabuhan Galang (10.008.17.K) (Galang 1)		Rp 791.527.000	
			0,03 KM		- Jalan Sembulang - Pelabuhan Galang (10.008.17.K) (Galang 2)		Rp 1.065.198.000	
			0,11 KM		BM Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Muka Kuning - Tembesi	KOTA BATAM	Rp 106.803.000	
			0,21 KM		BN Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Tembesi - Batu Aji	KOTA BATAM	Rp 144.599.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0,25 KM		BO Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang	KOTA BATAM	Rp 213.508.000	
			0,61 KM		BP Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sei Harapan - Simpang Basecamp	KOTA BATAM	Rp 707.422.000	
			0,21 KM		BQ Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Punggur - Batu Besar	KOTA BATAM	Rp 182.468.000	
			0,25 KM		BR Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Kabil - Simpang Jam	KOTA BATAM	Rp 305.421.000	
			0,09 KM		BS Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Tembesi - Tanjung Berikat	KOTA BATAM	Rp 61.249.000	
			0,32 KM		BT Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Kabil - Simpang Punggur	KOTA BATAM	Rp 288.339.000	
			0,13 KM		BU Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Batam Centre - Simpang Frangky	KOTA BATAM	Rp 124.871.000	
			0,07 KM		BV Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Jam - Sei Harapan	KOTA BATAM	Rp 53.292.000	
			0,45 KM		BW Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Kabil - Simpang Jam	KEPULAUAN RIAU	Rp 102.323.000	
			0,19 KM		BX Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Kabil - Simpang Punggur	KEPULAUAN RIAU	Rp 21.915.000	
			<b>2,00 KM</b>		<b>&gt; PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 650.847.000</b>	
			- KM		CA Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Parit Rampak - Pelabuhan Roro	-	Rp -	
			- KM		CB Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Parit Rampak - Pelabuhan Roro	-	Rp -	
			0,40 KM		CC Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Jelutung - Pasir Panjang	KEPULAUAN RIAU	Rp 191.818.000	
			0,60 KM		CI Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Simpang Jelutung - Pasir Panjang	KEPULAUAN RIAU	Rp 65.449.000	
			0,15 KM		CJ Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Parit Rampak - Parit Benut	KEPULAUAN RIAU	Rp 16.363.000	
			0,20 KM		CK Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Parit Benut - Sp. Jelutung	KEPULAUAN RIAU	Rp 21.817.000	
			0,65 KM		DD Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Dabo - Kote	KAB. LINGGA	Rp 355.400.000	
			<b>6,55 KM</b>		<b>&gt; PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>Rp 1.872.859.000</b>	
			0,55 KM		FB Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Tarempa - Rintis	KAB. ANAMBAS	Rp 17.575.000	
			0,10 KM		FC Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Tarempa - Rintis	KAB. ANAMBAS	Rp 81.388.000	
			- KM		GC Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Peninting - Pel. Roro	KAB. ANAMBAS	Rp -	
			0,05 KM		GC Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Payalaman - Pel. Roro	KAB. ANAMBAS	Rp 15.977.000	
			0,40 KM		GD Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Payalaman - Peninting	KAB. ANAMBAS	Rp 12.781.000	
			- KM		GE Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Peninting - Pel. Roro	KAB. ANAMBAS	Rp -	
			0,05 KM		GE Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Payalaman - Pel. Roro	KAB. ANAMBAS	Rp 30.520.000	
			0,05 KM		GF Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Payalaman - Peninting	KAB. ANAMBAS	Rp 30.521.000	
			- KM		HC Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Ranai - Sei Ulu	-	Rp -	





NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			-	KM	HD Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Ranai - Sp. Tanjung	-	Rp -	
			2,63	KM	HE Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Tanjung - Tj. Datuk	KAB. NATUNA	Rp 81.711.000	
			-	KM	HF Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Tj. Datuk - Tj. Buton	-	Rp -	
			-	KM	HG Galian Tanah untuk Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Sei Ulu - Cemaga	-	Rp -	
			0,20	KM	HI Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Ranai - Sei Ulu	KAB. NATUNA	Rp 127.174.000	
			0,20	KM	HJ Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Ranai - Sp. Tanjung	KAB. NATUNA	Rp 127.174.000	
			1,82	KM	HK Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Sp. Tanjung - Tanjung Datuk	KAB. NATUNA	Rp 1.157.277.000	
			0,20	KM	HL Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Tanjung Datuk - Tj. Buton	KAB. NATUNA	Rp 127.174.000	
			0,10	KM	HM Pasangan Batu dengan Mortar Secara Padat Karya Ruas Jalan Sei Ulu - Cemaga	KAB. NATUNA	Rp 63.587.000	
					Satker SKPD - TP Prov Kepri		Rp 3.348.691.000	
			3,27	KM	403 Penanganan Drainase		Rp 3.348.691.000	
			0,10	KM	FA Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan SP. WACOPEK - KIJANG (SEI ENAM) (003)	Kepulauan Riau (Tanjungpinang - Bintan)	Rp 16.592.000	
			1,00	KM	FB Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan SP. DOMPAK LAMA - SP. WACOPEK (002.12.K)	Kepulauan Riau (Tanjungpinang - Bintan)	Rp 1.052.044.000	
			2,00	KM	FC Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan SP. WACOPEK - KIJANG (SEI ENAM) (003)	Kepulauan Riau (Tanjungpinang - Bintan)	Rp 2.104.088.000	
			0,17	KM	FD Revitalisasi Saluran Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan SP. RSUP - SENGGARANG	Kepulauan Riau (Tanjungpinang - Bintan)	Rp 175.967.000	
		Panjang Preservasi Jembatan	475,20	M				
					Provinsi Kepulauan Riau			
					Satker PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			
			371,10	M	326 Rehabilitasi Jembatan		Rp 8.880.357.000	
					> PPK 1.1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
			24,00	M	J Rehabilitasi Jembatan Kawal 3 Cs	KAB. BINTAN	Rp 317.475.000	
			6,50	M	- Jembatan Kawal 3 (10.037.003.0.00)	Rp	151.834.000	
			6,70	M	- Jembatan Alur Pekap (10.037.018.0.00)	Rp	116.855.000	
			10,80	M	- Jembatan Kampung Keling 1 (10.037.020.0.00)	Rp	42.836.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta /7 ORG	Rp	5.950.000	
					> PPK 1.2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
			247,00	M	K Rehabilitasi Jembatan Rj Haji Fisabilillah Cs	KOTA BATAM	Rp 5.959.332.000	
			60,00	M	- Jembatan Rj Haji Fisabilillah (10.008.109.0 16)	Rp	1.000.000.000	
			80,00	M	- Jembatan Tuanku Tambusai (10.008.114.0 17)	Rp	2.029.682.000	
			77,00	M	- Jembatan Sei Ladi (10.009.105.0 12)	Rp	2.462.500.000	
			15,00	M	- Jembatan Nusa Batam A (10.012.103.A 11)	Rp	225.000.000	
			15,00	M	- Jembatan Nusa Batam B (10.012.103.B 11)	Rp	225.000.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar /7 O	Rp	17.150.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					> PPK 1.3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
			100,10	M	L Rehabilitasi Jembatan Kp.Pahang Cs	KAB. LINGGA	Rp 1.276.275.000	
			31,10	M	- Jembatan Kp.Pahang (10.020.002.0 11)		Rp 387.635.000	
			21,30	M	- Jembatan Kim (10.022.002.0 11)		Rp 271.575.000	
			18,30	M	- Jembatan Lubuk Sei Kapur (10.022.004.0 11)		Rp 233.325.000	
			9,50	M	- Jembatan Desa Resun 6 (10.022.008.0 11)		Rp 121.125.000	
			19,90	M	- Jembatan Desa Resun 7 (10.022.009.0 11)		Rp 253.725.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar [7 O		Rp 8.890.000	
			104,10	M	2409.005.054 Penanganan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan		Rp 1.327.275.000	
				326 Rehabilitasi Jembatan	> PPK 1.4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
			104,10	M	M Rehabilitasi Jembatan Kerani Cs	KAB. NATUNA	Rp 1.327.275.000	
			26,00	M	- Jembatan Kerani (10.030.005.0 11)		Rp 322.610.000	
			16,00	M	- Jembatan Sei Baruk (10.031.021.0)		Rp 204.000.000	
			37,10	M	- Jembatan Berlian (10.031.025.0)		Rp 473.025.000	
			25,00	M	- Jembatan Air Maran (10.031.028.0)		Rp 318.750.000	
					- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar [7 O		Rp 8.890.000	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2	Layanan				
			1	Layanan	Provinsi Kepulauan Riau Satker P2JN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau		Rp 39.680.000	
				052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp 39.680.000	
					PD PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA		Rp 39.680.000	
			1	Layanan	Satker P2JN KEPRI		Rp 1.207.945.000	
				052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp 907.500.000	
			10	Unit	BA Pengadaan Alat Survey SATKER P2JN		Rp 160.000.000	
			16	Unit	BB Pengadaan Perangkat Olah Data SATKER P2JN		Rp 276.500.000	
			8	Unit	DF Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi BPJN KEPRI SATKER INDUK		Rp 121.000.000	
			5	Unit	DG Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN		Rp 66.000.000	
			5	Unit	DH Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Seksi Pembangunan SEKSI PEMBANGUNAN		Rp 66.000.000	
			5	Unit	DI Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Seksi Preservasi SEKSI PRESERVASI		Rp 66.000.000	
			1	Unit	DJ Pengadaan Alat Survey SATKER INDUK		Rp 152.000.000	
				053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		Rp 300.445.000	
			6	Unit	BC Pengadaan Fasilitas SATKER P2JN		Rp 100.000.000	
			40	Unit	DK PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN SATKER INDUK		Rp 200.445.000	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	3	Layanan				
			1	Layanan			Rp	3.300.959.000
				052	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)		Rp	39.027.000
					AA SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (e-MONITORING) PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	39.027.000
				053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		Rp	446.072.000
					AF PERJALANAN DINAS PELAPORAN DAN KOORDINASI KEUANGAN DAN BMN PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	52.028.000
					AG PENDAMPINGAN SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH 30 BIDANG		Rp	394.044.000
				055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan		Rp	2.080.860.000
					AB ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER INDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	217.057.000
					AC PERJALANAN DINAS SATKER INDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	630.329.000
					AD PERJALANAN DINAS PERENCANAAN DAN PROGRAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	129.943.000
					AE PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL SATKER INDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	131.150.000
					AK PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19		Rp	171.000.000
					BB ADMINISTRASI KEGIATAN PPK 1. 1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	136.962.000
					BC PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL PPK 1.1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	19.500.000
					BD ADMINISTRASI KEGIATAN PPK 1. 2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	139.844.000
					BE PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL PPK 1.2 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	19.500.000
					BF ADMINISTRASI KEGIATAN PPK 1. 3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	202.549.000
					BG PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL PPK 1.3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	19.500.000
					BH ADMINISTRASI KEGIATAN PPK 1. 4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	244.026.000
					BJ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL PPK 1.4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	19.500.000
				316	Bahan Jalan dan Jembatan		Rp	735.000.000
					MA TAMBALAN CEPAT MANTAP JENIS COLD PAVING HOT MIX ASBUTON (GPHMA) RUAS PPK 1.4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Rp	735.000.000
			1	Layanan			Rp	4.075.112.000
				052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		Rp	167.264.000
			1	K	DL Rapat Koordinasi BPJN KEPRI		Rp	143.864.000
			12	Bulan	N PERSIAPAN PEMUKT AHIRAN DATA DASAR SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (EMONITORING)		Rp	23.400.000
				053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		Rp	40.860.000
			12	Bulan	O PERJALANAN DINAS KOORDINASI DAN PELAPORAN KEUANGAN BMN		Rp	40.860.000
				055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		Rp	3.866.988.000
			1	Ok	AA PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN PEMBELIAN MASKER, HAND SANITIZER, VITAMIN DAN PENYEMPROTAN DISINFECTAN		Rp	174.000.000
			3	Bulan	AB SEWA GEDUNG KANTOR		Rp	30.000.000
					AC PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN		Rp	200.000.000
			5	Bulan	BD SEWA MESS P2JN KEPRI		Rp	35.000.000
			1	Ok	DM ANGGARAN KESEHATAN BPJN KEPRI		Rp	100.000.000
			1	Layanan	DN Administrasi Kegiatan Seksi Bagian Umum dan Tata Usaha BPJN KEPRI		Rp	320.276.000
			1	Layanan	DO Administrasi Kegiatan Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BPJN KEPRI		Rp	204.324.000
			1	Layanan	DP Administrasi Kegiatan Seksi Pembangunan Jalan - BPJN KEPRI		Rp	252.994.000
			1	Layanan	DQ Administrasi Kegiatan PPK Preservasi		Rp	335.720.000
			5	Bulan	DR SEWA MESS BPJN Kepulauan Riau		Rp	137.500.000
			12	Bulan	P PERJALANAN DINAS KE PUSAT DINAS ANTAR PROVINSI SATKER P2JN		Rp	1.002.584.000
			12	Bulan	Q HONORARIUM		Rp	8.160.000
			12	Bulan	R BELANJA FOTO COPY KANTOR SATKER P2JN		Rp	27.960.000
			12	Bulan	S SEWA KENDARAAN OPERASIONAL SATKER P2JN		Rp	224.420.000
			12	Bulan	T PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR		Rp	299.930.000



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			12	Bulan	U	PERJALANAN DINAS KE PUSAT DINAS ANTAR PROVINSI PPK PERENCANAAN P2JN	Rp 165.040.000	
			12	Bulan	V	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PPK PERENCANAAN P2JN	Rp 112.200.000	
			12	Bulan	W	PERJALANAN DINAS KE PUSAT DINAS ANTAR PROVINSI PPK PENGAWASAN P2JN	Rp 124.680.000	
			12	Bulan	X	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PPK PENGAWASAN P2JN	Rp 112.200.000	
			1	Layanan	Satker SKPD - TP Prov Kepri		Rp 527.836.000	
			12	Layanan	052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp 14.201.000	
					C	SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING)	Rp 14.201.000	
			12	Layanan	053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp 71.980.000	
					E	PERJALANAN DINAS PELAPORAN DAN KOORDINASI KEUANGAN DAN BMN	Rp 71.980.000	
			12	Layanan	055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	Rp 441.655.000	
					D	ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER INDUK	Rp 441.655.000	
		Layanan Perkantoran	2	Layanan				
					Provinsi Kepulauan Riau			
			1	Layanan	Satker P2JN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau		Rp 1.017.269.000	
					001	Gaji dan Tunjangan	Rp 21.185.000	
			1	Layanan	AH	UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	Rp 21.185.000	
					002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 996.084.000	
			1	Layanan	AI	PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN SATKER INDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 758.204.000	
			1	Layanan	AJ	LANGGANAN DAYA DAN JASA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 237.880.000	
			1	Layanan	Satker P2JN KEPRI		Rp 735.101.000	
					001	Gaji dan Tunjangan	Rp 31.300.000	
			12	Bulan	Y	BELANJA LEMBUR	Rp 31.300.000	
					002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 703.801.000	
			1	OB	DS	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPJN KEPRI	Rp 11.250.000	
			4	OB	DT	Honor Pengelola Satker BPJN KEPRI	Rp 71.214.000	
			4	OB	DU	Operasional SATKER INDUK - BPJN KEPRI	Rp 28.642.000	
			4	OB	DV	Operasional Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan- BPJN KEPRI	Rp 17.500.000	
			4	OB	DW	Operasional Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan - BPJN KEPRI	Rp 17.500.000	
			4	OB	DX	Operasional Seksi Preservasi - BPJN KEPRI	Rp 17.500.000	
			12	OB	Z	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	Rp 540.195.000	





**BERITA ACARA CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA / BALAI TA. 2020  
DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA**

NO	PARAMETER KEBERHASILAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	PERMASALAHAN/ KENDALA
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN				
1,1	Aksesibilitas Jalan Nasional	83,00	83,00	-	Kegiatan di tahun 2020 tercapai sesuai dengan parameter yang ditargetkan
1,2	Rating Kondisi Jalan Nasional	2,69	2,46	-0,23	Kegiatan di tahun 2020 tercapai sesuai dengan parameter yang ditargetkan
1,3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	4,30	4,30		Tidak ada kegiatan penanganan terhadap parameter Rating Keselamatan Jalan

NAMA : Ir. FAIZAL M.Si  
 JABATAN : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU  
 TANDATANGAN :





**BERITA ACARA REKAPITULASI FISIK DAN ANGGARAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU TA. 2020  
DI LINGKUNGAN DITJEN. BINA MARGA**

Sasaran Program/ IKP/ IKK	Satuan	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU					
		Fisik			Anggaran (dlm Ribuan Rp.)		
		Awal (PK Revisi)	Revisi (DIPA Rev Terakhir)	Realisasi	Awal (PK Revisi)	Revisi (DIPA Rev Terakhir)	Realisasi
					361.573.357	208.980.826	208.092.259
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional</b>							
<b>IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>					137.427.000	50.566.113	50.566.113
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>							
Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	1,00	1,00	1,00	10.670.000	9.598.760	9.598.760
Panjang Pembangunan Jalan	Km				86.410.000	32.902.853	32.902.853
a. Pembangunan Jalan	Km						
d. Non Pembangunan Jalan:	Km	10,73	3,75	3,75	86.410.000	32.902.853	32.902.853
^Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km	10,73	3,75	3,75	86.410.000	32.902.853	32.902.853
Panjang Pembangunan Jembatan	M	82,00	19,11	19,11	40.347.000	8.064.500	8.064.500
a. Pembangunan Jembatan	M	82,00	19,11	19,11	40.347.000	8.064.500	8.064.500
<b>IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>					217.002.442	147.409.131	146.817.986
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>							
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	542,85	554,07	554,07	39.991.700	37.017.711	36.710.723
Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	33,16	22,05	22,05	117.825.861	51.552.981	51.552.981
a. Rehabilitasi Minor Jalan	Km	16,56	12,99	12,99	37.020.728	20.517.033	20.517.033
b. Rehabilitasi Mayor Jalan	Km	3,90	1,55	1,55	16.280.627	4.636.467	4.636.467
c. Rekonstruksi Jalan	Km	8,00	4,13	4,13	39.584.549	19.560.839	19.560.839
d. Pemeliharaan rutin preventif	Km	3,90	2,93	2,93	448.634	231.525	231.525
e. Penanganan Longsoran	Km	0,80	0,45	0,45	24.491.323	6.607.117	6.607.117
Panjang Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	-	22,43	22,43	-	26.007.437	25.995.746
Panjang Preservasi Rutin Jembatan	M	5.654,50	5.642,90	5.642,90	4.561.540	4.151.193	4.151.193
Panjang Preservasi Jembatan	M	1.464,60	475,20	475,20	33.233.162	8.868.677	8.868.570
a. Rehabilitasi Jembatan	M	1.464,60	475,20	475,20	33.233.162	8.868.677	8.868.570
Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1,00	1,00	1,00	21.390.179	19.811.132	19.538.773





Sasaran Program/ IKP/ IKK	Satuan	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU					
		Fisik			Anggaran (dIm Ribuan Rp.)		
		Awal (PK Revisi)	Revisi (DIPA Rev Terakhir)	Realisasi	Awal (PK Revisi)	Revisi (DIPA Rev Terakhir)	Realisasi
<b>IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>					-	-	-
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>							
<b>IKP 1 : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>					7.143.915	11.005.582	10.708.160
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>							
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	-	2,00	2,00	-	1.300.785	1.286.048
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3,00	3,00	3,00	5.657.831	7.952.427	7.783.341
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2,00	2,00	2,00	1.486.884	1.752.370	1.638.771
					NAMA : Ir. FAIZAL M.S. JABATAN : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU TANDA TANGAN :		

